

Bireuen Kota Juang ***1945-1949***

Sudirman dkk

***Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional
Banda Aceh***

2010



BIREUEN KOTA JUANG
1945 - 1949

BIREUEN KOTA JUANG 1945 - 1949

Penulis:

**Sudirman
Indriani
Cut Nadia Fitriana**

Editor:

Rusdi Sufi

**Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh
2010**

BIREUEN KOTA JUANG 1945 – 1949

Sudirman, dkk.

Edisi Pertama, Agustus 2010

Editor : Rusdi Sufi

Setting : Agung Suryo

Desain Sampul : Iskandar EP.

Diterbitkan oleh:

Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh

ISBN : 978-979-9164-80-3

Hak Cipta 2010 pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan fotokopi tanpa izin sah dari penerbit.

Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh

Jl. Twk. Hasyim Banta Muda No. 17 Banda Aceh 23123

Telp. (0651) 23226 – Faks. (0651) 23226

Email: bpsnt.nad@budpar.go.id

<http://www.bpsnt-bandaaceh.com>

KATA PENGANTAR PENERBIT

Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia telah dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh rakyat Aceh di daerah Bireuen, baik dengan harta maupun jiwa. Hal itu dilakukan sebagai wujud rasa tanggung jawab terhadap agama dan bangsanya. Kepercayaan yang diberikan rakyat Indonesia kepada rakyat Aceh sebagai daerah modal perjuangan, dilakukan secara konsisten sehingga telah menempatkan Aceh sebagai benteng terakhir perjuangan Republik Indonesia melawan penjajah.

Buku ini diterbitkan untuk memahami bagaimana semangat juang dan kesetiaan rakyat Aceh di daerah Bireuen dalam memperjuangkan dan mendukung Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu, sebagai upaya peningkatan apresiasi masyarakat terhadap sejarah bangsanya sehingga dapat memperkuat semangat nasionalisme dan persatuan.

Terbitnya buku ini, selain menambah informasi tentang sejarah daerah, juga memperkaya khazanah literatur tentang Aceh. Dengan demikian, ia diharapkan dapat menjadi masukan, baik untuk kepentingan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah maupun untuk memperluas wawasan masyarakat tentang negara dan bangsanya.

Banyak pihak yang telah membantu sehingga karya tulis ini dapat disajikan dalam bentuk buku seperti ini. Untuk itu, kami menyampaikan ucapan terima kasih. Kami menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih terdapat

kekurangan, baik isi maupun penampilannya. Oleh karena itu, saran dan masukan dari pembaca, kami terima dengan lapang dada, demi perbaikan selanjutnya.

Banda Aceh, Agustus 2010
Kepala Balai Pelestarian Sejarah
dan Nilai Tradisional Banda Aceh



Djuniat, S.Sos.

NIP. 195706071979031011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR PENERBIT	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II ACEH SEBELUM PROKLAMASI KEMERDEKAAN RI	7
A. Zaman Belanda	7
B. Zaman Pendudukan Jepang	13
C. Sekitar Proklamasi Kemerdekaan RI di Aceh	19
BAB III KENEGERIAN-KENEGERIAN DI KABUPATEN BIREUEN	23
A. Jeumpa	23
B. Samalanga	27
C. Peusangan	32
a. Teuku Muhammad Djohan Alamsjah	38
b. Menjadi Uleebalang Peusangan	39
c. Membina Rumah Tangga	40

	d. Uleebalang Peusangan	43
	e. Pembangunan Bidang Pendidikan	43
	f. Pembangunan Bidang Ekonomi	44
	g. Pembangunan Bidang Agama	45
BAB IV	KABUPATEN BIREUEN PADA MASA REVOLUSI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA	47
	A. Berita Proklamasi Kemerdekaan	47
	B. Pembentukan Pemerintahan Daerah	50
	C. Merebut Senjata Tentara Jepang	55
BAB V	PERJUANGAN RAKYAT BIREUEN PADA MASA REVOLUSI KEMERDEKAAN	65
	A. Pembentukan Organisasi Kemiliteran dan Kelasykaran	65
	B. Peranan Masyarakat Bireuen dalam Perang Medan Area	78
	C. Perjuangan Melalui Media Massa	82
	D. Presiden Sukarno Berkunjung ke Bireuen	103

BAB VI PENUTUP

109

DAFTAR PUSTAKA

111

BAB I

PENDAHULUAN

Perjuangan rakyat Indonesia telah mengantarkan bangsa Indonesia ke alam kemerdekaan Indonesia. Dalam periode itu rakyat Aceh telah ikut serta secara aktif melakukan perjuangan, baik secara fisik maupun non-fisik. Sumpah pemuda pada tahun 1928 telah diberi bentuk yang nyata oleh sejumlah pemimpin rakyat Aceh dalam suatu rapat di Deli Bioskop Koetaradja (kini Banda Aceh) pada tahun 1931. Mereka melakukan protes sehubungan dengan pemakaian bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah rakyat. Hal itu, dianggap memperlemah semangat nasionalisme yang sedang tumbuh di kalangan masyarakat Indonesia akibat sumpah pemuda tersebut.

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 menjadi tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia untuk mempertahankan dan mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Rasa tanggung jawab itu telah dilaksanakan oleh rakyat Aceh, khususnya di Bireun sebagai bagian dari rakyat Indonesia.

Untuk menggerakkan roda pemerintahan Republik Indonesia di daerah Aceh. Dalam waktu yang relatif singkat telah berhasil disusun nama-nama para pejabat pemerintahan, sejak dari residen, pejabat kehakiman daerah, pejabat penerangan daerah hingga anggota Dewan Pemerintahan Negeri, di samping susunan anggota Komite Nasional Daerah. Dalam rangka mempertahankan proklamasi dari kemungkinan serangan musuh, dibentuk pula kesatuan ketentaraan dan kelasykaran rakyat, tidak saja di kota-kota bahkan tersebar sampai ke pelosok-pelosok di seluruh daerah. Oleh

Pendahuluan

karena itu, kecuali Sabang, wilayah Aceh tidak berhasil dikuasai kembali oleh Belanda melalui agresinya yang pertama dan kedua.

Uraian di atas merupakan gambaran umum mengenai daerah Aceh, terutama yang menyangkut perkembangan bidang administrasi pemerintahan wilayah daerah tersebut selama masa revolusi kemerdekaan. Beriringan dengan terjadinya perubahan struktur tata pemerintahan, di seluruh daerah berlangsung pula perjuangan rakyat Aceh dalam berbagai bidang kehidupan yang pada dasarnya untuk mempertahankan dan mengisi Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945.

Bireuen sebagai satu di antara daerah yang sangat besar perannya dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di daerah Aceh. Bireuen (sebelumnya termasuk wilayah Kabupaten Aceh Utara) baru ditetapkan menjadi kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 tahun 1999. Oleh karena itu, penelitian dan penulisan ini tidak terlepas dari Kabupaten Aceh Utara. Sebagai kabupaten yang baru dibentuk, diperlukan sejumlah kajian sejarah dan budaya sebagai identitas daerah, apalagi Bireuen termasuk daerah yang sangat aktif dalam mempertahankan kemerdekaan, terutama pada masa-masa revolusi kemerdekaan, sehingga daerah itu dijuluki dengan sebutan "Bireuen Kota Juang".

Ruang lingkup spasial penelitian ini adalah Kabupaten Bireuen, karena rakyat daerah ini sangat besar perannya dalam mempertahankan kemerdekaan, sehingga perlu dikaji dan diteliti secara mendalam. Ruang lingkup temporal (waktu) adalah masa revolusi kemerdekaan Republik Indonesia 1945 hingga 1949 M. Tahun 1945 M dipilih sebagai awal penelitian karena pada tahun tersebut mulai berakhirnya Jepang di Indonesia dan di Aceh khususnya,

kemudian memasuki awal masa revolusi kemerdekaan karena Belanda ingin menguasai kembali Indonesia melalui agresinya. Namun, penjelasan tahun sebelumnya dalam ruang lingkup ini dengan tujuan agar latar belakang untuk penjelasan selanjutnya dapat dijelaskan secara runtun dan berkesinambungan. Adapun tahun 1949 M dipilih sebagai batas akhir penelitian karena pada tahun tersebut berakhirnya revolusi kemerdekaan dengan disepakatinya perjanjian Konferensi Meja Bundar 1949.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan untuk mengarahkan penelitian ini. *Pertama*, menjelaskan sejarah revolusi kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Bireuen. *Kedua*, bagaimana peranan masyarakat Bireuen dalam mempertahankan kemerdekaan pada masa revolusi kemerdekaan Republik Indonesia. Rumusan permasalahan itu diharapkan penelitian Kabupaten Bireuen pada masa revolusi kemerdekaan dapat dijelaskan secara runtun dan mudah difahami.

Tujuan utama penelitian ini untuk menjelaskan Bireuen pada masa revolusi kemerdekaan dengan segala dinamika yang muncul pada waktu itu. Gambaran seperti ini sangat diperlukan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pengalaman masa lampau sebagai cermin untuk berbuat pada masa kini dan akan datang dan selalu bersikap bijak terhadap sesuatu perbuatan yang akan dilakukan.

Dalam kerangka itulah sangat tepat ucapan Sir John Seeley yang mengatakan bahwa "tujuan mempelajari sejarah supaya kita dapat lebih arif sebelum sesuatu peristiwa terjadi". Tidak mempunyai akses yang cukup terhadap fakta dan kebenaran sejarah maka *sense of history* semakin menipis. Dengan demikian, masyarakat akan kehilangan apresiasi terhadap hubungan dengan masa lampau yang

Pendahuluan

sesungguhnya banyak mengandung arti dan menjelaskan berbagai duduk perkara masa kini.

Selain itu, untuk mengembangkan nilai-nilai kebudayaan daerah, khususnya bidang sejarah sebagai unsur penting yang dapat memperkaya dan memberi corak kebudayaan nasional. Penelitian sejarah daerah juga berarti membina loyalitas daerah dalam rangka perjuangan nasional untuk mengadakan dan mempertahankan kehidupan Negara Republik Indonesia.

Penelitian ini secara garis besar dapat memberikan manfaat; secara akademis dapat memberikan tambahan pengetahuan yang berguna dalam rangka pengembangan pengetahuan tentang sejarah, khususnya yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Kedua, manfaat secara praktis, yaitu dapat mempergunakan pengalaman masa lalu yang digambarkan dalam penelitian ini, untuk menentukan langkah dan tindakan yang lebih baik pada masa kini dan akan datang dalam menghadapi setiap permasalahan yang muncul dalam pembangunan bangsa. Manfaat selanjutnya adalah sebagai usaha menggali sumber sejarah lokal di daerah.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman masa lampau. Proses penelitian sejarah tidak terlepas dari definisi sejarah secara umum. Sejarah adalah ilmu yang mempelajari dinamika dan perkembangan kehidupan manusia sebagai makhluk sosial pada masa lampau, mengaitkan dan merekonstruksikannya dalam bentuk tulisan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai karya tulis sejarah. Hasil penulisannya adalah sejarah sebagaimana dikisahkan, yang menerangkan dan memahami peristiwa sebagaimana terjadinya.

Penelitian yang menggunakan metode penelitian sejarah harus menggunakan aturan dan prinsip-prinsip yang ada dalam ilmu sejarah.

Ada beberapa tahap yang harus ditempuh dalam penelitian sejarah, yaitu pengumpulan sumber, verifikasi (kritik sumber dan keabsahan sumber) terdiri atas kritik interen untuk membuktikan kredibilitas (data itu dapat dipercaya atau tidak) dan kritik eksteren (digunakan untuk menguji keaslian sumber yang diperoleh). Tahap selanjutnya adalah interpretasi berupa analisis dan sintesis, kemudian baru dilakukan penulisan.

Sifat penulisan ini adalah diskriptif-narratif atau sejarah prosessual. Sejarah prosessual merupakan penulisan sejarah yang menguraikan bagaimana sesuatu peristiwa terjadi, dan menggambarkan kejadian sebagai proses yang dicakup dalam uraian naratif atau cerita. Perkembangan suatu peristiwa lengkap dengan faktanya tentang apa, siapa, kapan, di mana, serta bagaimana, kemudian diurutkan secara kronologis hubungan antara sebab-akibat dan motivasi sebagai suatu kompleksitas kejadian-kejadian untuk menjawab pertanyaan bagaimana proses kejadian.

Pengumpulan sumber untuk penulisan ini dilakukan melalui sejumlah sumber di perpustakaan dan sumber lisan. Sumber lisan diperoleh melalui wawancara, dipakai untuk menyesuaikan dengan sumber yang sudah diperoleh dan sebagai data pelengkap apabila data tertulis tidak diperoleh.

Untuk memberikan gambaran yang jelas maka hasil penelitian ini disusun dalam beberapa bab. Penyusunan hasil penelitian seperti itu agar dapat menyajikan suatu gambaran yang berlatar belakang historis, yakni menunjukkan kontinuitas perkembangan yang saling berkaitan. Hal itu, seperti dikatakan oleh Sartono Kartodirdjo, bahwa tugas pembahasan sejarah lebih dipusatkan pada masalah kontinuitas dalam pembahasan tersebut. Persoalan-persoalan yang mempunyai

Pendahuluan

akar pada masa lampau akan berkembang terus hingga sekarang dan akan datang.

Hasil penelitian ini terdiri atas lima bab. Bab pertama pendahuluan, yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab kedua, Aceh Sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam bab ini penjelasannya pada zaman Belanda, Jepang, dan Sekitar Proklamasi Kemerdekaan. Bab ketiga, Kenegerian di Kabupaten Bireuen. Bab keempat, Kabupaten Bireuen pada Masa Revolusi Kemerdekaan Republik Indonesia. Bab kelima, Perjuangan Rakyat Bireuen pada Masa Revolusi Kemerdekaan. Bab keenam adalah penutup.

BAB II

ACEH SEBELUM PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA

A. Zaman Belanda

Pendudukan Belanda di Aceh dimulai pada dua dekade terakhir abad ke-19 atau tepatnya pada 26 Maret 1873. Pendudukan Belanda di Aceh awalnya ditandai dengan adanya ultimatum perang terhadap Kerajaan Aceh oleh F.N Nieuwenhuijzen. Ultimatum itu berlangsung di atas geladak kapal *Citadel Van Antwerpen* yang berlabuh di perairan Aceh. Peristiwa kemudian dikenal dengan ekspedisi militer Belanda pertama di Aceh.

Agresi Militer Belanda pertama tidak berhasil menguasai daerah Aceh, bahkan J. H. R. Kohler, pemimpin pasukan agresi Belanda pertama tewas diterjang peluru rakyat Aceh di depan Mesjid Baiturrahman Banda Aceh. Hal itu menyebabkan pasukan Belanda mengalami situasi yang tidak menguntungkan, akhirnya pasukan Belanda ditarik kembali ke Batavia (kini Jakarta). Kegagalan pada agresi pertama, pemerintah Belanda ternyata tidak tinggal diam dan ingin membalas kekalahan pada agresi pertama. Untuk menebus kegagalan tersebut, pemerintah Belanda di Batavia melakukan persiapan besar-besaran, jumlah pasukan dan persenjataan yang lebih besar untuk melakukan penyerbuan kembali ke Aceh. Sebelum penyerbuan, Pemerintah Belanda melakukan pengiriman sejumlah agen rahasia untuk mengumpulkan berbagai informasi tentang Aceh. Pemerintah Belanda juga mengaktifkan kembali J. Van Swieten, seorang pensiunan Jenderal Angkatan Bersenjata Belanda, yang berpengalaman dalam berbagai perang di Nusantara untuk memimpin pasukan agresi

militer kedua ke Aceh.

Pemerintah Belanda mengirimkan seluruh pasukan yang telah disiapkan untuk agresi ke Aceh yang diberangkatkan pada tanggal 12 November 1873. Pasukan ekspedisi Belanda tersebut mulai mendarat pada 9 Desember 1873. Agresi militer itu menurut pemerintah Belanda berhasil dengan baik. Hal itu ditandai dengan jatuhnya benteng pertahanan rakyat Aceh, yaitu Mesjid Baiturrahman ke tangan Belanda pada 6 Januari 1874 dan Istana Kerajaan Aceh yang disebut *Dalam* pada 24 Januari 1874. Meskipun pasukan Aceh telah berusaha menyusun pertahanan yang lebih baik di bawah panglima tertinggi Tuanku Hasyim Banta Muda dibantu oleh pasukan dari berbagai kenegerian di luar Aceh Besar, namun tidak mampu membendung serangan tentara Belanda.

Dalam mempertahankan wilayah Aceh, para ulama bahu-membahu bersama penguasa berusaha keras mengusir Belanda. Sebaliknya, para penguasa militer Belanda juga melakukan pemaksaan terhadap Sultan Aceh untuk mengakui kekuasaan Belanda di Aceh. Usaha itu merupakan tujuan utama pemerintah Belanda, namun tidak tercapai sebagaimana yang mereka harapkan sebab Sultan Aceh, Mahmud Syah, telah terlebih dahulu meninggal dunia di Lueng Bata pada 28 Januari 1874.

J. Van Swieten sebagai panglima balatentara Belanda pada waktu itu walaupun mengetahui ada beberapa calon pengganti Sultan Mahmud Syah, namun ia tidak berusaha untuk mengangkat ataupun mengakui salah satu calon tersebut. J. Van Swieten berkeyakinan bahwa siapapun yang akan menjadi sultan tidak memberikan jaminan bagi takluknya seluruh Aceh kepada kekuasaan Belanda. Keyakinannya itu didasarkan pada kenyataan bahwa Sultan Aceh pada saat itu tidak begitu berpengaruh lagi dalam

menetapkan kebijakan yang dipatuhi sepenuhnya oleh seluruh *uleebalang*.

Pada 31 Januari 1874, J. Van Swieten mengeluarkan maklumat yang menyatakan bahwa kesultanan Aceh menjadi milik pemerintah Hindia Belanda. Hal itu dipertegas dengan surat *Akte Van Aan Stelling*. Selanjutnya J. Van Swieten berusaha supaya kepala wilayah dan penduduk di Aceh Besar mengakui kekuasaan Belanda. Kepala wilayah yang mengakui kekuasaan Belanda diberikan jaminan untuk tetap dipertahankan pada jabatannya.

Agresi militer Belanda di Aceh berlangsung ke seluruh wilayah Aceh, tidak hanya di Aceh Besar, tetapi juga daerah lain, seperti Pidie, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Barat, Aceh Utara, dan Aceh Timur. Di Aceh Utara, daerah-daerah yang sejak perang Belanda di Aceh dianggap sangat mengganggu pihak Belanda antara lain: Lhokseumawe, Samalanga, Peusangan, Geudong, dan Lhoksukon. Selama tahun 1898-1901 M di bawah pimpinan Van Heutsz, berkali-kali pihak Belanda mengirimkan tentaranya untuk melakukan agresi ke Peusangan, Pasai, dan Samalanga. Penyerangan Belanda ke Peusangan, Pasai, dan Samalanga tidak membawa hasil seperti yang diharapkan oleh pihak Belanda, bahkan menurut perkiraan Struyvenberg masih terdapat sekitar 15.000 hingga 16.000 orang pejuang Aceh di daerah itu. Hal itu tidak terlepas dari usaha barisan muslimin di Aceh Utara termasuk Bireuen dalam mempertahankan wilayahnya dengan melakukan berbagai serangan dan gangguan terhadap Belanda, seperti merusak rel kereta api, jembatan, kabel telepon, membakar rumah jaga orang Belanda, dan membunuh *cuak* (mata-mata) atau petunjuk jalan untuk orang Belanda dan penguasa yang memihak kepada Belanda.

Serangan-serangan dengan menggunakan pedang dan berbagai senjata tajam sering terjadi di Aceh Utara, terutama di Samalanga dan Lhokseumawe. Rawa-rawa yang luas dan hutan-hutan bakau sangat menguntungkan barisan muslimin Aceh dalam melakukan perang gerilya. Di daerah Peusangan serangan terhadap Belanda dipelopori oleh ulama dari Dayah Awe Geutah, sementara di daerah Pasai dipelopori oleh Teungku di Mata Ie alias Teungku di Paya Bakong dan Teungku di Barat.

Pada tahun 1906, terjadi dua kali penyerangan yang dilakukan oleh pasukan Teungku di Paya Bakong dan Teungku di Barat terhadap pasukan Belanda di daerah Keureuto dengan menggunakan senjata tajam. Kejadian itu terjadi pada 29 Juli 1906, menewaskan tiga orang pasukan Belanda dan melukai empat orang serta merampas tiga pucuk senapan pasukan Belanda. Pada 24 November 1906, sekitar 30 orang Aceh bersenjatakan parang dan rencong menyerang patroli Belanda. Penyerangan tersebut menyebabkan dua orang pasukan Belanda tewas dan tujuh orang luka-luka, serta dapat merampas satu senapan pasukan Belanda. Di pihak muslimin Aceh 17 orang gugur dalam peristiwa tersebut.

Pada awal September 1906, di bawah pimpinan orang Peusangan, T. Hakim Reuseb, Imum Rayat Akob, dan Pang Baday, menyerang pasukan Belanda di Peudada. Masih pada tahun 1906, *uleebalang* Negeri Nisam, yaitu T. R. Mahmud dibunuh oleh barisan muslimin karena dianggap memihak Belanda. Untuk menggantikannya Belanda mengangkat T. Raja Mat Ali sebagai pejabat *uleebalang*.

Pada awal tahun 1908 di daerah Bireuen, tepatnya antara Peusangan dan Glumpang Dua, sekitar 3000 meter kawat telepon dihancurkan oleh pihak Aceh. Perbuatan yang sama mereka lakukan lagi pada bulan Oktober, November, dan Desember.

Pada tahun 1908 terjadi kekacauan besar di sekitar Lhoksukon. Menurut laporan Kapten W.B.J.A Scheepens dari Lhokseumawe, kekacauan itu menyebabkan beberapa kepala-kepala kampung meninggalkan kampung mereka dan segera mengungsi ke Lhokseumawe atau ke tempat-tempat yang dekat dengan bivak pasukan-pasukan Belanda. Pejuang Aceh di bawah pemimpin Teungku di Paya Bakong dan Teungku di Barat membantu perlawanan masyarakat Lhoksukon. Di antara korban-korban dalam peristiwa kekacauan tersebut menurut laporan pihak Belanda terdapat wanita dan anak-anak. Menghadapi perlawanan yang dilakukan oleh barisan muslimin, pasukan Belanda tidak tinggal diam, Gubernur Sipil dan Militer Belanda, Letnan Kolonel Swart, mengutus dua orang opsir marsose, yaitu Kapten Christoffel dan Kapten Scheepens, karena kedua orang ini banyak memahami seluk-beluk rakyat Aceh. Dalam serangan balasan yang dilakukan oleh pasukan Belanda, 137 orang barisan muslimin gugur dan 22 orang ditawan.

Perang Belanda di Aceh berpengaruh pada perekonomian di Aceh. Blokade pantai yang dilakukan oleh Belanda sejak penyerangan pertama menyebabkan kesulitan perekonomian di Aceh. Barang-barang ekspor Aceh yang sebelumnya diangkut ke Penang mengalami hambatan, begitu pula sebaliknya barang impor dari pulau Penang mengalami kemacetan. Oleh karena itu, sejak van Heutsz diangkat menjadi gubernur sipil dan militer di Aceh pada tahun 1898, perbaikan ekonomi

rakyat menjadi hal yang sangat diperhatikan dalam paket kebijakan untuk menaklukkan Aceh. Agresi-agresi militer Belanda yang dilakukan secara besar-besaran ke Pidie, Aceh Utara, dan Aceh Timur karena masih menentang kekuasaan Belanda, segera diikuti oleh kebijakan perbaikan di bidang ekonomi.

Pada bidang pemerintahan, Belanda membagi wilayah Aceh menjadi empat *Afdeling*, setiap *Afdeling* dipimpin oleh seorang Asisten Residen (dijabat oleh orang Belanda). Keempat *Afdeling* itu adalah *Afdeling* Aceh Besar berkedudukan di Kutaraja (Banda Aceh), *Afdeling* Aceh Utara berkedudukan di Sigli, *Afdeling* Aceh Timur berkedudukan di Langsa, dan *Afdeling* Aceh Barat berkedudukan di Meulaboh. *Onderafdeling* Bireuen termasuk bagian dari *Afdeling* Aceh Utara, yang terdiri atas *landschap* (kenegerian) Samalanga, *Landschap* Geulumpang Dua, dan *Landschap* Peusangan.

Asisten Residen membawahkan beberapa *onderafdeling*, setiap *onderafdeling* dipimpin oleh *controleur* yang dijabat oleh orang Belanda. *Controleur* ditugasi untuk mengawasi pemerintahan adat yang disebut *Zelfbesturende Landschappen*. *Controleur* didampingi oleh seorang kapten atau letnan Cina yang diberi peran dalam bidang ekonomi.

Lamanya perang Belanda di Aceh menyebabkan kerugian besar pada kedua belah pihak. Hal itu seperti diakui oleh pihak Belanda bahwa mereka mengalami kerugian militer dan mengakibatkan empat Jenderal Panglima Perang Tentara Belanda tewas di Aceh. Sejak serangan pertama Belanda ke Aceh yang dipimpin Jenderal Mayor Kohler, yang ia sendiri tewas di Aceh, selain itu, ada Jenderal Panglima Perang Tentara Belanda yang dicopot dan ditarik kembali dari Aceh karena dianggap gagal

melaksanakan tugasnya. Ratusan perwira dan ribuan serdadu Belanda tewas di Aceh. Sebagian bukti kepahlawanan rakyat Aceh menentang penjajahan Belanda dapat dilihat di pemakaman pasukan Belanda di Banda Aceh, yang dikenal dengan kerkhoff, lebih dari 2.200 serdadu Belanda dimakamkan di tempat ini.

B. Zaman Pendudukan Jepang

Zaman pendudukan Jepang dimulai pada tahun 1942, tepatnya pada tanggal 12 Maret 1942, ketika Jepang mulai mendarat di Aceh melalui Sabang (Pulau Weh), Krueng Raya (Aceh Besar), dan Peureulak (Aceh Timur). Pendaratan pasukan Jepang di Aceh berlangsung dengan lancar, tanpa mendapat perlawanan, baik dari pasukan Belanda maupun dari rakyat Aceh.

Jepang mendarat di Aceh melalui Malaya (sekarang Malaysia) dengan menyebut dirinya sebagai "saudara tua". Jepang berhasil meyakinkan tokoh masyarakat Aceh di Malaya, sehingga tanpa curiga kehadiran tentara Jepang diterima dengan tangan terbuka oleh rakyat Aceh. Karena diharapkan dengan kehadiran Jepang dapat membebaskan rakyat Aceh dari penguasaan Belanda serta penderitaan dan menghormati agama Islam. Jauh sebelum mendarat di Aceh, Jepang telah menciptakan suasana politik yang dapat memperlancar jalan masuk ke Aceh, yaitu dengan mengadakan kontak langsung dengan pemimpin rakyat Aceh, terutama dari golongan Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA).

Petinggi-petinggi PUSA, seperti Said Abubakar dan Syekh Ibrahim diutus secara khusus ke Malaya untuk menjajaki kemungkinan masuknya Jepang ke Aceh dengan tujuan mengusir

Belanda dari Aceh. Perjuangan dalam bentuk politik lainnya berupa tuntutan yang disampaikan oleh Teuku Nyak Arief pada suatu pertemuan antara Residen Aceh waktu itu, J. Pauw (residen Belanda terakhir), dengan panglima sagi dan *uleebalang* di Kutaraja (kiri Banda Aceh).

Selain itu, adanya pernyataan Jenderal Fujiwara, kepala intelijen Jepang, antara lain mengatakan bahwa Jepang sebagai "saudara tua" ingin menjalin hubungan dengan pemimpin PUSA untuk bersama-sama menghadapi Belanda dan kaki tangannya. Apalagi rakyat Aceh dikenal sangat memusuhi penjajah Belanda, sehingga tidak gentar demi membela agama dan bangsa. Sementara itu, kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh tentara Jepang dalam menghadapi Sekutu pada Perang Asia Timur Raya, juga memberikan semangat dan harapan bagi rakyat Aceh untuk dapat membebaskan diri dari penjajahan Belanda.

Sejak tentara Jepang mendarat di Aceh, bersama-bersama dengan rakyat Aceh terutama anggota Barisan F (Fujiwara-kikan) terus melakukan serangan terhadap tentara Belanda. Pasukan ini beranggotakan hampir semua golongan masyarakat, bukan hanya berasal dari anggota PUSA. Berbagai serangan terus dilancarkan oleh tentara Jepang dari berbagai arah untuk memblokade kedudukan Belanda hingga berakhir kekuasaan Belanda di daerah Aceh.

Setelah berhasil masuk ke Aceh, Jepang mulai melakukan penyusunan pemerintahan sipil dan penataan lembaga pemerintahan di Aceh. Itu merupakan langkah awal yang dilakukan pemerintah Jepang dalam rangka menjalankan kekuasaannya di Aceh. Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah Jepang di Aceh tidak terjadi perubahan yang berarti. Perubahan yang dilakukan hanya terbatas pada pergantian nama-nama lembaga pemerintahan untuk

disesuaikan dengan istilah bahasa Jepang. Jepang juga masih mempertahankan status Aceh dalam bentuk keresidenan dalam istilah Jepang disebut *Aeh shu chokan*. Mayor Jenderal Shazaburo Iino diangkat menjadi kepala pemerintahan militer Jepang atau Residen di Aceh dan Teuku Nyak Arief diangkat menjadi wedana Kutaraja yang disebut dengan istilah *guncho*. Teuku Nyak Arief selanjutnya diangkat sebagai penasihat *shu chokan* dan sebagai ketua semacam DPRD yang disebut *Aeh Shu Sangi-kai*, kemudian diangkat sebagai wakil ketua *Sumatra chuo sangi in* atau semacam DPRD untuk kawasan Sumatera yang berkedudukan di Bukit Tinggi. Untuk *guncho* di Kutaraja, diangkat Teuku Hasan Dik menggantikan Teuku Nyak Arief. Teuku Tjut Hasan diangkat menjadi *guncho* di Sigli yang dipindahkan dari Bireuen dan Teuku Muhammad Jeunieb diangkat menjadi *guncho* di Meulaboh.

Struktur pemerintahan pada zaman Belanda dalam bentuk *afdeling*, *onderafdeling*, *zelfbestuurde*, dan *gampong* masih diteruskan pada masa pendudukan Jepang. Jepang hanya mengganti dengan istilah dalam bahasa Jepang, yaitu *bunshu* untuk *afdeling*, *gun* untuk *onderafdeling*, *son* untuk *uleebalangschap*, *ku* untuk kemukiman, dan *kumi* untuk *gampong* (kampung). Sebutan untuk kepala wilayah administrasi juga disesuaikan dengan bahasa Jepang, yaitu *bunshucho* untuk kepala *bunshu*, *guncho* untuk kepala *gun*, *soncho* untuk kepala *son*, *kuncho* untuk kepala *ku*, dan *kumicho* bagi kepala *kumi*. Demikian juga halnya dalam penempatan pejabat pemerintahan masih dipilih dari golongan bangsawan atau *uleebalang*.

Dengan dalih masih dalam keadaan perang, pemerintah pendudukan Jepang melakukan berbagai tekanan terhadap partai-partai politik dan organisasi massa yang ada di Aceh. Organisasi-organisasi itu, seperti Taman Siswa dibubarkan oleh *gunseibu*, demikian juga Parindra, dan beberapa organisasi lain.

Jepang melakukan propaganda di bidang politik melalui surat kabar atau majalah sebagai media komunikasi propaganda. Untuk itu, Jepang menerbitkan sebuah surat kabar *Atjeh Sinbun* pada bulan Juni 1942 untuk menggantikan surat kabar yang sudah ada sebelumnya di Aceh. Surat kabar itu terbit dua kali seminggu, yaitu Rabu dan Sabtu.

Perang Asia Timur Raya yang sedang berlangsung mendorong pemerintah Jepang memobilisasi rakyat untuk keperluan perang. Pada tahun 1943 dibentuk Badan Kebaktian Penduduk Aceh untuk Membina Asia (*syu min koa hookokai*) dan Badan Perlindungan Tanah Air (*gyugun*). Lembaga itu diharapkan dapat memberikan dukungan dana dan tenaga bagi keperluan perang Asia Timur Raya. Selain itu, kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam perang Asia Timur Raya membawa pengaruh bagi pemerintah pendudukan Jepang untuk pengadaan tenaga militer di Aceh. Untuk itu, dibentuk beberapa satuan militer yang terdiri atas polisi khusus (*tokubetsu keisatsutai*), serdadu pembantu (*heiho*), dan tentara sukarela (*gyugun*). Anggota kesatuan tersebut direkrut dari generasi muda Aceh.

Pemerintah pendudukan Jepang menganggap pendidikan sebagai sarana untuk proses sosialisasi ideologi Jepang. Oleh karena itu, Jepang sangat memperhatikan pendidikan yang dilaksanakan oleh sekolah-sekolah pemerintah (yang sebelumnya dikelola oleh Belanda) maupun sekolah-sekolah yang dikelola oleh organisasi masyarakat. Dalam bidang pendidikan, Jepang mengelompokkan sekolah umum yang ada di Aceh ke dalam dua kelompok, yaitu *kokomingko* atau sekolah negara sebagai ganti *volkschool* atau *vervolgschool* dan sekolah menengah yang terdiri atas *stu*

takko atau sekolah lanjutan lima tahun serta *sihang gakko* atau sekolah guru.

Materi pendidikan yang diberikan pada sekolah tersebut disesuaikan dengan kepentingan Jepang. Jepang menghapus bahasa Belanda dan bahasa Inggris yang sudah diajarkan sebelumnya dan menggantikannya dengan bahasa Melayu dan bahasa Jepang. Demikian juga dengan tulisan dan lagu-lagu Jepang diajarkan di sekolah-sekolah. Setiap pagi murid diharuskan melakukan upacara menghormati matahari terbit (*sakeire*).

Kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pendudukan Jepang di Aceh menyebabkan kesengsaraan bagi rakyat Aceh. Tekanan-tekanan ekonomi yang diderita rakyat, pengerahan tenaga rakyat bagi keperluan militer Jepang, usaha Jepang terhadap kehidupan sosial-budaya menimbulkan perasaan frustrasi di kalangan rakyat Aceh. Harapan rakyat Aceh dari Jepang sebagai pembela rakyat Aceh dan pelindung agama Islam menjadi sirna. Serdadu Jepang hanya memakai celana sangat minim berjalan di depan umum, makan daging babi di tempat umum, dan setiap pagi dilaksanakan upacara *sakeire*, yaitu menundukkan kepala ke arah matahari terbit. Hal itu sangat bertentangan dengan adat-istiadat orang Aceh dan ajaran Islam.

Pada mulanya Jepang memperbolehkan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mengibarkan bendera merah putih, namun tidak lama setelah masuk Jepang ke Aceh kedua hal tersebut dilarang. Demikian pula dengan pendidikan Taman Siswa dan sekolah Normal Islam di Bireuen ditutup oleh Jepang. Sejak itu kekejaman Jepang mulai dirasakan oleh rakyat Aceh, akibatnya rakyat Aceh mulai memusuhi Jepang. Di antara permusuhan rakyat Aceh terhadap Jepang, pada 10-11 November 1942 terjadi pemberontakan rakyat terhadap Jepang yang dipimpin oleh Teungku Abdul Jalil di Bayu, Aceh Utara. Pemberontakan tersebut

mengakibatkan lebih 100 orang korban di pihak rakyat Aceh. Selain pemberontakan Bayu, sikap frustrasi rakyat juga tampak dengan adanya perlawanan Pandrah Jeunieb dan perlawanan pasukan *gyugun* di bawah pimpinan Teuku Hamid.

Jepang membangun berbagai prasarana secara tradisional dengan mengerahkan tenaga rakyat. Kemelaratan rakyat semakin bertambah dengan adanya kerja paksa dalam keadaan kurang makan. Jepang membuka jalan raya sepanjang 150 km di tengah rimba Gayo antara Rikib Ghaib dan Ise-Ise yang harus diselesaikan dalam waktu enam bulan. Pembuatan jalan dimulai sejak 1 Januari – Juni 1944, mengakibatkan korban jiwa yang banyak di kalangan masyarakat Aceh.

Selain itu, pembuatan jalan dari Rundeng-Sidikalang, pembuatan lapangan udara, membuat parit-parit pertahanan, memerlukan tenaga kerja yang banyak. Untuk mengerjakan kegiatan itu masyarakat dipaksa untuk bekerja. Demikian juga dengan proyek pembuatan jalan antara Kutacane dengan Blang Kejeren sepanjang 70 km. Untuk menyelesaikan jalan tersebut pekerjanya tidak hanya berasal dari rakyat Aceh, tetapi juga didatangkan dari Sumatra Utara dan pulau Jawa. Proyek pembuatan jalan tersebut berakibat buruk terhadap pekerja karena menderita kelaparan, busung lapar, dan penyakit malaria. Orang yang bertugas mengerahkan tenaga kerja paksa itu adalah para camat atau *sundio*.

Untuk menghimpun kekuatan rakyat guna membantu Jepang dalam perang Asia Timur Raya dibentuk lembaga yang diberi nama *syu min koa hookokai* (Badan Kebaktian Penduduk untuk Membina Asia dan Perlindungan Tanah Air). Badan itu dipimpin oleh tokoh ulama dan *uleebalang* di bawah binaan *shu cakan*.

Sifat keberanian rakyat Aceh, kegigihan, fanatik, emosional, dan

setia ternyata dimanfaatkan oleh Jepang untuk menjadi militer atau semi militer. Pada Februari 1943 Jepang mulai merekrut pemuda untuk dijadikan *tokubetsu keisatsu-tai*, yaitu semacam polisi brigade mobil sekarang. Menjelang Jepang menyerah, pasukan itu berjumlah sekitar 700 orang dengan persenjataan lengkap dan tersebar di sepanjang pantai Aceh. Di antara pasukan itu terdapat sejumlah perwira yang dikomandoi oleh seorang petualang Jepang bernama Korewa.

Untuk penyediaan tenaga fisik yang dapat dibawa kemana saja, Jepang membentuk dua buah badan, yaitu *Heiho* dan *Romusha*. *Heiho* adalah badan yang diperbantukan pada tentara Jepang setelah dilatih dengan latihan militer, sedangkan *romusha* adalah badan untuk mengumpulkan dan mengerahkan tenaga kerja secara paksa. *Romusha* mengharuskan setiap rakyat Aceh bekerja untuk kepentingan Jepang selama tujuh hari atau lebih dalam sebulan.

C. Sekitar Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Aceh

Sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, daerah Aceh masih berada di bawah pendudukan Jepang. Telah disebutkan sebelumnya bahwa pada awalnya kedatangan Jepang di Aceh disambut positif dan mendapat dukungan sepenuhnya dari masyarakat Aceh. Hal itu disebabkan Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan pada bangsa Indonesia yang disampaikan melalui barisan Fujiwara Kikan dan juga sebagai hasil pertemuan dengan delegasi PUSA yang diutus ke pulau Pinang, Malaya.

Harapan rakyat Aceh bahwa Jepang dapat menolong rakyat Aceh menjadi sirna ketika Jepang sudah berada di Aceh. Penderitaan yang dialami oleh rakyat Aceh lebih berat dibandingkan dengan penderitaan

rakyat pada zaman pemerintah kolonial Belanda. Pada zaman pendudukan Jepang, rakyat Aceh sangat menderita terutama dalam bidang ekonomi. Perampasan harta rakyat kerap dilakukan oleh Jepang untuk kepentingan tentara Jepang. Begitu pula tenaga rakyat dikuras untuk membuat kubu-kubu atau benteng-benteng pertahanan, lapangan terbang, dan berbagai pekerjaan lainnya untuk kepentingan perang Asia Timur Raya. Keadaan demikian akhirnya menimbulkan kebencian masyarakat Aceh semakin hari semakin bertambah yang ditandai dengan adanya perlawanan - perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Aceh terhadap pendudukan Jepang.

Kesengsaraan rakyat mulai berubah setelah Jepang mengalami kekalahan, terutama setelah pasukan Sekutu dapat menguasai beberapa daerah kekuasaan Jepang melalui perang pasifik. Kekalahan-kekalahan Jepang di pasifik sengaja ditutup-tutupi dengan cara terus-menerus menyiarkan propaganda yang menyatakan bahwa kedudukan Jepang masih kuat dan pasti akan dapat memenangkan peperangan demi kemakmuran rakyat Asia Timur Raya. Akibat dari perubahan tersebut, Jepang mulai mengadakan perubahan dengan berusaha mendekati masyarakat Aceh dengan berbagai upaya untuk mendapatkan simpati karena telah lama memusuhi Jepang.

Menjelang diumumkannya kapitulasi dan menjelang jatuhnya beberapa front pertahanan Jepang kepada Sekutu di Pasifik, keadaan di daerah Aceh semakin genting. Dalam kondisi yang demikian, pemerintah Jepang mengambil beberapa kebijakan untuk pengamanan terhadap rakyat umum berupa penyitaan pesawat radio yang dimiliki oleh rakyat dan mengawasi dengan ketat kantor berita *Domei* yang selama ini memonitor berita tentang kemenangan Jepang atau pesan-pesan pemerintah kepada daerah-daerah pendudukan. Kebijakan yang sama

juga diterapkan kepada surat kabar *Atjeh Sinbun* sebagai satu-satunya surat kabar di Aceh dengan melakukan pengawasan secara ketat agar berita-berita mengenai kekalahan Jepang di front Pasifik tidak dimuat sebagai berita. Jepang berusaha menutupi kekalahannya, tetapi berita tersebut dapat juga diketahui oleh perwira-perwira *gyugun* yang bekerja pada dinas Intelijen Jepang.

Sebagaimana Jepang menutupi berita tentang kekalahannya, berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 pun ditutupi oleh Jepang supaya tidak diketahui masyarakat Aceh. Akan tetapi, berita proklamasi diketahui juga oleh beberapa orang yang bekerja pada kantor berita Jepang, *domei*, pada 21 Agustus 1945. Pemuda yang bekerja pada kantor berita *domei* tersebut segera memberi tahu tentang berita tersebut kepada Teuku Nyak Arief. Pada 21 Agustus 1945, seorang pemuda Aceh menempelkan berita tersebut pada dinding gedung bioskop di Kutaraja (sekarang Banda Aceh), akan tetapi banyak orang yang belum mempercayainya apalagi tentara Jepang masih bertugas seperti biasa di Kutaraja. Pada akhirnya, tersebar juga secara luas berita proklamasi kepada rakyat yang disebarkan dalam berbagai bentuk. Pada 21 Agustus 1945 diadakan rapat yang dipimpin oleh A. Hasjmy. Dalam rapat tersebut dijelaskan bahwa pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta telah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berita tersebut dijelaskan pula oleh Ghazali Yunus sebagai sumber berita.

Pada 24 Agustus 1945, Teuku Nyak Arief memasang bendera merah putih di mobilnya dan berkeliling kota untuk memperlihatkan pada masyarakat bahwasanya Indonesia sudah merdeka. Hal demikian dilakukan pula oleh tiga orang pegawai kantor kepolisian Aceh di Kutaraja yang mengibarkan bendera merah putih di kantor tersebut. Mereka berhasil mengibarkannya dengan maksud

masyarakat mengetahui bahwa Indonesia sudah merdeka.

Setelah pemuka masyarakat Aceh dan pemuda mengetahui berita proklamasi Indonesia. Mereka mulai menyusun kekuatan untuk mengisi dan mempertahankan kemerdekaan melalui pembentukan organisasi yang teratur dan kuat. Di antara upaya yang dilakukan adalah membentuk Ikatan Pemuda Indonesia (IPI) yang bertempat di Kantor surat kabar *Atjeh Sinbun*. Pada 25 Agustus 1945 para pemuda yang tergabung dalam IPI merebut kantor *Atjeh Sinbun* dan mengibarkan bendera merah putih di depan kantor tersebut. Pengibaran itu diprotes oleh S. Iino, namun pemuda IPI tidak menghiraukannya, sehingga sejak saat itu bendera merah putih berkibar di depan kantor *Atjeh Sinbun*. Penarikan bendera merah putih juga terjadi di seluruh Aceh, yaitu di Bireuen, Lhokseumawe, Langsa, Meulaboh, Tapak Tuan, dan lain-lain. Usaha lain juga dilakukan seperti mengambil alih semua kantor pemerintah dari tangan pejabat pemerintahan Jepang. Pada 15 Oktober 1945, bendera Jepang diturunkan di depan kantor *keimubu* (polisi) dan menaikkan bendera merah putih sekaligus mengambil alih kantor tersebut.

BAB III

KENEGERIAN DI KABUPATEN BIREUEN

A. Jeumpa

Kerajaan-kerajaan di Aceh tempo dulu mengalami pasang surut. Apalagi setelah kehadiran Portugis ke Malaka pada tahun 1511 M yang disusul dengan kedatangan Belanda. Pada zaman penjajahan Belanda, berdasarkan "Surat Keputusan Van der Goevernement General Van Nederland Indie" 7 September 1934, Aceh dibagi menjadi enam *Afdeling* (kabupaten) yang dipimpin oleh seorang Asisten Residen. Satu di antaranya adalah *Afdeling Noord Kust van Atjeh* (Aceh Utara) yang dibagi dalam tiga *Onderafdeling* (kewedanan). Kewedanan dikepalai oleh seorang *Countroleur* (wedana), yaitu *Onderafdeeling* Bireuen (kini Kabupaten Bireuen), *Onderafdeling* Lhokseumawe (Kini Kota Lhokseumawe), dan *Onderafdeling* Lhoksukon (kini ibu kota Kabupaten Aceh Utara).

Selain *Onderafdeling* tersebut, terdapat beberapa daerah *Uleebalang* (*Zelfbestuur*) yang dapat memerintah sendiri terhadap daerah dan rakyatnya, yaitu *Uleebalang* Keureutoe, Geureugok, Jeumpa, dan Peusangan, yang dikepalai oleh *Ampon Chik*.

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Aceh Utara disebut Luhak, yang dikepalai oleh Kepala Luhak sampai tahun 1949. Setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia melalui Konferensi Meja Bundar pada 27 Desember 1949, dibentuklah Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan beberapa negara bagian. Melalui Undang-Undang Darurat nomor 7 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom setingkat kabupaten maka

Kenegarian di Kabupaten Bireuen

dibentuk Daerah Tingkat II Aceh Utara.

Keberadaan Aceh di bawah Provinsi Sumatera Utara menimbulkan rasa tidak puas masyarakat Aceh. Para tokoh Aceh menuntut agar Aceh berdiri sendiri sebagai sebuah provinsi. Hal ini juga yang kemudian satu di antara pemicu terjadinya pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) pada tahun 1953 di daerah Aceh.

Pemberontakan itu baru berhenti setelah keluarnya Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1957 tentang pembentukan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Aceh Utara satu di antara daerah tingkat dua dan Bireuen masuk dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara.

Bireuen menjadi kabupaten setelah lepas dari Aceh Utara selaku Kabupaten induk melalui Undang Undang Nomor 48/1999. Kabupaten Bireuen dalam catatan sejarah dikenal sebagai daerah Jeumpa. Dahulu Jeumpa merupakan sebuah kerajaan kecil di Aceh. Menurut Ibrahim Abduh dalam Ikhtisar Radja Jeumpa, Kerajaan Jeumpa terletak di di Desa Blang Seupeung, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireun.

Di atas bukit kecil Dusun Teungku Keujreuen di desa itu menurut Ibrahim, makam Raja Jeumpa ditemukan. Secara geografis, kerajaan Jeumpa terletak di daerah perbukitan mulai dari pinggir sungai Peudada di sebelah barat sampai Pante Krueng Peusangan di sebelah timur.

Pada zaman dahulu desa Paloh Seulimeng, Abeuk Usong, Bintanghu, Blang Seupeung, Blang Gandai, Cot Iboeh, Cot Meugo, Blang Seunoeng, Blang Rheum, Cot Leusong, Glumpang Payong, Lipah Rayeuk, Batee Timoh, dan Lhaksana, berada di

tepi pantai.

Persawahan yang ada sekarang merupakan daerah genangan air laut dan rawa-rawa. Desa Blang Seupeueng termasuk daerah padat penduduk dan memiliki bandar pelabuhan yang terletak di Kuala Jeumpa. Dari Kuala Jeumpa sampai Blang Seupeueng terdapat sebuah alur besar yang dapat dilalui oleh kapal-kapal dan perahu-perahu. Alur dari Kuala Jeumpa tersebut membelah Desa Cot Bada hingga ke Cot Cut Abeuk Usong. Istana Raja Jeumpa terletak di desa Blang Seupeueng di sebelah utara, sekarang disebut dengan Cot Cibrek Pintoe Ubeuet.

Pada awal tahun 1989 dua orang Cina, laki-laki dan perempuan, mengunjungi makam Raja Jeumpa. Mereka datang ke lokasi kerajaan Jeumpa untuk mencari tongkat nenek moyangnya pada zaman dahulu. Diceritakan bahwa tongkat emas Raja Cina tersebut jatuh dan hilang saat menyerbu kerajaan Jeumpa, yang kemudian ditemukan oleh Raja Jeumpa. Kerajaan Jeumpa pernah diserang oleh pasukan Cina, Thailand, dan Kamboja. Mereka pernah menguasai benteng Blang Seupeung. Peperangan tersebut terjadi karena Raja Cina menculik permaisuri Raja Jeumpa yang cantik bernama Meureudom Ratna.

Permaisuri Raja Jeumpa itu dibawa sampai ke Pahang (Malaysia). Namun, Meureudoem Ratna berhasil kembali lagi ke Blang Seupeueng, setelah Panglima Prang Raja Kera yang berasal dari Ulee Kareung dan Samalanga, berhasil mengalahkan Raja Cina. Berdasarkan cerita masyarakat, meyakini pusara Raja Jeumpa terdapat di atas bukit kecil setinggi 40 meter dan ditumbuhi oleh pohon-pohon besar. Makam raja itu hanya ditandai dengan batu berlokasi di Dusun Teungku Keujruen

Kenegarian di Kabupaten Bireuen

Desa Blang Seupeueng. Makam raja Jeumpa dan Maureudom Ratna terletak di Desa Kuala Jeumpa.

Raja Jeumpa adalah putra Abdullah dan Ratna Kumala. Abdullah memasuki kawasan Blang Seupeueng dengan kapal yang datang dari India Belakang untuk berdagang. Ia memasuki negeri Blang Seupeueng dari laut kemudian masuk melalui Kuala Jeumpa.

Abdullah diterima oleh penduduk setempat dan disediakan tempat tinggal. Kesempatan itu digunakan oleh Abdullah untuk menjalankan misinya sebagai pendakwah Islam. Rakyat di negeri tersebut dengan mudah menerima agama Islam karena tingkah laku, sifat dan karakternya yang sopan dan ramah. Abdullah akhirnya dinobatkan menjadi raja dan Ratna Keumala sebagai permaisuri di negeri Blang Seupeueng. Raja Abdullah menamakan negeri yang dipimpinnya itu dengan nama Jeumpa sesuai dengan nama negeri asalnya, yaitu Kampia yang artinya harum.

Raja Abdullah mengatur strategi keamanan kerajaan dengan mengadakan latihan perang bagi angkatan darat dan laut. Pada saat itu angkatan laut merupakan angkatan perang yang sangat diandalkan dan dipimpin oleh Laksamana Muda.

Setelah lama memerintah di kerajaan Jeumpa, raja Abdullah meninggal dunia. Ia meninggalkan dua orang anak, yaitu Siti Geulima dan Raja Jeumpa dan seorang istri. Setelah Raja Jeumpa dewasa, membangun benteng pertahanan di tepi pantai, yaitu di Laksamana (sekarang Desa Lhakmana). Raja Jeumpa menikahi seorang putri Raja Muda. Kakak Raja Jeumpa, Siti Geulima dipinang oleh seorang Raja di Darul Aman yang bernama Raja Bujang. Atas dasar perkawinan itu antara Kerajaan

Jeumpa dan Darul Aman (sekarang Peusangan Selatan) terjalin hubungan baik sesuai dengan namanya, Darul Aman, yakni negeri yang aman dan sentosa.

B. Samalanga

Tun Sri Lanang adalah raja pertama kerajaan Samalanga. Nama aslinya adalah Tun Muhammad, diangkat menjadi raja Samalanga pada tahun 1615 M. Kebesaran Kesultanan Islam Malaka mengalami kemunduran setelah Portugis menaklukkan Malaka pada tahun 1511 M. Sebagian pejabat kerajaan menyelamatkan diri ke kerajaan lain yang belum dikuasai oleh Portugis, seperti Pahang, Johor, Pidie, Aru (Pulau Kampai), Perlak, Daya, Pattani, Pasai, dan Aceh.

Sultan Aceh, Ali Mughayat Syah, menjadi gusar dan berniat untuk membebaskan negeri Islam di Sumatera dan Semenanjung Tanah Melayu dari pengaruh Portugis. Keinginan Sultan didukung penuh oleh pembesar negeri Aceh dan para pencari suaka dari Malaka yang menetap di Bandar Aceh. Sultan memproklamkan Kesultanan Bandar Aceh Darussalam pada tahun 1512 M. Menurut Raden Hoesein Djajadiningrat, Sultan Ali Mughayat Syah memerintah Kesultanan Bandar Aceh Darussalam 1514-1528 M. Visi utamanya menyatukan kerajaan-kerajaan yang ada di Aceh pada waktu itu, seperti Pedir, Daya, Pasai, Tamiang, Perlak, dan Lingga menjadi sebuah kekuatan besar, di antaranya untuk mengimbangi kekuatan Portugis di Malaka.

Sultan Ali Mughayatsyah membangun negeri yang baru diproklamkan itu melalui penguatan di bidang politik luar

Kenegerian di Kabupaten Bireuen

negeri, militer, ekonomi, dan pengaturan hukum/ketatanegaraan. Dengan strategi ini, Kerajaan Aceh Darussalam menjadi negara yang diperhitungkan dalam percaturan politik global dan mampu menggoyahkan kedudukan Portugis di Malaka dan Nusantara.

Kerajaan Aceh Darussalam yang telah digagas oleh Sultan Ali Mughayatsyah dilanjutkan oleh sultan-sultan selanjutnya. Perseteruan kerajaan Aceh dengan Portugis terus berlangsung sampai tahun 1641 M, sehingga banyak menjadi korban di kedua belah pihak dan penduduk Aceh menurun drastis. Sultan Iskandar Muda mengambil kebijakan baru dengan menggalakkan penduduk di daerah takluknya untuk bermigrasi ke Aceh, misalnya dari Sumatera Barat, Kedah, Pahang, Johor, Malaka, Perak, dan Deli.

Sultan Iskandar Muda menyerang Batu Sawar, Johor, pada tahun 1613 M. Seluruh penduduk Johor, termasuk Sultan Alauddin Riayatshah III, adiknya Raja Abdullah, Raja Raden, dan pembesar-pembesar negeri Johor-Pahang, seperti Raja Husein (Iskandar Thani), Putri Kamaliah (Putroe Phang), dan Bendaharanya (Perdana Mentri), Tun Muhammad dipindahkan ke Aceh. Sultan Iskandar Muda kemudian menjadikan Tun Sri Lanang sebagai raja pertama kenegerian Samalanga atas saran putri Kamaliah.

Penobatan Tun Sri Lanang menjadi Raja Samalanga mendapat dukungan rakyat, karena di samping ahli di bidang pemerintahan juga alim dan taat beragama. Sultan Iskandar Muda berharap dengan penunjukan tersebut akan membantu pengembangan Islam di pesisir timur Aceh. Namun, penunjukkan Tun Sri Lanang sebagai raja tidak serta merta

berjalan mulus. Hal itu disebabkan adanya protes dari beberapa tokoh masyarakat yang dipimpin oleh Hakim Peut Misei. Ia menginginkan kelompoknya yang berhak menjadi raja pertama Samalanga.

Setelah membuka negeri Samalanga, Hakim Peut Misei dan sebelas orang pemuka negeri lainnya bersama rakyat setempat bermusyawarah untuk menentukan siapa di antara mereka yang berhak menjadi raja pertama Samalanga. Panitia persiapan pengukuhan *keuleebalangan* Samalanga dan daerah takluknya terjadi perbedaan pendapat. Masyarakat menyarankan agar panitia tersebut menghadap Sultan Iskandar Muda. Mereka menyerahkan keputusan tersebut kepada sultan untuk menentukan pilihan siapa yang terbaik untuk memimpin negeri Samalanga.

Rencana pemilihan pemimpin Samalanga tersebut diketahui oleh Putri Pahang. Dia mengetahui rencana pertemuan dua belas tokoh masyarakat yang akan menghadap sultan. Putri Pahang menginginkan *keuleebalangan* Samalanga dan daerah takluknya dijabat oleh Datok Bendahara yang bergelar Tun Sri Lanang, tidak lain adalah saudaranya sendiri. Siasat pun diatur, Tun Sri Lanang diperintahkan berlayar ke Samalanga, di sana dia harus berpura-pura sebagai seorang nelayan yang kumuh tetapi ahli melihat bintang. Berdasarkan rencana Putri Pahang, Tun Sri Lanang harus sampai duluan di Samalanga dan kedua belas tokoh masyarakat tersebut diusahakan menggunakan jasa Tun Sri Lanang untuk berlayar ke Kuala Aceh menghadap sultan.

Pada hari yang telah disepakati bersama, berangkatlah dua belas orang panitia pemilihan pemimpin Samalanga menghadap sultan dengan didampingi seorang pawang dari

kuala Samalanga menuju kuala Aceh. Kedua belas orang itu kemudian bertemu dengan sultan Aceh dan mengutarakan maksud dan tujuannya. Mereka lalu meminta kepada sultan Aceh agar satu di antara mereka dinobatkan menjadi *uleebalang* pertama Samalanga. Setelah meminta pendapat pembesar kerajaan dan Putri Pahang, sultan setuju menobatkan satu di antara mereka menjadi raja Samalanga. Namun demikian, dengan syarat apabila cincin kerajaan yang telah disiapkan oleh Putri Pahang cocok di jari kelingking mereka. Mereka lalu mencoba satu per satu di jari mereka, tetapi cincin kerajaan tersebut terlalu besar untuk dipakai pada jari kedua belas orang tersebut. Putri Pahang menanyakan kepada mereka apa masih ada orang yang belum dibawa ke Balairung Istana? Mereka menjawab masih ada tukang perahu. Tun Sri Lanang pun kemudian dihadapkan ke hadapan sultan dan mencoba cincin kerajaan itu, ternyata sangat cocok untuk jari kelingkingnya. Oleh Karena itu, Sultan Iskandar Muda menobatkan Tun Sri Lanang menjadi raja pertama Samalanga.

Ketika pulang kembali ke Samalanga, mereka membuang Tun Sri Lanang ke laut di kawasan Laweung. Peristiwa tersebut dikenal dalam masyarakat Samalanga sebagai Peristiwa Laut. Tun Sri Lanang berhasil diselamatkan oleh Maharaja Lela Keujroeuen Tjoereh (Laweung). Setelah menyelamatkan Tun Sri Lanang, Maharaja Lela Keujroeuen Tjoereh bersama T. Nek Meuraksa Panglima Nyak Doom menghadap Sultan Aceh. Mereka memberitahukan telah menemukan Tun Sri Lanang di tengah laut. Mendengar berita tersebut, Sultan Aceh sangat marah dan memerintahkan Maharaja Goerah, T. Nek Meuraksa Panglima Nyak Doom, dan Maharaja Lela Keujroeuen Tjoereh untuk mengantar Tun Sri Lanang ke Samalanga.

Sultan Aceh menghukum Hakim Peut Misee dan sebelas orang panitia persiapan *keuleebalangan* dengan hukuman pancung. Dengan demikian, Tun Sri Lanang menjadi *Uleebalang* pertama Samalanga pada tahun 1615-1659 M. Dia mangkat dan dimakamkan di desa Meunasah Leung Samalanga. Pada masa pemerintahannya, berhasil menjadikan Samalanga sebagai pusat pengembangan Islam di kawasan timur Aceh. Samalanga juga menjadi benteng pertahanan Sultan Muhammad Daud Syah dalam menentang penjajahan Belanda. Selain ahli dalam pemerintahan, Tun Sri Lanang juga dikenal sebagai pujangga Melayu. Karyanya yang terkenal adalah kitab *Sulalatus Salatin* (Sejarah Melayu). Menurut Winstedt, kitab itu dikarang mulai bulan Februari 1614 dan selesai Januari 1615, sewaktu ia menjadi tawanan di kawasan Pasai. Ketika di Batu Sawar, Tun Sri Lanang sudah mulai menyusun Sejarah Melayu yang berasaskan kitab Hikayat Melayu yang diberikan oleh Yang Dipertuan di Hilir, Raja Abdullah. Dia kembali menyambung pekerjaannya menyusun dan mengarang kitab Sejarah Melayu tersebut ketika di Aceh.

Keturunan Tun Sri Lanang di Aceh, yaitu Tun Rembau yang lebih dikenal dengan panggilan T. Tjik Di Blang Panglima Perkasa. Ia menurunkan keluarga Ampon Chik Samalanga dengan memakai gelar Bendahara pada akhir namanya, seperti Mayjen T. Hamzah Bendahara. Sebagian keturunannya kembali ke Johor dan menjadi bendahara (Perdana Menteri) di sana, seperti Tun Abdul Majid menjadi Bendahara Johor. Keturunan Tun Abdul Majid inilah menjadi *zuriat* Sultan Trenggano, Pahang, Johor, dan Negeri Selangor Darul Ihsan.

C. Peusangan

Putra raja Mongol, Hulagu Khan, pada abad ke-13 berhasil menginvasi ke Imperium Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Pengungsian penduduk yang berusaha menyelamatkan diri tidak terbendungkan. Sebagian besar pengungsi menuju ke selatan dan sebagian terdampar di wilayah Haldramaut-Yaman, Arabia Selatan, dan ada yang berusaha menyelamatkan diri melalui jalur pelayaran tradisional ke arah Timur; yang sebagian terdampar ke pulau Sumatera, di antaranya di Bandar Aceh. Seorang di antara pengikut Khalifah Abbasiyah yang selamat itu menjadi orang terkemuka di Aceh, ia menjadi leluhur dinasti *uleebalang* negeri Peusangan, di pantai utara Aceh.

Pada 25 Juni 1890 di desa Pulo Iboh lahir seorang bayi dari ibunya yang bernama Potjut Unggaih, putri *uleebalang* Meureudu. Ayahnya, Teuku Tjhik Sjamaun, *uleebalang* Peusangan, bayi itu diberi nama Teuku Muhammad Djohan Alamsjah. Setelah memegang jabatan *uleebalang* dan menunaikan ibadah haji namanya menjadi Teuku Hadji Tjhik Muhammad Djohan Alamsjah Perkasa Alam. Teuku Tjhik Muhammad Djohan Alamsjah menjadi *uleebalang* terkemuka di Aceh. Ia keturunan IX pengungsi imperium Abbasiyah yang terdampar di Bandar Aceh pada abad ke-13.

Untuk memperkuat kedudukan *nanggroe* Peusangan dalam peta politik kerajaan Aceh, Teuku Tjhik Muhammad Hasan, kakek Teuku Tjhik Muhammad Djohan Alamsjah, menjalin hubungan dengan Peureulak melalui jalur perkawinan. Adik perempuannya yang bernama Potjut Zurah dinikahkan

dengan *uleebalang* Peureulak. Melalui perkawinannya dengan *uleebalang* Peureulak melahirkan seorang putra mahkota untuk *nanggroe* Peureulak. Sang putra itu diberi nama Teuku Abubakar Sidik dengan gelar Teuku Muda Peusangan.

Setelah berhasil menjalin hubungan dengan Peureulak, Teuku Tjhik Muhammad Hasan menjalin pula hubungan dengan Meureudu. Beliau menikahkan putranya, Teuku Tjhik Sjamaun, dengan Potjut Unggaih, putri *uleebalang* Meureudu.

Kebijakan Teuku Tjhik Muhammad Hasan dilanjutkan oleh putranya, Teuku Tjhik Sjamaun. Ketika perang Aceh dengan Belanda, Keujruen Peusangan, Teuku Tjhik Sjamaun, berusaha menjalin tali persaudaraan dengan Keureutau. Pada saat itu Keujruen Keureutau, Tjut Njak Asiah, anak seorang pedagang Tionghoa di muara sungai Keureutau, sudah menyatakan bekerja sama dengan Kerajaan Belanda, namun Teuku Tjhik Sjamaun tetap berusaha agar ia kembali mendukung Kerajaan Aceh.

Tjut Njak Asiah mengundurkan diri sebagai *uleebalang* Keureutau. *Uleebalang* perempuan itu tidak mempunyai keturunan. Dia digantikan oleh anak angkatnya, Teuku Tjhik Sjam Sjarif. Namun demikian, di lain pihak Tjut Njak Asiah membiarkan anak angkatnya yang lain, yaitu Teuku Muhammad sebagai *uleebalang* Keureutau. Teuku Muhammad adalah adik kandung Teuku Tjhik Sjam Sjarif, kedua kakak beradik itu diangkat sebagai anaknya ketika masih kecil. Mendengar ada pergantian takhta di Keureutau, Jenderal van Huetz atas nama Kerajaan Belanda mengesahkan Teuku Sjam Sjarif menjadi Keujruen Keureutau. Belanda sangat khawatir takhta *uleebalang* Keureutau dijabat oleh Teuku Muhammad karena bekerja sama dengan kerajaan Aceh. Pada saat yang bersamaan, sultan Aceh,

Tuwanku Muhammad Daudsjah, juga menetapkan Teuku Muhammad menjadi *uleebalang* Keureutau dengan gelar Keujruen. Rakyat Aceh menyebut Teuku Muhammad dengan nama Teuku Tjhik di Tunong.

Teuku Tjhik Sjamaun tetap meneruskan diplomasinya dengan Teuku Tjhik Sjam Sjarif bahkan keduanya menyepakati akan menikahkan putra tunggalnya, Teuku Muhammad Basjah, dengan cucu-putri tertua Teuku Tjhik Sjamaun. Pada tahun 1929, janji yang pernah disepakati itu diwujudkan, Potjut Ramlah, cucu-putri Teuku Tjhik Sjamaun sekaligus putri pertama Teuku Tjhik Muhammad Djohan Alamsjah menikah dengan Teuku Tjhik Muhammad Basjah.

Teuku Tjhik Sjam Sjarif beserta ibu angkatnya secara diam-diam masih bekerja sama dengan Belanda. Teuku Tjhik Sjam Sjarif terus mengamati gerak-gerik para *uleebalang* tetangganya, terutama *nanggroe* Seuleumak yang terletak di daerah hulu sungai Keureutau. *Nanggroe* Seuleumak menjadi benteng pertahanan terkuat barisan Muslimin di wilayah Pasai ketika menghadapi serbuan Belanda. Di tempat itu juga dihuni oleh ulama terkemuka, seperti Teungku Tjhik di Payabakong dan Teungku Tjhik Tanoh Mirah.

Pada tahun 1900-an Tuwanku Muhammd Daudsjah bersama Teuku Panglima Polim Muhammad Daud, memindahkan markas komando pertahanan Kerajaan Aceh ke *nanggroe* Seuleumak. Teuku Tjhik Sjam Sjarif terus mengamati gerak-gerik *uleebalang* Seuleumak.

Setelah kematian isterinya di medan perang, Teuku Bentara Hasjim, *uleebalang nanggroe* Seuleumak melamar Tjut Njak Linggam, putri Teuku Hakim Lagabaru, *uleebalang nanggroe*

Krueng Pase. *Nanggroe* Krueng Pase baru muncul menjelang Perang Aceh melawan Belanda 1873. *Uleebalang*nya, Teuku Hakim Lagabaru, seorang petualang politik, ia adalah seorang putra *uleebalang* Blangme. Lamaran seorang *uleebalang*, Teuku Bentara Seuleumak itu disambut dengan suka-cita sehingga *nanggroe* Krueng Pase menjadi sekutu baru *nanggroe* Seuleumak.

Posisi *uleebalang nanggroe* Seuleumak yang menjadi pemimpin federasi *uleebalang-uleebalang* di wilayah selatan-timur Pase dalam menghadapi Belanda menjadi semakin kuat. Belanda segera membuat siasat baru untuk mendukung sekutunya. Sementara itu, Teuku Tjhik Sjam Sjarif sedang menduda, karena ditinggal cerai oleh isterinya, Tjut Meutiah, sang panglima perang yang mendukung sultan Aceh. Tjut Meutiah lebih memilih Teuku Muhammad alias Teuku Tjhik di Tunong untuk pasangan hidupnya. Lamaran Teuku Tjhik Sjam Sjarif untuk menjadi menantu *uleebalang* Krueng Pase diterima dengan suka-cita pula. Tjut Njak Bah, adik ipar Teuku Bentara Hasjim dinikahkan dengan *uleebalang* Keureutau yang bekerja sama dengan Belanda.

Perkawinan dengan putri *uleebalang* Krueng Pase, Teuku Bentara Hasjim Seuleumak, memperoleh seorang putra. Putranya diberi nama Teuku Putih karena sang putra berkulit putih dan berambut pirang. Rakyat *nanggroe* Seuleumak mengatakan bahwa Teuku Putih adalah duplikat leluhurnya, Teuku Bentara Tu di Iboh, seorang ulama yang berasal dari Persia. Kebahagiaan perkawinan *uleebalang* Seuleumak dengan putri *uleebalang* Krueng Pase tidak berlangsung lama. Tjut Njak Linggam, isteri *uleebalang* Seuleumak meninggal. Teuku Putih, putra Teuku Bentara Hasjim Seuleumak yang masih kecil itu dibawa ke

nanggroe Keureutau. Bayi itu diasuh dan dibesarkan oleh bibinya, Tjut Njak Bah, di tempat Teuku Tjhik Sjam Sjarif, Keujruen *Nanggroe* Keureutau.

Ketika sudah menjelang dewasa putra *uleebalang* Seuleumak, dengan bangga oleh Teuku Tjhik Sjam Sjarif diperlihatkan keberhasilannya memperdayakan para *uleebalang* pendukung sultan Aceh. Di hadapan utusan Jenderal van Heutz, anak kecil itu atas nama ayahnya, Teuku Bentara Hasjim Seuleumak, menandatangani akta penyerahan seluruh *nanggroe-nanggroe* yang bergabung dalam federasi Seuleumak ke dalam *nanggroe* Keureutau.

Teuku Bentara Hasjim Seuleumak bersama dengan sepupunya, Tjut Meutia, tetap meneruskan perjuangan dengan cara perang gerilya. *Nanggroe* Seuleumak diserahkan kepada adik bungsunya, Teuku Raja Puteh, sebagai penjabat *uleebalang*.

Jenderal van Heutz tidak kehilangan akal dalam melemahkan semangat perjuangan rakyat Aceh. Ibu kandung Teuku Bentara Hasjim Seuleumak, Tjut Njak Beureumen-cucu buyut Sultan Pasai Malik al Saleh, bersama anak-isteri dan ibu Teuku Panglima Polim Muhammad Daud ditawan oleh serdadu Belanda dari persembunyiannya di hulu sungai Pase.

Jenderal van Heutz mengeluarkan maklumat kepada pemimpin perang Aceh yang belum menyerah, apabila mereka menginginkan tawanan kembali dalam keadaan selamat, pemimpin perang Aceh itu harus menebusnya. Tebusannya adalah pemimpin perang Aceh itu sendiri. Dalam keadaan terpaksa, Teuku Panglima Polim Muhammad Daud, Teuku Bentara Hasjim Seuleumak bersama pamannya, Teuku Tjhik Meukuta Geudoeng, berdamai dengan Belanda.

Belanda mendesak Teuku Tjihik Sjam Sjarif bahwa sudah saatnya menggusur Teuku Raja Puteh, pejabat *uleebalang* Seuleumak, yang masih mendukung perjuangan Aceh. Teuku Putih, yang sudah berumur 25 tahun, dengan kuda Arab berbulu putih dalam upacara kebesaran diantarkan ke *nanggroe* Seuleumak oleh Teuku Tjihik Sjam Sjarif dan ditabalkan menjadi *uleebalang* Seuleumak.

Teuku Putih, *uleebalang* baru *nanggroe* Seuleumak ini lantas mengambil alih kekuasaan dari Teuku Raja Puteh bin Teuku Bentara Seuntang Seuleumak selaku pejabat *uleebalang*. Kepada *uleebalang* Seuleumak yang baru itu, gubernur Belanda di Aceh menyampaikan surat tanda persahabatan dan dalam surat itu tercantum tunjangan bulanan yang diterima sebesar f.40.

Nasib yang sama juga dialami oleh *uleebalang* anggota federasi Seuleumak lainnya dengan menerima tunjangan bulanan f,15—f,25 dari Belanda. *Nanggroe* federasi Seuleumak itu sebagai berikut: *nanggroe* Pirak *uleebalang*nya bergelar Teuku Bentara, *nanggroe* Arabungkoek *uleebalang*nya seorang ulama besar bergelar Teungku Tjihik, Meunye, Aroen, Mulieng, Matang Panyang, Arakumudi, Seuneudon, Buah, Blang Glumpang, dan Pantan Labu, *uleebalang*nya bergelar Teuku. Kedua belas *uleebalang* itu berubah menjadi *uleebalang tjut* (*uleebalang* kecil) di bawah kekuasaan *nanggroe* Keureutau.

Tunjangan bulanan yang diperoleh *uleebalang* Keureutau dari Belanda sangat besar, yaitu f, 800 per bulan. *Uleebalang* Peusangan juga mendapatkan tunjangan f, 800,- per bulan dari Belanda. *Uleebalang* *nanggroe* Idi dan *nanggroe* Peureulak yang sudah duluan bekerja sama dengan Belanda, mendapatkan tunjangan masing-masing f,2000.- per bulan.

Uleebalang Lhok Seumawe, Teuku Maharadja Mangkubumi Abdul Hamid, kepadanya Belanda memberikan tujangan bulanan f, 3000.-, tetapi putranya yang mejadi panggantinya pada tahun 1940 hanya mendapatkan f, 100.- karena Teuku Sri Maharadja Mangkubumi Abdul Hamid beralih mendukung barisan muslimin Aceh. Teuku Sri Maharadja Mangkubumi Abdul Hamid mejadi donatur utama Syarikat Islam di Aceh.

a. Teuku Muhammad Djohan Alamsjah

Teuku Tjhik Sjamaun melalui istri pertamanya, Potjut Salbiah, memperoleh dua orang anak. Anaknya yang pertama seorang putri diberi nama Potjut Zahara, karena kecantikannya rakyat Peusangan menyebutnya Potjut Buleuen. Anaknya yang kedua seorang putra diberi nama Teuku Ali Alamsjah. Rakyat *nanggroe* Peusangan menggelari Teuku Ali Alamsjah.

Teuku Tjhik Sjamaun juga memperoleh tiga anak dari istri keduanya, Potjut Unggaih. Anaknya yang pertama diberi nama Potjut Sjaribanun, rakyat *nanggroe* Peusangan menyebut Potjut Sjaribanun dengan Potjut Putroe. Anaknya yang kedua bernama Teuku Muhammad Djohan Alamsjah, dan yang ketiga bernama Teuku Bustaman. Teuku Muhammad Djohan Alamsjah dilahirkan dan dibesarkan di Pulo Iboh. Pulo Iboh juga disebut *kuta uleebalang* (istana) *nanggroe* Peusangan.

Ketika Belanda terus-menerus mengejar barisan muslimin Aceh, Teuku Tjhik Sjamaun mengundurkan diri ke hulu sungai Peusangan. Dalam pengungsian itu Teuku Tjhik Sjamaun mengatur strategi untuk melawan serangan pasukan Belanda.

Setelah bergerilya selama 2 tahun, Teuku Tjhik Sjamaun jatuh sakit dan meninggal di hutan Peusangan dan dimakamkan di tempat tersebut.

Setelah keadaan di Peusangan aman, mayat Teuku Tjhik Sjamaun dimakamkan kembali di Matang Glumpang Dua oleh putranya, Teuku Tjhik Muhammad Djohan Alamsjah.

b. Menjadi Uleebalang Peusangan

Ketika Teuku Tjhik Sjamaun sedang bergerilya di rimba Peusangan, Sultan Aceh Tuwanku Muhammad Daudsjah berkunjung ke Matang Glumpang Dua, ibu kota *nanggroe* Peusangan. Sultan Aceh bermaksud mengukuhkan kembali Teuku Tjhik Sjamaun sebagai *uleebalang* Peusangan dengan gelar *Teuku Keujruen*. Sultan Aceh menunggu kedatangan Teuku Tjhik Sjamaun beberapa hari di Matang Glumpang Dua, tetapi *uleebalang* Peusangan itu tidak kunjung tiba. Seorang utusan Teuku Tjhik Sjamaun mengabarkan kepada Sultan Aceh bahwa *uleebalang* itu sedang sakit berat di hulu sungai Peusangan. Sultan Aceh mengukuhkan Teuku Muhammad Djohan Alamsjah yang baru berumur sekitar 10 tahun menjadi *uleebalang nanggroe* Peusangan sebagai ganti ayahnya. Pengangkatan itu dimuat di atas surat resmi Keputusan Kerajaan Aceh.

Setelah Teuku Tjhik Sjamaun wafat, paman Teuku Tjhik Djohan Alamsjah yang tertua bernama Teuku Maharadja Djeumpa berdamai dengan Belanda. Belanda menyambut uluran tangan Teuku Djeumpa itu. Utusan Belanda datang ke Pulo Iboh menemui Potjut Unggaih untuk membujuk permaisuri *uleebalang*

Peusangan itu agar mengizinkan putranya dibawa ke Kutaradja untuk disekolahkan.

Teuku Muhammad Djohan Alamsjah berangkat ke Kutaraja dengan seorang pengawal dan seorang temannya yang bernama Abdul Karim. Selama tiga tahun Teuku Muhammad Djohan Alamsjah bersama Abdul Karim belajar di Sekolah Rakyat, gurunya bernama Muhammad Djam di Kutaradja. Guru Muhammad Djam berasal dari Minangkabau, ia sangat profesional di bidangnya. Kedua anak muda Aceh itu dididik dan diajarinya dengan sabar dan tekun.

Setelah menjalani masa pendidikan, Teuku Muhammad Djohan Alamsjah, Abdul Karim, dan pengawalnya diantar kembali ke *nanggroe* Peusangan. Jenderal van Heutz menganggap *uleebalang* muda Aceh itu sudah cukup berhasil "dijinakkannya". Kepada Teuku Muhammad Djohan Alamsjah dipercayakan kembali menjabat sebagai *uleebalang* Peusangan. Dalam menjalankan tugasnya, *uleebalang* muda itu dibimbing oleh pamannya, Teuku Djeumpa.

c. Membina Rumah Tangga

Di samping mengurus *nanggroe* Peusangan, Teuku Tjhik M. Djohan Alamsjah juga harus mencari nafkah hidup. Di atas lahan miliknya, Teuku Tjhik M. Djohan Alamsjah harus bercucuran keringat untuk bertani demi mencari nafkah. Dari hasil pertanian, Teuku Tjhik Djohan Alamsjah membangun rumah di Matang Glumpang Dua pada tahun 1907.

Setelah mempunyai rumah, Teuku Tjhik Djohan Alamsjah pada tahun 1908 ingin mencari pasangan hidupnya. Kerabatnya

menyarankan untuk meneguhkan kembali tali persaudaraan antara *nanggroe* Peusangan dengan *nanggroe* Peureulak. Untuk itu, dikirimlah *seulangke* (utusan) untuk mempersunting Tjut Njak Asiah, putri *uleebalang* Peureulak, Teuku Tjhik Abubakar Sidik. Dengan demikian, selain sebagai menantu Teuku Tjhik Abubakar Sidik, Teuku Tjhik Djohan Alamsjah juga sebagai adik ipar Teuku Muhammad Thajeb Peureulak (*uleebalang* Peureulak) yang sangat populer.

Teuku Muhammad Thajeb tampil di panggung politik sebagai pejuang kemerdekaan Indonesia. Selaku anggota *Volksraad* Hindia Belanda terkemuka, Teuku Tjhik Muhammad Thajeb dengan gigih memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Belanda sangat gusar dengan sikap Teuku Tjhik Muhammad Thajeb. Akibatnya, masa jabatannya di *Volksraad* dari empat tahun dipersingkat menjadi dua tahun. Atas dasar hak istimewa Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Teuku Tjhik Muhammad Thajeb dihukum dengan hukuman pengasingan ke Boven Digul.

Ketika eksekusi akan dilaksanakan, tanpa terduga Gubernur Belanda di Jawa Barat yang bersimpati terhadap bangsa Indonesia tampil membela Teuku Muhammad Thajeb. Akhirnya, Teuku Tjhik Muhammad Thajeb dibebaskan dari hukuman pengasingan. Namun, *uleebalang* Aceh itu diusulkan mengundurkan diri dari jabatannya, baik sebagai *uleebalang* Peureulak maupun anggota *Volksraad*.

Teuku Tjhik Muhammad Thajeb tidak diperkenankan kembali lagi ke Aceh. Gubernur Jenderal Hindia Belanda menetapkan tempat kediamannya yang baru di Batavia (Jakarta). Sampai akhir hayatnya Teuku Tjhik Muhammad Thajeb tidak pernah lagi melihat tanah kelahirannya. Pada tahun 1954, ia

meninggal dan dimakamkan di perkuburan muslim Blok P-Kebayoran Baru.

Teuku Tjhik Muhammad Djohan Alamsjah dengan istrinya Tjut Njak Asiah mempunyai anak, di antaranya Potjut Ramlah yang lahir pada April 1912. Teuku Tjhik Muhammad Djohan Alamsjah mewasiatkan bahwa kelak putri pertamanya itu menjadi pengikat tali persaudaraan dengan *nanggroe* Keureutau. Pada usia 16 tahun putri jelita itu menyelesaikan pendidikan formal Belanda pada ELS (*Europesche Lager School*) di Kutaraja. Selama setahun ia memperdalam ilmu Islam bersama guru pribadinya di kediaman ayahnya di Matang Glumpang Dua. Tatkala berusia tujuh belas tahun (1929), Potjut Ramlah dinikahkan dengan Teuku Muhammad Basjah, putra tunggal Teuku Tjhik Sjam Sjarif, *uleebalang* Keureutau.

Pada tahun 1935 pasangan tersebut dianugrahi seorang putri. Putri tersebut diberi nama Potjut Zubaidah. Setelah tiga tahun kemudian, Potjut Ramlah melahirkan lagi seorang putra yang bernama Teuku Ramsjah.

Teuku Tjhik Muhammad Basjah dikenakan hukuman pengasingan selama setahun ke Kutaradja. Belanda menganggapnya telah melakukan sesuatu kesalahan. Jabatan *uleebalang* dialihkan kepada saudara sepupunya, Teuku Radja Sabi, putra Tjut Mutia. Ia meninggal pada 11 Maret 1990 di Medan dan dimakamkan di perkuburan keluarga Sultan Deli di samping Masjid Raya Al Maksam, Medan.

Di antara anak Teuku Tjhik Muhammad Djohan Alamsjah yang lain adalah Teuku M. Hasan, Teuku M. Saleh, T. Abubakar, Potjut Fatimah Zohra, Potjut Maimunah, dan Potjut Aminah. Mereka bersekolah di ELS Kutaraja kemudian menyelesaikan

pendidikan menengah HBS di Medan. Teuku Muhammad Hasan melanjutkan pendidikan RHS (*Recht Hoge School*) di Batavia. Potjut Fatimah Zohra melanjutkan pendidikan di Sekolah Guru Tinggi di Lembang, Bandung. Potjut Maimunah melanjutkan pendidikan di Sekolah Akademi Guru di Jakarta.

d. Uleebalang Peusangan

Ketika Teuku Muhammad Djohan Alamsjah dianggap sudah mampu memimpin *nanggroe* Peusangan, Teuku Djeumpa menyerahkan jabatan *uleebalang* Peusangan kepadanya dan disetujui oleh Belanda. Upacara pelantikan itu dilangsungkan di halaman rumah kediamannya di Matang Glumpang Dua pada 25 November 1912. Setelah dilantik menjadi *uleebalang* Peusangan, masyarakat memanggilnya dengan panggilan Ampon Tjhik. Ia mendapat tunjangan f,800,- per bulan dari Belanda.

e. Pembangunan Bidang Pendidikan

Teuku Tjhik Muhammad Djohan Alamsjah berusaha mencerdaskan seluruh rakyatnya di *nanggroe* Peusangan. Pendidikan rakyat model Belanda dikembangkannya secara bertahap. Dalam waktu singkat berdirilah sekolah-sekolah dasar di Matang Glumpang Dua. Orang Belanda menyebutnya dengan sekolah *volkschool* (sekolah rakyat).

Kekurangan guru menyebabkan *uleebalang* Peusangan itu mencari terobosan dengan cara mendatangkan guru-guru dari Minangkabau. Orang Minangkabau pertama yang membawa ilmu pengetahuan ke Peusangan adalah pasangan suami isteri,

Sutan Mangkudun- Encik Rukiah. *Uleebalang* Peusangan itu juga mengirim putra-putri Peusangan tamatan *volkschool* untuk belajar di sekolah guru di Padang. Sementara itu, terdapat seorang guru lulusan *Normalschool* (sekolah guru berbahasa Melayu) di Pematangsiantar, yaitu Sjamaun Gaharu. Ia ditempatkan di *volkschool* di Matang Glumpang Dua. Melihat prestasinya sebagai guru sangat menonjol, Sutan Mangkudun mengusulkan kepada *uleebalang* Peusangan supaya Sjamaun Gaharu diberi kesempatan belajar di *Landbouwschool* (sekolah pertanian) di Bogor.

Teuku Tjhik Peusangan mendesak Gubernur Belanda di Aceh untuk mendirikan HIS (*Holland Inlandsche School*), sekolah dasar berbahasa Belanda, di Bireuen. Anak-anak guru Sutan Mangkudun juga belajar di sekolah Belanda itu. Akhirnya suami-isteri guru yang penuh dedikasi dan sangat profesional itu menghabiskan seluruh sisa umurya di Peusangan.

f. Pembangunan Bidang Ekonomi

Teuku Tjhik Peusangan juga berusaha meningkatkan taraf hidup rakyatnya di bidang ekonomi. Perhatian utama ditujukan ke bidang pertanian rakyat. Ia memerintahkan rakyatnya untuk memperluas areal persawahan. Persawahan yang luas memerlukan air yang banyak pula. Untuk itu, Teuku Tjhik Peusangan terpaksa meminta bantuan Belanda.

Belanda mendatangkan ahli persawahannya dari Pulau Jawa untuk mendampingi *uleebalang* Peusangan memajukan pertanian rakyat Peusangan. Bendungan dan irigasi dibangun untuk mengairi areal persawahan.

Teuku Tjihik Muhammad Djohan Alamsjah berhasil meningkatkan taraf hidup rakyatnya melalui pertanian. Proyek persawahan *nanggroe* Peusangan sangat sukses, sehingga produksi padi berlimpah ruah dan *nanggroe* Peusangan menjadi daerah lumbung padi.

Selain meningkatkan produksi hasil padi, *uleebalang* Peusangan menyerukan kepada rakyatnya untuk menanam tanaman buah-buahan. Belanda mendatangkan ahli pertanian dari Bogor, Jawa Barat. Penyuluh pertanian itu membawa serta bibit buah-buahan yang dikehendaki oleh *uleebalang* Peusangan.

Untuk memasarkan hasil pertanian, Teuku Tjihik Peusangan menggiatkan kegiatan perniagaan. Pusat perniagaan dan ruko (rumah-toko) bermunculan di Peusangan. Bireuen muncul menjadi pusat perdagangan terpenting di wilayah *Noord Kust van Atjeh* (pantai utara Aceh).

g. Pembangunan Bidang Agama

Setelah Teuku Tjihik Peusangan merasa sudah mulai berhasil membimbing rakyatnya ke luar dari kebodohan dan kemiskinan, ia berusaha mengembalikan marwah rakyat Aceh melalui pendidikan Islam. Dalam waktu singkat berdirilah sebuah gedung sederhana, tempat lembaga pendidikan formal agama Islam di Matang Glumpang Dua. Lembaga pendidikan ini diberi nama Al Muslim didirikan pada tahun 1929.

Selain itu, rakyat Peusangan juga membangun rumah-rumah ibadah, seperti mesjid dan *meunasah* atau surau. Mesjid dan *meunasah* selalu penuh dengan salat berjamaah. Mesjid dan

Kenegerian di Kabupaten Bireuen

meunasah juga dipergunakan untuk tempat mengaji dan mempelajari ilmu agama.

BAB IV
KABUPATEN BIREUEN PADA MASA
REVOLUSI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA

A. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Berita tentang proklamasi Kemerdekaan Indonesia baru diketahui oleh masyarakat Aceh pada tanggal 21 Agustus 1945. Informasi itu diperoleh melalui Ghazali Yunus dan kawan-kawannya yang bekerja di kantor berita Jepang Domei, Kantor Penerangan Jepang (*Hodoko*), dan kantor *Atjeh Sinbun*. Mereka mengetahui kejadian itu melalui siaran radio yang ada di kantornya, kemudian secara hati-hati mereka sampaikan berita itu kepada teman-teman mereka.

Pada tanggal 24 Agustus 1945, Teuku Nyak Arief menerima telegram dari dr. Adnan Kapau Gani (Wakil Residen/*Fuku Chokan*) dari Palembang, yang isinya menyatakan bahwa Bung Karno dan Bung Hatta telah mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Pada 26 Agustus 1945 diperoleh pula berita kemerdekaan Indonesia dari Adinegoro dan Muhammad Syafei dari Bukit Tinggi.

Berita proklamasi Kemerdekaan Indonesia disambut gembira oleh masyarakat Aceh. Mereka mengibarkan bendera merah putih, baik di depan kantor-kantor yang masih dikuasai Jepang, di depan toko-toko, maupun di rumah-rumah penduduk. Aksi spontanitas yang dilakukan oleh masyarakat Aceh tersebut mengakibatkan terjadinya beberapa insiden, karena pihak Jepang melarang pengibaran bendera merah putih. Pelarangan itu dilakukan oleh Jepang, karena sesuai dengan ketentuan internasional, tentara Jepang yang kalah perang harus tunduk pada ketentuan-ketentuan Sekutu. Sekutu menginstruksikan bahwa tentara Jepang harus menjaga dan memelihara status quo. Artinya, Jepang tidak boleh mengadakan perubahan terhadap sistem pemerintahan di Indonesia sejak 15 Agustus 1945. Dengan

kata lain, Jepang harus mencegah setiap aksi pihak Indonesia yang berupaya mengambil alih kekuasaan, baik kekuasaan militer maupun sipil dari pembesar-pembesar Jepang.

Sebaliknya, Indonesia mempunyai pandangan yang berbeda dengan pendirian Jepang. Diproklamirkannya Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 mengandung arti bahwa bangsa Indonesia sudah berdaulat di tanah air dan negaranya sendiri, sedangkan Jepang masih tunduk pada perintah Sekutu. Dua pandangan yang berbeda itu menimbulkan berbagai insiden antara rakyat Indonesia termasuk rakyat Aceh dengan tentara Jepang.

Pengibaran bendera merah putih secara resmi di Aceh dilakukan pada 24 Agustus 1945 di halaman kantor Teuku Nyak Arief (sekarang Kantor Wilayah Departemen Agama Aceh), dan di halaman Kantor *Shu-Chokan* (Gedung Juang). Kedua peristiwa bersejarah itu dipimpin langsung oleh Teuku Nyak Arief (merupakan residen pertama pemerintah Republik Indonesia di Aceh). Pengibaran bendera dilakukan oleh Hasyim Naim (mantan Kepala Polisi Aceh pertama) dan Muhammad Amin Bugeh. Selanjutnya, pada 25 Agustus 1945 bendera merah putih dikibarkan pula oleh Ali Hasjmy beserta rekan-rekannya di depan kantor *Atjeh Sinbun*. Setelah itu, kegiatan pengibaran bendera merah putih semakin semarak dilakukan di tempat-tempat umum di Kutaraja dan sekitarnya. Selama bulan September sampai awal Oktober 1945, pengibaran bendera merah putih telah berlangsung di kota-kota lain di seluruh Aceh, seperti di Sigli, Bireuen, Lhok Seumawe, Lhok Sukon, Idi, Langsa, Kuala Simpang, Kutacane, Takengon, Meulaboh, dan Tapaktuan.

Menurut Husin Yusuf, berita proklamasi kemerdekaan pertama kali diketahui di Bireuen pada 19 Agustus 1945 melalui siaran radio berbahasa Jepang. Ketika itu Husin Yusuf bekerja pada staf intelijen resmi *Fojoka* dengan pangkat Letnan Gyugun (Husin Yusuf kemudian terkenal sebagai Panglima TNI Divisi X sekitar tahun 1947-1949 dengan pangkat Kolonel TNI/AD).

Berita tersebut kemudian disiarkan secara diam-diam kepada perwira *Gyugun* lainnya, seperti Agus Husein dan pemuka-pemuka masyarakat di Bireuen. Kesulitan alat komunikasi, transportasi, dan militer Jepang masih berkuasa, menyebabkan berita proklamasi terlambat diketahui di tempat lain.

Di daerah Aceh Utara, pengibaran bendera merah putih juga dilakukan, di Lhok Sukon pada 29 Agustus 1945, Letnan *Gyugun* Hasbi Wahidi menerima berita proklamasi melalui utusan Gubernur Sumatera ke Aceh. Pada siang harinya, para pemimpin, tokoh, dan masyarakat mengadakan pertemuan yang dipimpin oleh Letnan *Gyugun* Hasbi Wahidi. Pada sore harinya upacara pengibaran bendera merah putih dilaksanakan di lapangan bola kaki Lhok Sukon. Di Lhok Seumawe, upacara pengibaran bendera merah putih dilaksanakan pada bulan September 1945 bertempat di lapangan bola kaki Lhok Seumawe. Upacara pengibaran bendera itu dipimpin oleh Teuku Ibrahim Panglima Agung Cunda, turut pada acara itu adalah Hasan Sab dan *Guncho* Lhok Seumawe, Teuku Abdul Latif.

Pada tanggal 3 Oktober 1945, residen Aceh menerima instruksi dari gubernur Sumatera tentang pengibaran bendera merah putih, mulai pukul 06.00 pagi, bendera merah putih berkibar di rumah-rumah penduduk di seluruh Aceh. Demikian juga di kantor-kantor pemerintah dan sekolah-sekolah mengibarkan bendera kebangsaan itu walaupun dilarang oleh Jepang. Menindaklanjuti instruksi tersebut, pada 13 Oktober 1945 Ketua Pusat Komite Nasional Daerah Aceh, Tuanku Mahmud, mengeluarkan Maklumat No. 2 berisi pengumuman kepada penduduk supaya mengibarkan bendera merah putih di setiap rumah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dikibarkan mulai tanggal 13 Oktober sampai tanggal 17 Oktober 1945,
- b. Bendera dikibarkan mulai pukul 7 pagi hingga pukul 18.00, dan
- c. Jika hari hujan, bendera tidak usah dikibarkan.

B. Pembentukan Pemerintahan Daerah

Sebelum berita proklamasi kemerdekaan sampai ke Aceh, rakyat di daerah ini hanya mengetahui bahwa dari pulau Sumatera terdapat wakil yang ditunjuk untuk mewakili Sumatera sebagai anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu Mr. Teuku Muhammad Hasan, Dr. Amir, dan Mr. Abbas. Pada 7 Agustus 1945 mereka berangkat ke Jakarta melalui Singapura untuk menunggu kembalinya Bung Karno dari Saigon. Dari Singapura 14 Agustus 1945 mereka bersama Bung Karno berangkat ke Jakarta.

Mr. Teuku Muhammad Hasan bersama kedua rekannya kembali ke Sumatera melalui Palembang pada 24 Agustus 1945. Di Palembang, Mr. Muhammad Hasan yang telah diangkat menjadi Wakil Pemimpin Besar untuk Sumatera sejak 22 Agustus 1945 meminta kepada DR. A. K. Gani untuk membentuk Komite Nasional Indonesia Daerah Sumatera Selatan dan menyiarkan berita proklamasi kemerdekaan ke daerah-daerah. Dari Palembang, ketiga tokoh itu meneruskan perjalanan menuju Medan dan singgah di beberapa tempat, seperti Jambi, Bukittinggi, Tarutung, dan sampai di Medan pada 29 Agustus 1945. Di kota-kota yang disinggahi tersebut, Teuku Muhammad Hasan menganjurkan hal yang sama seperti di Sumatera Selatan.

Setelah menerima kawat dari DR. Adnan Kapau Gani dan Muhammad Syafei, Teuku Nyak Arief pada 28 Agustus 1945 mengambil inisiatif membentuk Komite Nasional Indonesia (KNI) Daerah Aceh. Ketua lembaga itu ditetapkan Teuku Nyak Arief, yang semula memegang jabatan Ketua *Syu Sangi Kai* (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh) bentukan Jepang, sedangkan wakil ketua dipilih Tuanku Mahmud.

Pada 6 Oktober 1945, Komite Nasional Indonesia Daerah Aceh menerima kawat dari Ketua Barisan Pemuda Indonesia

Bireuen yang menyatakan bahwa telah berdiri dan melakukan rapat umum Barisan Pemuda Indonesia Bireuen. Organisasi itu terdiri atas gabungan delapan perkumpulan pemuda di Bireuen yang diketuai oleh Agus dan menyatakan siap sedia berkorban di bawah pimpinan Presiden Sukarno.

Selain itu, atas anjuran Komite Nasional di wilayah Aceh Utara, semua saudagar di Lhok Sukon sepakat membentuk sebuah perkumpulan bernama Perserikatan Saudagar Indonesia (Persi) pada 2 Desember 1945. Tujuannya adalah menyokong negara Republik Indonesia serta membina persatuan dan mengukuhkan hubungan silaturrahi di kalangan mereka. Seluruh anggota Persi juga mengangkat sumpah membela negara Republik Indonesia.

Komite Nasional Daerah Aceh pada 20 Desember 1945 mengadakan musyawarah di Banda Aceh. Membubarkan susunan pengurusnya yang lama dan menyerahkan kepada suatu komisi yang bekerja sama dengan residen untuk membentuk pengurus baru. Pada 25 Desember 1945, Komite Nasional Daerah Aceh menyusun kepengurusan baru yang terdiri atas 72 anggota dari seluruh Aceh. Mr. S. M. Amin diangkat menjadi Ketua, Hasyim sebagai Ketua Muda, Muchtar sebagai Setia Usaha I, Kamaroesaid sebagai Setia Usaha II, dengan pembantu-pembantunya R. Insoen, Hanafiah, dan H. M. Zainuddin. Selain itu, Komite Nasional Daerah Aceh dalam rapatnya memilih sepuluh orang wakil daerah yang duduk dalam Komite Nasional Pusat Sumatera. Mereka terdiri atas Sutikno Padmo Sumarto, Amelz, Teungku Ismail Jakub, Teungku Abdul Wahab (wakil *Luhak* Aceh Besar), Affan Daulay (wakil *Luhak* Pidie), M.I. Daud (wakil *Luhak* Aceh Utara), Karim M.

Duryat (wakil *Luhak* Aceh Timur), H. Mustafa Salim (Wakil *Luhak* Aceh Tengah). A. Mu'thi, dan M. Abduh Syam (wakil *Luhak* Aceh Barat).

Gubernur Sumatera pada 28 Desember 1945 mengeluarkan maklumat No.70 yang membagi Keresidenan Aceh menjadi tujuh *luhak*. Dalam maklumat tersebut ditetapkan sebagai berikut;

1. *Luhak* Aceh Besar terdiri atas wilayah Banda Aceh, Seulimeum, dan Sabang,
2. *Luhak* Pidie terdiri atas wilayah Sigli, Lammeulo, dan Meureudu,
3. *Luhak* Aceh Utara terdiri atas wilayah Bireuen, Lhok Seumawe, dan Lhoksukon,
4. *Luhak* Aceh Timur terdiri atas wilayah Idi, Langsa, dan Kuala Simpang,
5. *Luhak* Aceh Tengah, terdiri atas wilayah Takengon, Blangkejeren, dan Kutacane,
6. *Luhak* Aceh Barat terdiri atas wilayah Calang, Meulaboh, dan Simeulue, dan
7. *Luhak* Aceh Selatan terdiri atas wilayah Tapak Tuan, Bakongan, dan Singkil.

Pada tanggal yang sama, Gubernur Sumatera dengan Surat Ketetapan No. 71 mengangkat kepala-kepala wilayah seluruh Aceh, yaitu T. M. Ali Teunom (kepala wilayah Banda Aceh), T.M. Taib (Seulimeum), Sigli (T. Sabi), T. M. Daud (Lammeulo), T. Mahmud (Meureudu), Raja M. Zainuddin (Takengon), T. Raja Husin (Blangkejeren), Raja Maribun (Kutacane), T. M. Basyah (Lhok Seumawe), T. Idris (Bireuen), T. Cut Raja Pait (Lhok Sukon), T. Ali Basya Langsa (Langsa), T. Ali Basyah Lhok Sukon (Idi), T. Raja Sulung (Kuala Simpang), T. M. Aji (Meulaboh), T. Raja Mahmud (Sinabang), T. Adiyani (Calang), T. M. Taib Wood (Tapak Tuan), T. Johan (Bakongan), dan T. Itam (Singkil). Mereka diberi gaji Rp300 per bulan, kecuali kepala wilayah kelas I Meureudu

dan Lhok Seumawe digaji Rp400 per bulan. Pembantu Kepala Wilayah yang diperbantukan pada Kepala Wilayah Meulaboh, T. Hasan Bakongan, diberikan gaji Rp150 rupiah per bulan.

Pada 17 Januari 1946, bertepatan dengan peringatan enam bulan berdiri Negara Republik Indonesia, di Bireuen dilakukan rapat umum dan pawai akbar. Rapat umum yang dihadiri puluhan ribu orang itu mengeluarkan mosi sebagai berikut:

1. Berdiri teguh di belakang presiden dan siap mempertahankan kedaulatan Negara Republik Indonesia,
2. Menolak sesuatu pemerintahan yang berbau dominion status, *selfgovernment*, dan nama lain, yang boleh diterima adalah merdeka 100 %,
3. Mempercayai sepenuhnya Kabinet Syahrir, tetapi tidak mengizinkan berembuk lebih jauh dengan pemerintah Belanda sebelum kemerdekaan Indonesia 100 % diakui pemerintahnya dengan tidak ada tawar-menawar,
4. Rakyat wilayah ini yang berjumlah 145.000 jiwa siap sedia dari segala gerakan dan bersatu padu untuk menyokong pemerintah pada tiap kemungkinan dengan jiwa dan raganya,
5. Jangan dibolehkan lagi tentara Inggris maupun Belanda masuk ke Indonesia sebelum diakui kemerdekaan Negara Republik Indonesia,
6. Disanggah sekeras-kerasnya tindakan-tindakan tentara Inggris yang menggentet gerakan rakyat Negara Republik Indonesia, dan
7. Didengung-dengungkan ke luar negeri segala tindakan-tindakan onar yang dilakukan Inggris di Indonesia.

Dalam rangka melengkapi pelaksana-pelaksana dalam pemerintahan selanjutnya, pada 21 Februari 1946 Pemerintah

Keresidenan Aceh mengumumkan pegawai-pegawai tinggi sebagai berikut:

1. Asisten Residen d/p Residen Aceh T. M. Amin,
2. Pegawai Tinggi d/p Residen Aceh Teungku Muhammad Daud Beureu-eh dengan pangkat Asisten Residen,
3. Pegawai Tinggi d/p Residen Aceh Nya' Mansoer dengan pangkat Konteler,
4. Pegawai Tinggi d/p Residen Aceh Said Abu Bakar dengan pangkat Konteler,
5. Aspiran Konteler d/p Kepala Wilayah Lhok Seumawe, T. Ali Basyah,
6. Aspiran Konteler d/p Kepala Wilayah Bireuen, Marzuki, dan
7. Aspiran Konteler d/p Kepala Wilayah Lhok Sukon, H. Harun.

Dalam rapat pleno KNI yang berlangsung pada 5 Juni 1946 di Banda Aceh, Komite Nasional Daerah Aceh dibubarkan dan selanjutnya dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Rapat yang dipimpin oleh T. Mohd. Daudsyah (residen Aceh pengganti Teuku Nyak Arief) tersebut juga mendengar uraian dan penjelasan anggota Dewan Perwakilan Sumatera wakil Aceh, yaitu Amelz dan Sutikno Padmosumarto yang baru kembali dari menghadiri Rapat Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera di Bukittinggi. Dengan uraian tersebut dan petunjuk-petunjuk dari anggota rombongan Pemerintah Pusat yang meninjau Aceh, maka semakin jelas pengertian mengenai kedudukan dan tugas-tugas Komite Nasional atau Dewan Perwakilan Rakyat di daerah. Lembaga baru ini (DPR Aceh) terdiri atas lima belas anggota, yaitu dua puluh orang Ketua Cabang Komite Nasional, tujuh orang Bupati, tujuh belas orang wakil partai/perkumpulan, dan 31 orang terkemuka dan cendikiawan. Anggota-anggota tersebut yang mewakili Aceh Utara di antaranya: Muhammad Saridin (Lhok Seumawe), M. Kasim Arsyad (Lhok Sukon), Tgk. Sulaiman Daud (Bupati Aceh

Utara), dan A. Gari (Bireuen).

Untuk kesempurnaan jalannya pemerintahan di keresidenan Aceh, gubernur Sumatera melakukan mutasi besar-besaran di kalangan pamongpraja dan kepala-kepala jawatan dengan Ketetapan No.204 tertanggal 11 Agustus 1946 diberhentikan dari pekerjaannya sehingga yang bersangkutan tidak memangku lagi jabatannya sebanyak 33 orang di seluruh Aceh. Dari Aceh Utara, yaitu T. M. Basyah (kepala Wilayah Lhok Seumawe), T. Idris (Kepala Wilayah Bireuen), dan H. Harun (Kepala Wilayah Lhok Sukon). Mereka digantikan oleh Teungku Abdul Wahab Beureugang menjadi Wedana Lhok Seumawe, Tgk. M. Nur menjadi Wedana Bireuen, dan Teungku Muhammad Usman Aziz sebagai Wedana Lhok Sukon.

C. Merebut Senjata Tentara Jepang

Jepang masih menguasai semua persenjataan meskipun sudah kalah berperang melawan Sekutu. Hal itu disebabkan tentara pendudukan Jepang mendapatkan tugas dari Sekutu untuk memelihara status quo. Pemerintah Jepang tidak boleh menyerahkan kekuasaannya dan persenjataan kepada Indonesia. Semua persenjataan itu nantinya harus diserahkan kepada tentara Sekutu. Di lain pihak, senjata-senjata Jepang itu sangat diperlukan oleh laskar-laskar atau badan-badan perjuangan rakyat Aceh untuk menghadapi tentara NICA (Netherland Indie Civil Administration) yang sudah mulai melakukan aksinya di berbagai daerah di Indonesia.

Pada mulanya pemimpin lasykar rakyat Aceh ingin menempuh secara damai dengan Jepang agar senjatanya diserahkan kepada pejuang-pejuang Aceh. Upaya itu dilakukan

untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Janji Jepang untuk menyerahkan persenjataannya kepada pejuang Aceh tidak pernah dipenuhi, maka pemimpin perjuangan rakyat Aceh terpaksa harus menempuh dengan cara kekerasan untuk memperoleh persenjataan dari Jepang. Cara yang demikian menimbulkan berbagai insiden bersenjata yang berakibat jatuhnya korban pada kedua belah pihak, akhirnya Jepang terpaksa menyerahkan senjata-senjatanya kepada pejuang Aceh.

Dengan cara yang demikian, Tentara Keamanan Rakyat bersama barisan rakyat berhasil memperoleh senjata dari Jepang. Di Sigli (Pidie) pada akhir November 1945, sebanyak 200 pucuk senjata, di Aceh Utara, yaitu di Bireuen dan Lhok Seumawe pada 18 November 1945, masing-masing mendapatkan senjata sebanyak 320 dan 300 pucuk, di Juli pada 20 November 1945 memperoleh enam tank, tiga meriam pantai, tiga senapan mesin, dua truk, 72 karabin, dan tujuh gudang amunisi. Di Gelanggang Labu pada 22 November memperoleh sebanyak 620 pucuk senjata, di Krueng Panjo pada 24 November 1945 terjadi pertempuran sengit selama tiga hari dan berakhir dengan penyerahan 300 pucuk senjata oleh Jepang kepada pejuang Aceh. Di Aceh Timur, terutama di Idi dan Langsa pada 9 dan 13 Desember 1945 memperoleh senjata masing-masing sebanyak 220 dan 300 pucuk. Demikian juga di daerah-daerah lain, seperti Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Tengah, dan Aceh Tenggara.

Resimen tentara Jepang yang bermarkas di Bireuen, menempatkan batalyon-batalyonnya di Samalanga, Lhok Seumawe, dan Lhok Sukon. Selain itu, Jepang menempatkan sebuah resimen tentara yang disebut *Suzuki Rensei-Tai* dan dua detasemen khusus menjaga lapangan terbang militer darurat di Gelanggang Labu,

dekat Matang Geulumpang Dua, sekitar 12 km dari kota Bireuen. Sejumlah senjata berat dipusatkan di kota Bireuen. Pasukan itu juga bertugas menjaga dan mengamankan gudang-gudang senjata serta logistik di Desa Juli sekitar 5 km dari Kota Bireuen. Di desa itu Jepang menyimpan alat perlengkapan perang dan gudang amunisi bagi satu resimen tentara Jepang. Dari tempat itu disuplai logistik militer ke Krueng Ulim Samalanga hingga Geudong di Lhok Seumawe.

Usaha mendapatkan senjata Jepang di Bireuen dimulai sejak Oktober 1945, namun belum berhasil. Perundingan antara pihak API yang dibantu oleh mantan *Guncho* (wedana) Bireuen, T. Idris Panteraja, dengan Jepang sudah dilakukan beberapa kali. Akan tetapi, selalu gagal karena pihak Jepang tidak mau menyerahkan senjatanya secara sukarela. Karena tidak menemukan kesepakatan, pemimpin API Bireuen meminta T. Hamid Azwar (Kepala Staf API) untuk datang ke Bireuen. Wakil Markas Daerah III API (Resimen III) Bireuen adalah T. M. Daud Samalanga dan wakilnya T. Hamzah. Pada pertemuan antara API dengan mantan *guncho* Bireuen diputuskan merubah taktik menghadapi Jepang, yaitu dengan cara intimidasi dan mengerahkan rakyat sebanyak mungkin. WMD III beserta para perwiranya, seperti T. Hamzah, Agus Husin, Nyak Do, Yusuf Ahmad, T. A, Hamdani, Muhammad Amin, Abdul Hamid TOB, A. Rachman Achmady (Bahady), dan para pemuka rakyat, seperti Naam Rasmadin, H. Affan, Marzuki Abu Bakar, Syamsuddin bin Gempa melakukan tekanan terhadap garnisun Jepang di Bireuen.

Pada hari pengerahan massa, sejak subuh sudah beribu-ribu rakyat Bireuen mengepung tangsi Jepang. Pemimpin WMD III API

bersama mantan *guncho* Bireuen akhirnya dapat meyakinkan Jepang bahwa satu-satunya cara terbaik bagi Jepang adalah menyerahkan seluruh senjatanya kepada rakyat Bireuen. Akhirnya pada 18 November 1945 Jepang terpaksa menyerahkan seluruh senjata berikut dengan perlengkapannya kepada rakyat Bireuen. Penyerahan dilakukan dengan cara serah terima dan penandatanganan naskah oleh masing-masing pihak dan sekaligus dilaksanakan penggantian pengawalan. Penyerahan satu resimen tentara Jepang *Suzuki Rensei-Tai* kepada Wakil Markas Daerah API/TKR, Mayor Teuku M. Daud Samalanga di Bireuen dilakukan dengan upacara militer. Mayor Teuku Hamid Azwar sebagai Kepala Staf TKR Divisi V Komandemen Sumatera khusus datang dari Kutaraja ke Bireuen untuk menyaksikan penyerahan senjata Jepang tersebut.

Penyerahan senjata itu yang mewakili dari pihak Jepang bukan komandannya (*Hutaicho*) tetapi wakilnya yang berpangkat *shosa* (mayor), sedangkan yang menerima dari pihak masyarakat Bireuen adalah T. M. Daud Samalanga beserta staf WMD III API dan disaksikan juga oleh T. Idris Panteraja (mantan *guncho* Bireuen) dan *Keucik* Juli. Penyerahan senjata Jepang kepada API/TKR tanpa terjadi korban pada kedua belah pihak. Pemimpin API (Angkatan Perang Indonesia) wilayah Bireuen yang diwakili oleh T. Hamzah menerima 320 pucuk senjata dari *Daitaityo Ibi Hara* Bireuen dan dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, antara lain H. Affan, H. Abu Bakar, dan Naam Rosmadin.

Pada 20 November 1945 di Juli dan Geulanggang Labu terjadi pertempuran antara penduduk dengan tentara Jepang. Pertempuran berlangsung selama tiga hari dan berhenti setelah dilakukan pendekatan antara kedua belah pihak. Juli, pada masa pendudukan Jepang dijadikan basis tempat penyimpanan

persenjataan perang untuk pertahanan kawasan sepanjang Krueng Ulim, Samalanga hingga Geudong. Ketika peristiwa itu terjadi, tentara Jepang yang selama ini sangat bangga dengan kemampuannya berperang, merasa terpukul atas penyerbuan tersebut. Mereka lalu menyerahkan enam kendaraan tank, tiga pucuk meriam pantai, tiga pucuk senapan mesin Juki, dua buah truk, 72 pucuk karaben, dan tujuh gudang amunisi.

Perlucutan senjata Jepang di Desa Juli sempat diwarnai bentrokan senjata. Jepang menolak menyerahkan senjata ke API dalam perundingan antara pemimpin pejuang Aceh dengan Nakakubu, pemimpin tentara Jepang. Pada saat perundingan, rakyat sudah mengepung markas persenjataan Jepang. Gerakan perlucutan senjata Jepang di Juli dipimpin oleh *Keucik* Ibrahim dengan Komandan Pasukan Letnan Thaib Bulan dan Jusuf Ahmad, dimulai pada 20 November 1945. Penolakan Jepang untuk menyerahkan senjata membuat rakyat marah. Pasukan API/TKR yang didukung oleh Barisan Rakyat di bawah pemimpin Utoh Husin dan A. R. Mahmudi melakukan penyerbuan ke asrama Angkatan Udara Jepang di Gelanggang Labu, sekitar 18 km dari Bireuen pada 22 November 1945. Setelah pertempuran berlangsung sekitar tiga jam, Komandan Pangkalan Udara Jepang di Geulanggang Labu mengajak untuk berunding lagi. Hasil perundingan tersebut, Jepang meyerahkan enam puluh pucuk senjata. Penyerahan senjata sebanyak itu belum memuaskan pihak pejuang Aceh, sehingga suasana pun belum kondusif. Para pejuang Aceh belum mau meninggalkan pangkalan udara Jepang, sehingga pihak Jepang sangat cemas. Keesokan harinya pasukan angkatan udara Jepang meninggalkan pangkalan dan mengungsi ke Lhok Seumawe.

Perlucutan senjata di Bireuen menyebabkan Garnisun Jepang di Lhok Seumawe segera bereaksi. Pada 24 November 1945, tiga kompi pasukan didatangkan dengan menggunakan 9 dressi dan tiga gerobak kereta api bergerak menuju Bireuen dengan maksud menguasai kembali Bireuen dan mengambil kembali senjata yang telah diambil oleh API. Dua hari sebelum pengerahan pasukan sudah terlihat kesibukan Jepang mempersiapkan pasukan sambil meminta disediakan kereta api untuk mengangkut pasukan ke Bireuen. Suasana itu dilaporkan ke Markas Daerah API di Kutaraja. Syamaun Gaharu ditugasi mengkoordinir daerah Aceh Utara. API Bireuen dikerahkan untuk menghadang Jepang di tempat yang strategis sambil menunggu bantuan dari Kutaraja dan dari daerah lain. API Bireuen memilih Matang Geulumpang Dua sebagai pos komando dan Krueng Panjo sebagai tempat penghadangan.

Dipilihnya Krueng Panjo sebagai tempat menghadang tentara Jepang karena dari segi lokasi sangat menguntungkan untuk mengadakan pengepungan. Daerah Krueng Panjo dilintasi oleh jalur kereta api, diperkirakan tentara Jepang akan mempergunakan transportasi kereta api menuju Bireuen. Krueng Panjo berada di daerah persawahan dan terdapat semacam tanggul besar yang digunakan untuk mengairi areal persawahan.

Tentara Jepang yang bergerak menuju Bireuen terdiri atas Batalyon satu Resimen III Infantri di bawah komando Mayor Suzuki. Batalyon itu sejak awal ditempatkan di Lhok Seumawe, tetapi satu kompi di antaranya dipulangkan ke Medan dan digantikan dengan kompi lain dari Lhok Sukon. Kesatuan kedua adalah batalyon yang dipimpin oleh Mayor Suzuki berasal dari bekas batalyon pengawal lapangan terbang Blang Pulo dengan komandan Mayor Metsugi. Gabungan kedua batalyon

itu disebut *Suzuki Butai* karena dipimpin oleh Mayor Suzuki.

Strategi yang telah disusun oleh Teuku Hamid Azwar dikomunikasikan kepada Komandan Operasi, Teuku Hamzah, menginstruksikan agar rel kereta api di Pante Gajah dekat Krueng Panjo yang jaraknya sekitar 3 km sebelum masuk stasiun kereta api Matang Geulumpang Dua, dibongkar agar kereta api tidak dapat lewat. Demikian juga keesokan harinya, jika kereta api telah melewati daerah sasaran, pasukan API/TKR harus segera membongkar rel kereta api di bagian belakang sehingga kereta api tidak dapat mundur karena sudah terkurung di tengah.

Di Bireuen, sebuah Komando Operasi segera dibentuk dengan Komandan Operasi Kapten Teuku Hamzah. Dilengkapi dengan empat kompi pasukan API/TKR: Kompi 1 dipimpin Letnan Agus Husin, Kompi II dipimpin oleh Letnan T. A. Hamdani, Kompi III dipimpin oleh Letnan Nyak Do, dan Kompi IV dipimpin oleh Letnan Yusuf Ahmad.

Pasukan Rakyat yang dipersiapkan di antaranya:

1. Barisan Rakyat Kampung Juli dipimpin Keucik Ibrahim,
2. Barisan Rakyat Gelanggaag Labu dipimpin oleh Utoh Husin/AR Mahmudi,
3. Barisan Rakyat Samalanga dipimpin oleh Teungku Sjahbuddin,
4. Barisan Rakyat Jeunib dipimpin oleh M. Ali,
5. Barisan Rakyat Geurugok dipimpin oleh Teuku Zamzam,
6. Barisan Rakyat Peusangan dipimpin oleh Saleh Alamsyah,
7. Barisan Rakyat Krueng Panjo dipimpin oleh Teungku Abdurahman,
8. Barisan Rakyat Bireuen dipimpin oleh Na'am Rasmadin, H. Affan, dan H. Marzuki Abu Bakar,
9. Barisan Rakyat Lhok Seumawe dipimpin oleh T. A. Bakar,

10. Barisan TPI (Tentara Pelajar Islam) Batalyon III Aceh Utara dipimpin oleh Nur Nekmat, M. Sabi, dan Hasry, dan
11. Barisan Rakyat Takengon dipimpin oleh Teungku Muhammad Saleh Adry dan Letnan Dua Ibnu Hajar.

Sehari sebelum pertempuran, semua pemimpin pasukan API/TKR dan Laskar Pejuang, seperti Divisi Tgk. Chik Di Tiro (Mujahaidin), Divisi Rencong, Divisi Tgk. Chik Paya Bakong, Batalyon Berani Mati, Komando Resimen Tentara Pelajar Islam, dan Pasukan Barisan Pemuda Bersenjata, dikumpulkan di Wakil Markas Daerah III API/TKR Bireuen yang dipimpin oleh Kapten Teuku Hamzah.

Diinstruksikan bahwa setiap pasukan, besoknya pukul 10.00 pagi sudah berada di pos lengkap dengan senjata. Setiap pasukan bertanggung jawab atas tugas-tugas yang telah diinstruksikan. Kontak dengan Lhok Seumawe terus dilakukan untuk memantau apakah kereta api yang membawa pasukan Jepang sudah mulai berangkat. Pukul 12.30 siang, 24 November 1945, kereta api yang membawa satu batalyon tentara Jepang meluncur menuju Bireuen. Masinisnya adalah orang Indonesia, segera melompat meninggalkan kereta api setelah melihat kereta api yang ditumpanginya menjadi sasaran tembak pejuang Aceh di Kampung Pante Gajah. Serdadu Jepang segera melepaskan tembakan ke arah masinis yang berusaha kabur itu, tetapi tidak mengenai sasaran karena setiba di tanah, masinis segera berlindung di dalam parit.

Masinis digantikan oleh seorang Jepang yang berusaha menghentikan kereta api tetapi rel di belakang kereta api itu sudah dibongkar sehingga kereta api tidak dapat maju dan mundur. Sejalan dengan pembongkaran rel di belakang kereta api itu muncul pula tembakan-tembakan ke arah kereta api dari segala arah. Serdadu Jepang berlarian dan mencari perlindungan

di pematang-pematang sawah. Dua kompi API dari Kutaraja yang dipimpin oleh T. Humid Azwar tiba di tempat kejadian dan langsung megambil alih kendali. Sebelumnya penyerangan dipimpin oleh T. Hamzah Samalanga.

Bersamaan dengan kedatangan Kepala Staf API, T. Hamid Azwar, dibawa serta Muramoto dari Sigli, ia diperlukan untuk menjadi juru bahasa merangkap penghubung alias juru damai. Setelah mendapat hubungan dengan komandan Jepang (*Ibihara-tai*), diadakan perundingan untuk membicarakan tuntutan rakyat. Jepang diminta agar menyerahkan senjata, sebagai imbalannya keselamatan mereka dijamin. *Ibihara-tai* sendiri sebenarnya sudah menyetujui tuntutan tersebut, tetapi beberapa orang komandan bawahannya menentang, sehingga menimbulkan percekcoakan di antara mereka.

Keesokan harinya, 26 November 1945, Jepang mengibarkan bendera putih, pertanda menyerah. Pada peristiwa tersebut banyak jatuh korban di kedua belah pihak. Komandan pasukan Jepang melakukan harakiri dengan pedang samurai. Sebanyak 320 pucuk senjata diserahkan kepada API beserta dengan perlengkapan-perengkapan lain. Pertempuran di Krueng Panjo dinilai sebagai pertempuran bersejarah, karena telah membangkitkan kepercayaan diri yang besar di kalangan pejuang Aceh karena mampu memaksa tentara Jepang mengangkat bendera putih sebagai tanda menyerah.

Tentara Jepang kemudian menyerbu ke wilayah Aceh Timur, pihak TKR mendatangkan pasukan tambahan dari Kutaraja, Bireuen, Takengon, Lhok Seumawe, dan Lhok Sukon, sedangkan pasukan TKR dan laskar rakyat yang berada di bagian timur, seperti dari Idi dipusatkan di sekitar kota Langsa. Tujuan

utama Jepang adalah menguasai kembali Kuala Simpang dan Langsa. Terjadilah pertempuran besar-besaran di sekitar kedua tempat tersebut, seperti Kampung Durian dan Kampung Tupak pada 24 Desember 1945, Kampung Upak dan Bukit Meutuah pada 25 Desember 1945. Setelah pertempuran berlangsung sekitar satu bulan, pada 20 Januari 1946, TKR bersama dengan laskar rakyat berhasil mendesak tentara Jepang kembali ke Medan. Dengan demikian, daerah Aceh berhasil dibersihkan dari tentara Jepang dan kekalahannya itu merupakan pukulan berat tidak saja bagi Jepang tetapi juga bagi Sekutu.

BAB V

PERJUANGAN RAKYAT BIREUEN PADA MASA REVOLUSI KEMERDEKAAN

A. Pembentukan Organisasi Kemiliteran dan Kelaskaran

Sejak berita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia diterima di daerah Aceh, para pemimpin Aceh telah memikirkan ke arah pembentukan organisasi pemerintahan dan keamanan di daerah Aceh. Hal itu tidak lain dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang baru diproklamlirkan. Inisiatif itu pada mulanya datang dari beberapa mantan perwira *Gyugun* di Kutaraja (Banda Aceh), yaitu Syamaun Gaharu, Nyak Neh Rika, Usman Nyak Gade, Teuku Hamid Azwar, Said Usman, Bachtiar Idham, dan lain-lain.

Pada 27 Agustus 1945 (hari Senin) para perwira tersebut berkumpul di Hotel Sentral jalan Muhammad Jam, Kutaraja (kini Banda Aceh). Pertemuan itu menghasilkan keputusan, yaitu mengirimkan utusan yang terdiri atas Syamaun Gaharu dan Teuku Hamid Azwar kepada Teuku Nyak Arief untuk mendengarkan pendapatnya mengenai gagasan mereka. Hasil konsultasi itu ternyata sangat memuaskan, karena Teuku Nyak Arief menyambut baik ide pembentukan suatu badan (organisasi) yang dapat mempersatukan semua mantan *Gyugun*, *Heiho*, *Tokubetsu Hikojo Kinmutai*, dan *Tokubetsu Keisatutai*. Disarankan juga oleh Teuku Nyak Arif supaya dalam pembentukan itu diikutsertakan mantan tentara KNIL (*Koningklijk Nederlandsch Indische Leger*), tentara Hindia Belanda, sehingga mereka dapat menyumbangkan pengalaman dan keahliannya bagi negara.

Setelah melakukan pembicaraan yang mendalam melalui beberapa kali musyawarah, akhirnya disepakati untuk mendirikan Angkatan Pemuda Indonesia (API) di seluruh daerah Aceh. Untuk itu, pada awal Oktober 1945 disusunlah

secara definitif struktur dan susunan pengurus API di Aceh, sebagai berikut:

1. Markas Daerah berkedudukan di Kutaraja (markasnya mula-mula di Hotel Sentral kemudian berpindah ke toko J. Pinke Ujong Peunayong, Toko B. Naas Sabang Coy, Asrama Kuta Alam, dan akhirnya ke Asrama Keuraton). Susunan pengurus API itu adalah: Ketua/Komandan: Syamaun Gaharu, Kepala Staf: Teuku Hamid Azwar, Sekretaris/Anggota: Ishak, Anggota: Nyak Neh Rika, Said Usman, Said Ali, T. M. Samalanga, T. Sarong, Bachtiar Idham, T. Abdulah, dan Saiman.
2. Wakil Markas Daerah, untuk sementara dibentuk hanya 4 daerah, yaitu:
3. Wakil Markas Daerah Aceh Besar dan Pidie dipimpin oleh Nyak Neh,
4. Wakil Markas Daerah Aceh Utara dan Aceh Tengah, dipimpin oleh T. M. Syah,
5. Wakil Markas Daerah Aceh Timur, dipimpin oleh Bachtiar, dan
6. Wakil Markas Daerah Aceh Barat dan Aceh Selatan, dipimpin oleh Teuku Cut Rahman.

Setelah staf pengurus API daerah Aceh disusun, pada 6 Oktober 1945, pukul 13.00 waktu setempat, dikeluarkan seruan kepada seluruh lapisan masyarakat supaya membantu dan menyokong API yang baru dibentuk itu. Seruan itu mengejutkan pemerintah Jepang yang masih berada di Kutaraja pada waktu itu.

Seruan itu berbunyi:

Seroean Tanah Air

Di Seloeroeh Atjeh telah berdiri Angkatan Pemoeda Indonesia (A.P.I)

A.P.I akan menjadi dasar tentara Repoebliek Indonesia

A.P.I akan mempertahankan dan mendjaga keamanan

oemoem

SOKONGLAH A.P.I

Bentoklah Badan Penjokong A.P.I (Bapa) di segala pelosok.

Bapa moesti berdiri

di samping A.P.I kalau tidak A.P.I ta' moengkin bergerak.

Kaoem hartawan !! Lemparlah keradjaan toean-toean pada ini waktoe oentoek Indonesia Merdeka.

Kaoem bangsawan !! Bangoen, sadar, dan toendjanglah tjita-tjita jang sutji ini.

Segala lapisan dan segala golongan ! Korbanlah harta, tenaga, dan pikiran harta djiwa sekalipoen asal oentoek kemerdekaan INDONESIA.

A.P.I mempoenjai poeloehan pasoeakan dan riboean Angkatan Pemoeda di seloeroeh Atjeh.

A.P.I menoenngoe B.A.P.A Markas Daerah Angkatan Pemoeda

Indonesia (M.D.A.P.I)

Lahirnya API di daerah Aceh menjadi dasar terbentuknya tentara negara Republik Indonesia di Aceh. Proses selanjutnya API berubah nama menjadi TKR (Tentara Keamanan Rakyat kemudian menjadi Tentara Keselamatan Rakyat), lalu menjadi TRI (Tentara Republik Indonesia), dan akhirnya menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia), sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat. Peranan API dalam mengembangkan tugasnya adalah mempertahankan Kemerdekaan Indonesia serta menjaga keamanan dan ketentraman umum.

Pada September 1945, mantan anggota KNIL (Tentara Hindia Belanda) juga mengambil inisiatif untuk membentuk Polisi Istimewa di Kutaraja. Pasukan kepolisian itu pada bulan Februari 1946 dilebur menjadi pasukan meriam, dipimpin mantan Letnan II KNIL, Lintong, yang berasal dari daerah Minahasa (Sulawesi Utara). Pasukan meriam itu dilengkapi

dengan senjata-senjata berat yang direbut dari Jepang, terutama dalam pertempuran yang terjadi di Lhok Nga pada Desember 1945.

Di pihak lain, para pemuda yang tidak tergabung dalam API juga berusaha mendirikan Badan Perjuangan Rakyat dengan tujuan sama, yaitu mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia dari segala rongrongan musuh, baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Di kantor surat kabar *Atjeh Sinbun*, para pengasuh surat kabar tersebut, seperti Ali Hasjmy dan T.A. Talsya sejak berita proklamasi diterima, mereka mendirikan organisasi pemuda yang diberi nama Ikatan Pemuda Indonesia (IPI), pada 4 Oktober 1945. Susunan pengurus IPI yang pertama adalah: Ketua I dan II: Ali Hasjmy dan Teuku Manyak Arif; Setia Usaha I dan II: Usman dan Anwar Manyak; Bendahara: Zaini Bakry; Pembantu-pembantu: M. Saleh Rahmany, Muhammad Z.Z., Tuanku Abdul Wahab, dan Muhammad Junet. Komisaris: Tuanku Hasyim, Ghazali Yunus, Murdani, Teungku Idris, Asman, Potan Harahap, Muchtar Lubis, Said Ahmad Dahlan, dan H. Jamin.

Pada 6 Oktober 1945, IPI berubah nama menjadi Barisan Pemuda Indonesia (BPI) dengan susunan pengurus yang baru, yaitu Ketua Umum, Ketua I dan II: Ali Hasjmy, M. Saleh Rahmany, dan Muhammad Z.Z. Setia Usaha Umum: I, II, III, dan IV terdiri atas: Tuanku Hasyim, Potan Harahap, Sulaiman Arsjad, Abu Bakar Sang Syarif. Bendahara: H. Jamin. Badan Keuangan, ketua: Muhammad Junet. Badan Penerangan, ketua: Said Ahmad Dahlan. Badan Penerangan Tenaga, ketua: T. Manyak Arif. Badan Keamanan, ketua: Saumi dan Zaini Bakry. Badan Kepanduan, ketua: Murdani, dan Badan Palang Merah, ketua: Asman.

Terbentuknya API dan BPI menjadi dasar organisasi kemiliteran dan perjuangan di Aceh. Dalam waktu relatif singkat kedua organisasi itu meluas ke seluruh daerah. Oleh

karena itu, pada tanggal 6 Oktober 1945, keluar seruan API dan terbentuk susunan pengurus BPI. Atjeh Syu Tyokan, S. Iino, mengundang para pemimpin Aceh ke rumahnya untuk membicarakan situasi Kutaraja khususnya dan daerah Aceh umumnya. Mereka yang hadir pada malam itu dari pihak Aceh adalah Teuku Nyak Arief (Residen Daerah Aceh), Tuanku Mahmud (Ketua KNI Daerah Aceh), Teungku Muhammad Daud Beureu-eh (Ketua PUSA dan KNI Daerah Aceh), Syamaun Gaharu (Ketua Markas API), Ali Hasjmy (Ketua BPI), Ahmad Jeunieb (Asisten Residen RI Aceh Besar), Teuku Tjut Hasan (Konsul Muhammadiyah Daerah Aceh), serta Said Abu Bakar (pelopor *Fujiwara-Kikan*); dari pihak Jepang adalah Tyokan S. Iino, Atjeh Syuseityo S. Masubutyi, Keimutyo (Kepala Polisi), Bo-ci Taityo (Kepala Pertahanan). Kempetei Taityo (Kepala Polisi Militer), dan juru bahasa T. Eiri.

Pada pertemuan itu, S. Iino menegaskan bahwa meskipun Jepang telah kalah, namun masih diberi kuasa oleh Sekutu dan bertanggung jawab dalam hal pemerintahan dan keamanan daerah Aceh. Oleh karena itu, segala kegiatan yang dilakukan harus dengan seizin pemerintah Jepang. API dan BPI yang telah didirikan tanpa seizinnya dan mengarah seperti organisasi ketentaraan segera dibubarkan. Teuku Nyak Arief menjawab yang intinya, Jepang harus tahu diri karena sudah kalah dan tidak berhak lagi mengatur rakyat Indonesia. Syamaun Gaharu menegaskan bahwa tidak seorang pun berhak memerintahkan untuk membubarkan API, kecuali kalau Residen Negara Republik Indonesia yang memerintahkannya. Pertemuan pada malam itu gagal dan merupakan pukulan berat bagi pemerintah Jepang di daerah Aceh.

Pada 12 Oktober 1945, API daerah Aceh diresmikan menjadi Pasukan Resmi Negara. Desember 1945 API dirubah namanya menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan

dibentuk Divisi V/TKR Komandemen Sumatera dengan susunan staf, Komandan: Kolonel Syamaun Gaharu, Wakil: Mayor Nyak Neh Rica, Kepala Staf: Mayor T. A. Hamid Azwar, Ajudan Umum: Mayor Husin Yusuf, Kepala Perlengkapan dan Keuangan: Mayor T. M. Daud, Polisi Tentara: Kapten Sabar Daruk. Divisi V Komandemen Sumatera membawahkan tiga Resimen, Resimen 1 berkedudukan di Kutaraja dengan komandan Mayor T. Muhammad Syah dan Kepala Staf Mayor A.W. Makmur. Resimen II berkedudukan di Bireuen dengan Komandan Mayor Teuku Cut Rahman dan Kepala Staf: Kapten Ibrahim Hatta. Resimen III berkedudukan di Meulaboh dengan Komandan Mayor Muhammad Nasir dan Kepala Staf Mayor T. Usman Yacop.

Pada 9 Oktober 1945, Teuku Nyak Arief memerintahkan supaya API harus disempurnakan lagi, sehingga benar-benar mengarah sebagai organisasi ketentaraan yang lengkap. Oleh karena itu, Syamaun Gaharu segera melaksanakan perintah itu. Wakil Markas Daerah (WMD) yang sebelumnya hanya 4 buah ditambah menjadi 8 WMD dan pada tiap-tiap WMD dibentuk 3 sampai 4 pasukan yang dipimpin oleh seorang komandan pasukan. Kemudian disusul pula dengan "Soerat Edaran" yang ditujukan kepada mantan prajurit *Gyugun, Heiho*, dan lain-lain supaya dalam waktu singkat segera mendaftarkan diri pada WMD atau pasukan setempat.

Wakil Markas Daerah yang baru itu terdiri atas Markas Daerah API berkedudukan di Kutaraja dengan Komandan: Syamaun Gaharu, Kepala Staf: T. A. Hamid Azwar, Sekretaris Husin Yusuf, Anggota: Nyak Neh Rica, Said Usman, Said Ali, T. M. Daud Samalanga, Teuku Sarong, Bachtiar Idham, Teuku Abdullah, dan Saiman. Wakil Markas Daerah terdiri atas Wakil Markas Daerah - I (WMD-I) berkedudukan di Kutaraja dipimpin oleh Nyak Neh dengan

komandan pasukan: Said Ali (Kutaraja), Usman Nyak Gade (Kutaraja), Said Abdullah (Kutaraja), Teuku Manyak (Seulimuem). Wakil Markas Daerah II (WMD-II) berkedudukan di Sigli dipimpin oleh T.A. Rahman, komandan pasukan: T. Rica (Sigli), Abdul Gani (Sigli), T. Abdurrahman (Lammeulo), dan Hasballah Haji (Meureudu).

Wakil Markas Daerah III (WMD-III) berkedudukan di Bireuen, dipimpin oleh Teuku Muhammad Daud Samalanga, komandan pasukan: Teuku Hamzah (Samalanga), Agus Husin (Bireuen), dan Husin Yusuf (Bireuen). Wakil Markas Daerah IV (WMD-IV) berkedudukan di Lhoksukon, dipimpin oleh Teuku Muhammad Syah/Ibrahim Hatta, komandan pasukannya: Hasbi Wahidi (Panton Labu), Nurdin Hatta, Ajad Musi (Lhoksukon), A. Gani Dadeh, T. Usman Mahmud (Lhokseumawe), T. Zulkifli, T. Yacop Muli (Lhokseumawe). Wakil Markas Daerah V (WMD-V) berkedudukan di Langsa, dipimpin oleh Bachtiar/Dahlan, komandan pasukan: Ayub (Langsa), Nurdin Sufi (Idi), Daud Malem, B. Nainggolan (Kuala Simpang), Abu Samah, Petua Husin (Langsa).

Wakil Markas Daerah VI (WMD-VI) berkedudukan di Kutacane, dipimpin oleh Muhammad Dien, komandan pasukan: Bahrum, Maaris Maat, A. Rahim, A. Jalim Umar. Wakil Markas Daerah VII (WMD-VII) berkedudukan di Meulaboh, dipimpin oleh Teuku Usman Yacob/Teuku Cut Rahman, komandan pasukan: Hasan Ahmad (Meulaboh), Raub, Hamidi Hs. (Suak Timah), A. Hanafiah, Teuku Gadong, A. K. Jailani (Calang). Markas Daerah VIII (WMD-VIII) berkedudukan di Tapak Tuan, dipimpin oleh M. Nasir/Nayak Adam Kamil, komandan pasukan: Abdullah Sani (Tapak Tuan), H.M. Syarif (Blang Pidie), B.B. Jalal (wakil), Nyak Hukum (Bakongan), Iskandar (wakil).

Sehubungan dengan terbentuknya API/TKR, beberapa pemimpin partai dan pemuda membentuk pula barisan-barisan kelayakaran, seperti Barisan Pemuda Indonesia (BPI), Lasykar Mujahidin, dan Lasykar Hisbullah. Tujuan mereka sama, yaitu untuk membantu pemerintah dalam bidang pertahanan. Kesatuan kelayakaran tersebut pada umumnya dipimpin oleh tokoh-tokoh masyarakat yang duduk dalam lembaga-lembaga pemerintah.

Kesatuan kelayakaran yang terdapat di Aceh terdiri atas 3 Divisi dan 2 Resimen Tentara Pelajar, yaitu Divisi X Mujahidin Teungku Cik di Tiro yang dibentuk pada tahun 1947. Komandan Divisi X/Teungku Cik di Tiro adalah Cek Mat Rahmany, Kepala Staf: Abdul Muthalib, Kepala Seksi I: Abdul Muthalib, Kepala Seksi II: Ilyas Leube, Kepala Seksi III: A. Hamdany, Kepala Seksi IV: Hasballah Asyek, Kepala Seksi V: Said AH, Kepala Seksi VI: Ajat Musi, Kepala Seksi VII: Yusuf Bakhrum, Kepala Seksi VIII: Yusuf H. Saleh; dan Penasihat: Hasballah Daud. Divisi X/Teungku Cik di Tiro membentuk 5 buah resimen, Resimen III mencakup wilayah Bireuen, Lhokseumawe, dan Langsa. Komandan Resimen III adalah Abdul Muthalib (Bireuen), Wakil: Teungku Yusuf Berawang. Komandan Batalyon I: Teungku Abdul Wahab (Langsa), Wakil: M. Amin Bugeh. Komandan Batalyon II : Teungku Jakfar (Lhokseumawe) dan Wakil: Teungku Hasan Bambi.

Musyawarah ulama di Mesjid Baiturrahman Kutaraja (Banda Aceh) dibicarakan pula mengenai pertahanan Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada musyawarah itu berhasil pula dibentuk Barisan Hisbullah. Ketua I terpilih Teungku Muhammad Daud Beureu-eh, Ketua II: Teungku

Ahmad Hasballah Indrapuri, Setia Usaha: T. M. Amin, Teungku Syeh Marhaban, dan Sulaeman Mahmud.

Divisi Teungku Cik Paya Bakong bermarkas di Idi (Aceh Timur), didirikan oleh Amir Husin Almujaheed. Panglima Divisi Teungku Cik Paya Bakong tersebut adalah Teungku Amir Husin Almujaheed.

Organisasi Pemuda Pelajar Islam di Aceh telah lahir sejak awal kemerdekaan, bernama GAPIDA (Gabungan Pelajar Islam Daerah Aceh) berpusat di sekolah Normal Islam Bireuen. Komando TPI Resimen Aceh berada langsung di bawah Komando Divisi X TNI yang dipimpin oleh Cek Mat Rahmany. Komando TPI Resimen Aceh Divisi X, Komandan: A.K. Jakobi, Wakil: M. Saleh Banta, Kepala Staf Umum: M. Hasan Ben, Wakil Kepala Staf: M. Amin Hanafiah. Komando TPI Resimen Aceh membentuk 6 buah batalyon. Batalyon III berkedudukan di Bireuen, dengan Komandan Batalyon: Yunus Hassan, Kepala Staf: S. Umar Mahmud, Komandan-komandan Kompi: Hasri, Jakfar Ben, Abu Bakar Hanafiah, dan A. Gani. Selain itu, adapula Komando Resimen TRIP (Tentara Pelajar Republik Indonesia) dengan Komandan Resimen Yahya Zamzami.

Sejak 7 Januari 1945, Tentara Keamanan Rakyat dirubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Berdasarkan Maklumat Pemerintah RI, sejak 25 Januari 1946 Tentara Keselamatan Rakyat (TKR) dirubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Sesuai dengan perubahan tersebut, pada 17 Februari 1946, Divisi V TKR Komandemen Sumatera menjadi Divisi V/TRI Komandemen Sumatera. Susunan Staf yang dilantik adalah Komandan Divisi:

Perjuangan Rakyat Bireuen Pada Masa Revolusi Kemerdekaan

Kolonel Syamaun Gaharu, Kepala Staf: Mayor T. A. Hamid Azwar, Ajudan Staf Umum: Mayor Husin Yusuf, Kepala Intendance: Mayor Said Usman, Kepala Keuangan: Mayor Bachtiar, Kepala Genie: Mayor T. Hamzah, Kepala Polisi Tentara: Mayor Sabar Datuk. Divisi V/TRI itu juga membentuk Resimen yang terdiri atas tiga resimen. Resimen II berkedudukan di Bireun dengan komandan: Mayor T. Cut Rahman dan Kepala Staf: Kapten Nurdin Sufi.

Pada 12 Maret 1946, Staf Divisi V/TRI Komandemen Sumatera mengalami perubahan, yaitu Anggota Staf Umum dijabat oleh Teungku Amir Husin Almujaheed dengan pangkat Jenderal Mayor Kehormatan. Komandan Divisi merangkap Kepala Pertahanan dijabat oleh Kolonel Husin Yusuf. Wakil Komandan Divisi dijabat oleh Letnan Kolonel Nurdin Sufi, dan Kepala Staf Divisi dijabat oleh T. A. Hamid Azwar.

Susunan staf Komando Divisi V/TRI Komandemen Sumatera sebagai berikut: Komandan Divisi: Kolonel Husin Yusuf, Wakil Komandan: Lekkol Nurdin Sufi, Kepala Staf: Mayor Bachtiar, Organisasi: Mayor M. Nazir, Algemeene Sekretaris: Kapten Ibrahim Hatta, Siasat: Kapten Abdul Manaf, Polisi Tentara: Kapten Abubakar Majid, Penerangan: Mayor A. Gani Usman, Pendidikan: Mayor M. Nur El Ibrahim, dan Mayor Supeno, Genie/Pengangkutan: Kapten Teuku Hamzah, PHB: Lettu T. Ibrahim, Perlengkapan dan Keuangan: Mayor T. M. Daud, kemudian diganti oleh Mayor Usman Adamy, Kesehatan: Mayor dr. Muhammad Mahyudin.

Divisi V TRI yang baru itu membentuk 3 Resimen dan 9 Batalyon. Resimen II berkedudukan di Bireuen, dengan Komandan Resimen: Mayor T. Cut Rahman dan Kepala Staf:

Kapten Ali Hasan HS. Resimen II di Bireuen terdiri atas 4 Batalyon. Batalyon 4 Divisi V/TRI bekedudukan di Bireuen: Kapten A. M. Namploh, Kompi 1: Letda Syahkubat Mahmud di Bireuen, Kompi 2: Letda Nyak Hasan di Samalanga, Kompi 3: Letda Taharuddin di Takengon, Kompi 4: Letda Marijan di Takengon. Batalyon 5 di Lhokseumawe: Kapten Hasbi Wahidi, Kompi 1: Letda Nurdin Hatta, Kompi 2: Letda A. Gani Dadeh, Kompi 3: Letda T. Usman Mahmud, Kompi 4: Letda T. Jacub Muli. Batalyon 6 di Langsa: Kapten Ajad Musi, Kompi 1: Kapten M. Hanafiah di Idi, Kompi 2: Letda A. Hanafiah di Idi, Kompi 3: Letda Daud Malem di Peureulak, Kompi 4: Letda Dahlan di Peureulak. Batalyon 9 di Kuala Simpang: Kapten Alamsyah, Kompi 1: Lettu Nurdin Hatta. Kompi 2: Lettu Usman Thamin. Kompi 3: Letda A. Kadir dan Kompi 4: Letda Benbok.

Dalam rangka memperkokoh pertahanan negara, pada 26 April 1947 Divisi Gajah I dan Divisi Gajah II digabung menjadi satu divisi, yaitu Divisi X/TRI Komandemen Sumatera. Peresmian tersebut dilakukan oleh Jenderal Mayor R. Suharjo Harjo Wardoyo selaku Panglima TRI Komandemen Sumatera, pada mulanya berkedudukan di Pematang Siantar kemudian berpindahkan ke Bireuen.

Susunan komando dan staf Divisi X/TRI Komandemen Sumatera sesuai dengan penetapan Panglima TRI Komandemen Sumatera No. 31/Pres/47 tanggal 25 April 1947, sebagai berikut: Panglima/Komandan: Kolonel Husin Yusuf, Kepala Staf: Kolonel H. Sitompul, Kepala Seksi I/Operasi: Kolonel H. Sitompul, Kepala Seksi II/Organisasi: Letnan Kolonel M. Nasir, Kepala Seksi III/Penyelidikan dan

Penerangan: Kapten Yakob Lubis, Kepala Seksi IV/Artilleri dan Alat-alat Artilleri: Letnan Kolonel Nurdin Sufi, Kepala Seksi V/Komando Geni dan alat-alat Geni, Kepala Seksi VI/Kesehatan: Mayor dr. Makhjudin, Kepala Seksi VII/Pengangkutan dan lalu lintas: Kapten T. Hamzah, Kepala Seksi VIII/Polisi Tentara: Mayor Siagian/Kapten A. Muzakir Walad, Kepala Seksi IX/Perhubungan: Kapten Y. Sidhahuruk, Kepala Seksi X/Administrasi dan Penyantunan: Mayor Usman Adamy.

Seksi I, II, III IV, V, VII, VIII, dan IX Divisi X/TRI berkedudukan di Bireuen, Seksi VI berkedudukan di Kutaraja, dan Seksi X berkedudukan di Langsa. Susunan resimen terdiri atas tujuh resimen, resimen 5 berkedudukan di Bireuen di bawah pimpinan Kolonel T. Cut Rahman.

Pada 3 Juni 1947 pemerintah mengeluarkan penetapan yang dimuat dalam Berita Negara No. 24 tahun 1947, antara lain berbunyi:

- a. Mulai tanggal 3 Juni 1947 disahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia,
- b. Segenap Angkatan Perang dan segenap lasykar-lasykar bersenjata mulai saat ini dimasukkan serentak ke dalam Tentara Nasional Indonesia, dan
- c. Pucuk pimpinan Tentara Nasional Indonesia dijabat oleh Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia.

Surat Keputusan Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo, No. GM-59/5/Pers tanggal 13 Juni 1948 terhitung 1 Juni 1948, terbentuklah Divisi X/TNI Komandemen Sumatera. Susunan Komando dan Staf Divisi sebagai berikut: Komandan Divisi: Teungku Muhammad Daud Beureueh,

kemudian sejak Oktober 1948 diganti oleh Kolonel Husin Yusuf, Kepala Staf: Letnan Kolonel Cek Mat Rahmany, Kepala Seksi I/Operasi: Letnan Kolonel Cek Mat Rahmany, Kepala Seksi II/Organisasi: Letkol M. Nazir, Kepala Seksi III/Penyelidikan dan Penerangan: Kapten A. Bakar Madjid, Kepala Seksi IV/Artileri dan Alat-Alat Artileri: Mayor Nyak Neh, Kepala Seksi V/Komandan Genie dan Alat-Alat Genie: Mayor Hasan Ahmad, Kepala Seksi VI/Jawatan Kesehatan: Mayor dr. Sudono, Kepala Seksi VII/Jawatan Angkutan Lalu Lintas: Mayor Teuku Hamzah, Kepala Seksi VIII/Jawatan Polisi Tentara: Mayor A. Muzakir Walad, Kepala Seksi IX/Jawatan Perhubungan: Letnan Satu Teuku Ibrahim, Kepala Seksi X/Jawatan Administrasi dan Penyantunan: Kapten M. Husin, Kepala Jawatan Intendance: Kapten M. Adam, Kepala Jawatan Penerangan: Mayor A.G. Mutyara, Kepala Jawatan Agama: Mayor Z. Arifin Abbas.

Divisi X/TNI Komandemen Sumatera yang baru itu juga membentuk resimen-resimen, yaitu terdiri atas 5 resimen. Resimen II Divisi X/TNI Komandemen Sumatera berkedudukan di Bireuen, dengan Komandan Resimen Mayor A. Rahman dan Kepala Staf Mayor Alwin Nurdin.

Sejalan dengan perkembangan pembentukan tentara maka untuk memenuhi kebutuhan teknis militer, terutama personil yang terampil, terlatih, dan sebagainya. Komando Divisi Gajah-I membuka/mengadakan berbagai macam pendidikan militer dan pelatihan lainnya, di antaranya adalah Sekolah Kader Infantri di Bireuen.

Panglima Divisi Gajah-I, Kolonel Husin Yusuf, meresmikan/membuka pendidikan Sekolah Kader Infantri Divisi Gajah-I di Bireuen yang dihadiri oleh para komandan dan undangan lainnya. Panglima Kolonel Husin Yusuf dalam amanatnya mengatakan, "Keluarkanlah keringat kamu di Medan latihan yang sebanyak-banyaknya, supaya kamu mengeluarkan sedikit darah di Medan pertempuran".

Mata pelajaran yang diajarkan pada sekolah tersebut di antaranya: dasar-dasar kemiliteran, membaca peta medan tempur, taktik perang gerilya, ilmu perang di medan terbuka, sejarah kebangkitan nasional, ilmu ketatatnegaraan, perjuangan Indonesia di forum internasional, dan lain-lain yang ada kaitannya dengan perang. Siswa lulusan Sekolah Kader Infantri Bireuen itu, banyak yang dikirim ke pertempuran Medan Area.

B. Peranan Masyarakat Bireuen dalam Perang Medan Area

Menurut perjanjian internasional setelah Perang Dunia II, pengawasan wilayah-wilayah jajahan yang sebelumnya dikuasai oleh Jepang, pengurusannya diserahkan kepada Sekutu. Indonesia yang sudah menyatakan kemerdekaan dan sudah sampai pula ke forum internasional, Sekutu hanya bertindak seperti wasit. Apabila Indonesia yang menyatakan kemerdekaan tersebut sanggup dan mampu menata masyarakat serta menjaga keamanan, pihak PBB akan memberikan pengakuan dan pengesahannya. Namun sebaliknya, apabila kekacauan masih terjadi, kemerdekaan wilayah tersebut perlu dibicarakan lagi oleh Dewan Keamanan PBB karena masalah itu menyangkut masalah ketertiban dunia.

Untuk memperoleh simpati dunia internasional, pemimpin Indonesia mempersilakan anggota Dewan Keamanan PBB untuk memberikan penilaian tersebut. Hal itu juga sekaligus memberikan kesempatan kepada Sekutu untuk melihat keadaan di Indonesia pada waktu itu. Sekutu pun mempercayakan kepada Inggris, oleh karena itu mendaratlah wakil Sekutu di Medan pada 10 Oktober 1945.

Dalam kenyataannya, di belakang T.E.D. Kelly membonceng pula tentara Belanda. Tentara Belanda itu menyamar sebagai anggota Palang Merah Internasional yang akan meninjau tawanan perang (interniran Belanda oleh

Jepang), sehingga tidak mungkin untuk dihalangi. Tentara Belanda ternyata kemudian terus membangun kekuatan untuk mengambil alih kekuasaannya yang pernah dirampas oleh Jepang.

Menghadapi kenyataan semacam itu, Pemerintah Republik Indonesia Sumatera melakukan taktik perimbangan. Di satu sisi melakukan hubungan baik dengan Inggris untuk membicarakan keamanan dan ketertiban wilayah. Pada sisi lain melawannya dalam bentuk gerilya kontra-aksi terhadap perilaku Inggris yang mendukung Belanda dan memprovokasi rakyat Indonesia.

Di Medan, setelah mereka mendapatkan perlawanan dari rakyat, aksi-aksi provokasi Belanda pun berkurang untuk sementara waktu. Situasi semacam itu ternyata dijadikan sebagai alasan oleh Inggris untuk melakukan penertiban, sehingga T.E.D. Kelly mengeluarkan pengumuman tentang larangan membawa senjata bagi penduduk Indonesia.

Larangan T.E.D. Kelly itu justru mendapat reaksi dari rakyat Indonesia. Akan tetapi, pemerintah RI di Sumatera Timur (Sumatera Utara) secara arif mengeluarkan kebijakan politik sebagai berikut:

1. Di dalam kota Medan kita berusaha ikut menjaga ketertiban walaupun pihak Belanda dengan NICA berusaha mengadakan provokasi, dan
2. Di wilayah luar kota, di antaranya di kawasan Medan Area, aksi-aksi Belanda mendapat jawaban yang setimpal. Di luar kota Medan itulah gerilyawan dan pejuang bersenjata memperkokoh diri, baik yang tergabung dalam kesatuan TKR maupun lasykar-lasykar dan barisan-barisan lainnya.

Inggris yang menyokong Belanda merasa kewalahan dan tidak sanggup menjalankan tugasnya sebagai utusan Sekutu. Akhirnya keamanan di luar kota Medan diserahkan kepada Jepang. Keputusan diambil antara pemimpin tentara Sekutu untuk seluruh Sumatera, Mayor Jenderal Chambert,

Sir Philips Cristison, dan Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly, kemudian disampaikan kepada Letnan Jenderal Tanabe, Panglima Tentara Jepang di Sumatera pada 26 November 1945.

Pada 1 Desember 1945, Inggris memasang patokan-patokan di sekeliling kota Medan yang bertuliskan: Fixed boundaries of protected Medan Area. Tapal batas yang dibuat oleh Inggris itulah yang memisahkan daerah kota, yaitu wilayah yang menjadi tanggung jawab Inggris dengan area di luarnya yang keamanannya menjadi tanggung jawab Jepang. Tulisan yang ditulis pada patok-patok itu akhirnya menjadi populer dengan sebutan Medan Area.

Pada akhir tahun 1946, ketika Resimen Lasykar Rakyat Medan Area (RLRMA) tersusun, gerakan gerilya di Medan mulai tertata dalam satu komando. Sementara itu, pihak Belanda pun semakin aktif melancarkan aksi kekerasan terhadap rakyat Indonesia.

Untuk mengimbangi gerak maju tentara Belanda, Divisi Gajah I/TRI Komandemen Sumatera yang bermarkas di Bireuen, diminta oleh Staf Umum Komandemen Sumatera untuk mengirimkan pasukan bantuan ke Medan Area. Kolonel Husin Yusuf selaku Komandan Divisi Gajah I TRI yang bermarkas di Bireuen memerintah Kapten Nukum Sanany untuk masuk ke kota Medan dan sekitarnya. Perintah itu dikeluarkan pada 4 November 1946, disaksikan oleh Kapten Alamsyah, Komandan Batalyon IX Resimen II/TRI Divisi Gajah I, ketika bersama Kapten Nukum Sanany menghadap Kolonel Husin Yusuf.

Pada 7-9 Januari 1947, diadakan pertemuan antara Divisi Gajah I, Divisi Gajah II, RLRMA di Bireuen. Mereka yang hadir pada pertemuan itu antara lain Letkol Abdullah Kartawinata wakil dari Komandemen Sumatera, Kolonel Hotnan Sitompul, Kolonel Husin Yusuf, Kapten Nip Karim dan beberapa orang lainnya. Pada pertemuan itu diputuskan:

1. Segera dibentuk suatu Komando Medan Area (KMA) yang dipimpin oleh seorang Perwira Tinggi TRI dan mengambil pimpinan Front Medan Area kepada KMA.
2. RLRMA dibubarkan dan menyerahkan tanggung jawab Front Medan Area kepada KMA.
3. Segera setelah KMA dibentuk, garis komando dijalankan menurut instruksi Komandemen Tentara Sumatera no 1/S-IIB-46, tanggal 5 Desember 1946. Dalam pertemuan di Bireuen itu, juga ditetapkan tugas-tugas yang harus segera dilaksanakan oleh Divisi Gajah II secara khusus, yaitu:
 1. Melaksanakan pertukaran komando tersebut serta menentukan orang-orang yang akan menempati jabatan-jabatan penting dalam KMA, dan
 2. Mengirim beberapa kesatuan TRI ke Front Medan Timur, Medan Tenggara, dan Medan Selatan.

Tugas yang secara khusus harus dilaksanakan oleh Divisi Gajah I adalah:

1. Membentuk Resimen Istimewa Medan Area (RIMA) yang terdiri atas tiga Batalyon bersenjata riil yang akan ditempatkan di Medan Barat-Medan Utara, dan tunduk di bawah Komando KMA, dan
2. Menambah kekuatan artileri yang sudah lebih dahulu menyusup di Medan Barat.

Pada 15 Januari 1947, Komandan RIMA, Mayor Teuku Cut Rahman, yang pernah menjabat Resimen V/TRI berkedudukan di Bireuen dan Kepala Staf TRI Divisi Gajah I, Mayor Bachtiar sudah berada di Binjai. Mereka memerintahkan para komandan pasukan untuk secara terbatas dan rahasia mempersiapkan gempuran meriam ke kota Medan. Setelah persiapan dilakukan secara matang, mulailah dilakukan gempuran terhadap Belanda di kota Medan.

Pada hari yang sama juga tiba di Binjai satu kompi

Perjuangan Rakyat Bireuen Pada Masa Revolusi Kemerdekaan

Lasykar Mujahidin Divisi Teungku Cik di Tiro yang berkekuatan 4 peleton, dipimpin oleh Teungku Thalib dan guru Basyah Samalanga. Dalam pertempuran yang dilakukan secara serentak itu, di pihak rakyat kehilangan beberapa orang pejuang, demikian juga pihak Belanda banyak mengalami korban jiwa.

Di samping pasukan reguler, masyarakat Bireuen juga membentuk kesatuan-kesatuan milisi yang berfungsi untuk menunjang kesatuan reguler. Hal itu seperti dilakukan oleh Guru Basyah Samalanga dengan Lasykar Mujahidinya ikut aktif dalam perang Medan Area.

C. Perjuangan Melalui Media Massa

Ketika Belanda melakukan Agresi Militer II disertai dengan merebaknya propaganda-propaganda dan kebohongan-kebohongan yang sangat mengganggu semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Untuk menangkis semua itu, pihak Indonesia memikirkan dan berusaha menambah media informasi, karena beberapa media massa yang ada di Aceh pada waktu itu masih dirasa kurang dalam menangkal rong-rongan Belanda terhadap Indonesia.

Amran Zamzami menyebutkan bahwa Belanda mempunyai corong-corong informasi seperti koran, radio, dan media-media propaganda untuk perang urat saraf (*psywar*). Pihak Indonesia pun tidak mau kalah dari Belanda. Kesadaran pentingnya media massa baik yang dicetak maupun lewat gelombang udara, penting perannya dalam membangkitkan

semangat untuk berpihak kepada pejuang bangsa Indonesia.

Dalam rangka menyebarkan informasi dan menangkai upaya Belanda mengacaukan lalu lintas berita dan untuk menjatuhkan semangat perjuangan para pejuang bangsa Indonesia, maka pihak Indonesia berusaha mendirikan Balai Penerangan dan Penyelidikan pada tanggal 17 Agustus 1946 di Medan. Badan itu bertujuan memberikan pendidikan dan penerangan kepada rakyat mengenai politik, ekonomi, kebudayaan, dan sarana penerangan untuk memperkokoh berdirinya Republik Indonesia. Badan itu juga menyelidiki sejauh mana upaya propaganda musuh dan bagaimana cara menangkai melalui penerangan.

Untuk menciptakan koordinasi dan pelacakan serta pengorganisasian informasi Balai itu, setiap sepekan sekali diadakan pertemuan dengan wartawan. Selain itu, juga melakukan pertemuan periodik dengan kekuatan sosial, seperti dengan golongan-golongan masyarakat dan militer. Sebagai upaya memperluas informasi, lembaga itu mengeluarkan brosur yang dikemas dalam bahasa Inggris dan bahasa Belanda. Brosur dalam bahasa Inggris berjudul *Free Indonesia*, terbit Mingguan untuk kebutuhan orang-orang asing. Pengelolaannya dilakukan oleh Abdul Madjid. Brosur dalam bahasa Belanda diberi nama *Vrijheid* yang dibagikan secara cuma-cuma.

Ketika Belanda melakukan agresi militer pertama tahun 1947, Pejabat Penerangan Keresidenan Aceh bersama Sub Penerangan Divisi-X mengeluarkan bulletin yang terbit harian. Buletin itu diberinama "Komunike Perang". Isinya

tentang laporan-laporan dari medan pertempuran. Bulletin itu setiap hari dicetak sebanyak 8.000 eksemplar dan dibagikan kepada masyarakat secara cuma-cuma. Balai Penerangan dan Penyelidikan yang sama juga didirikan di Kutaraja pada 1 Februari 1946. Pendirian lembaga itu sangat penting sebagai pusat informasi untuk mengolah dan menyampaikan berita-berita demi kepentingan perjuangan. Hal itu dimaksudkan dalam rangka mengimbangi bahkan menyaingi pemberitaan propaganda Belanda yang bertujuan melemahkan semangat juang bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya.

Lembaga yang baru berdiri itu diketuai oleh Said Ahmad Dahlan, kemudian digantikan oleh Oesman Raliby. Stafnya adalah T. Ali Basyah Talsya dan Tuwanku Ibrahim. Balai itu kemudian secara resmi menjadi Jawatan Penerangan Keresidenan Aceh. Jawatan itu selain bertugas menangkal propaganda musuh, juga melakukan penyuluhan dan penerangan kepada masyarakat serta mengelola siaran RRI Aceh.

Radio RRI Aceh dan Balai Jawatan Penerangan ternyata belum mampu menjawab tantangan musuh berupa siaran-siaran radio mereka yang merubah opini masyarakat, bahkan opini dunia tentang Indonesia. Untuk menjawab tantangan dan mengimbangi ofensif Belanda dalam penyiaran berita-berita lewat udara, baik yang disiarkan di Batavia (Jakarta) maupun di Medan. Mendorong bangsa Indonesia yang ada di Aceh untuk menambah pemancar radio.

Radio tersebut tidak didapatkan secara mudah.

Pendaratan pemancar radio dari Malaysia ke Aceh melalui Tanjungpura dengan menembus blokade Belanda yang menjaga ketat sekitar selat Malaka. Resikonya sangat besar, sehingga pendaratan harus dilakukan dengan cara penyeludupan. Penyeludupan itu dilakukan agar lolos dari blokade Belanda yang sedang berjaga-jaga di perairan selat Malaka. Dalam proses penyeludupan pemancar radio itu menyebabkan 12 orang pasukan TNI dari Batalyon B di bawah pemimpin Nip Karim gugur, karena berhasil ditembak oleh tentara Belanda. Dengan gugurnya beberapa prajurit itu menunjukkan betapa beratnya perjuangan dalam upaya mendapatkan sebuah alat pemancar radio yang diperuntukkan bagi perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa gugurnya para pemuda itu semakin menambah nilai perjuangan yang melekat pada perangkat Radio Rimba Raya. Karena untuk mendapatkan perangkat radio itu dibeli dengan darah dan nyawa para pemuda Indonesia dari Aceh.

Terlepas dari jatuhnya korban, seorang yang perlu diperhatikan adalah John Lie. Dengan kelihaihan strategi yang dilakukannya telah memungkinkan pemancar tersebut sampai ke Aceh. Strategi yang ditempuh oleh John Lie, yaitu dengan menggunakan dua buah speed boat, yang satu diisi dengan pemancar radio dan yang satu lagi diisi dengan barang-barang makanan dan kelontong. Speed boat yang berisi bahan makanan dijadikan pancingan manakala ada pengejaran musuh. Ketika mereka berada di tengah laut dan berpas-pasan dengan patroli Belanda, speed boat yang berisi barang dan bahan makanan dijadikan umpan dengan cara

mempercepat larinya dan memisahkan diri dari speed boat yang berisi pemancar radio, seolah-olah speed boat yang berisi barang-barang tersebut lari dari kejaran tentara Belanda. Strategi yang ditempuh itu memancing patroli Belanda dan mengejar speed boat tersebut hingga berhasil dilumpuhkan. Situasi yang demikian itu, speed boat yang berisi pemancar radio mengambil kesempatan untuk mempercepat laju pelayaran menuju pantai Sumatera, kemudian mendarat melalui Sungai Yu, Tamiang. Kesempatan mencari perangkat radio ke Malaysia itu, juga mereka manfaatkan untuk membawa barang-barang dagangan berupa karet, pala, pinang, kopra, dan lain-lain.

Pemancar radio yang sudah berhasil diseludupkan dari Malaysia itu, dipasang pertama kali di Krueng Simpo yang terletak sekitar 19 km dari kota Bireuen. Penempatan radio di Krueng Simpo semata-mata karena pertimbangan keamanan, karena pada waktu itu pemancar tersebut belum memungkinkan dibawa ke Kutaraja. Mengingat daerah Krueng Simpo jauh dari intaian Belanda, dirasa sangat tepat mendirikan pemancar radio di tempat itu, sementara studionya dipasang di kota Bireuen. Untuk pemasangan pemancar radio itu dilakukan oleh W. Schulz, salah seorang pegawai Dinas Pos dan Telegran/Telepon dan dibantu oleh beberapa orang pemuda yang ada di Aceh, seperti Letnan Sayuddin Thalib, Letnan R. Abdullah, Letnan Syarifuddin, dan Ramli Melayu.

Ketika situasi sudah dianggap memungkinkan, atas perintah Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo, Teungku Muhammad Daud Beureu-eh, pemancar radio

tersebut dipindahkan ke Kutaraja. Kutaraja sebagai ibukota dan pusat administrasi pemerintahan pada waktu itu sangat memerlukan pemancar yang memiliki kekuatan jangkauan suara yang jauh seperti yang dimiliki oleh RRI Aceh. Namun demikian, pemindahan pemancar radio ke Kutaraja berkaitan erat dengan situasi politik pada waktu itu. Karena dengan adanya pemancar radio yang mampu menjangkau hingga ke luar negeri akan memudahkan bagi Gubernur Militer pada waktu itu menyampaikan kebijakan politik demi perjuangan dan akan memudahkan pula mengetahui berita-berita perjuangan.

Pada waktu itu, Belanda masih melakukan blokade-blokade dan propaganda-propaganda. Atas pertimbangan keamanan demi kelancaran dan keselamatan pemancar radio tersebut, maka sesampai di Kutaraja di pasang di Cot Gue, sekitar 8 km dari Kutaraja (kini Banda Aceh), sebagai tempat pemasangan pemancar, atas pertimbangan geografis dan keamanan. Daerah Cot Gue terletak di kaki gunung Seulawah dan aman dari jangkauan musuh. Apabila daerah tersebut sewaktu-waktu diketahui oleh musuh, maka pemancar dengan mudah dapat dipindahkan ke gunung Seulawah melalui Peukan Bilui di Sibreh terus ke Seulimuem.

Penyiaran radio tersebut di lakukan di Kutaraja. Antara studio dan pemancar dihubungkan dengan kabel yang jaraknya sekitar 8 kilo meter. Pemasangan pemancar di Cot Gue juga dilakukan oleh W. Schulz. Penyiarannya dilakukan dengan beberapa signal calling RRI di Kutaraja yang dipancarkan pada gelombang 19 meter. Sementara gelombang pancaran lainnya menggunakan signal calling Radio Rimba

Raya dan Radio Tentara Divisi X. Signal calling Radio Rimba Raya dipancarkan pada gelombang 61 meter. Penyiaran Radio Rimba Raya di Kutaraja dikelola oleh Bagian Penerangan Tentara Divisi X yang dikepalai oleh A. G. Mutyara.

Sehari setelah pecahnya Agresi Militer Belanda II, tepatnya pada tanggal 20 Desember 1948, pemancar Radio Rimba Raya terpaksa harus dipindahkan ke daerah lain yang lebih aman dari jangkauan musuh. Pemindahan itu juga dilakukan atas perintah Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo, Teungku Muhammad Daud Beureu-eh. Rencana semula akan dipindahkan ke Burni Bius dekat Takengon. Akan tetapi, rencana itu tidak terwujud karena situasi keamanan yang tidak memungkinkan.

Melihat situasi yang tidak aman itu, Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo, Jenderal Mayor Tituler Teungku Muhammad Daud Beureu-eh, mengundang seluruh pembesar sipil, militer, dan tokoh masyarakat untuk menghadiri rapat khusus pada 19 Desember 1948 di Kutaraja. Ada tiga keputusan penting yang berhasil disepakati, yaitu pertama, rakyat Aceh tetap loyal kepada Republik Indonesia yang diproklamsikan pada 17 Agustus 1945 berdasarkan Pancasila, pemimpin Sukarno-Hatta. Kedua, sebagai konsekuensi logis dari kebulatan tekad di atas, seluruh rakyat Aceh dihimbau untuk Perang Sabil mengusir penjajah Belanda dari bumi Pancasila. Ketiga, Radio Rimba Raya harus difungsikan kembali di daratan tinggi pegunungan Aceh Tengah untuk mengisi kekosongan siaran RRI Pusat melawan propaganda Belanda.

Pada malam hari itu juga keluar instruksi Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo, Teungku Muhammad Daud Beureu-eh, supaya pemancar Radio Rimba Raya di Cot Gue segera dibawa kembali ke pergunungan Aceh Tengah. Sejumlah pasukan khusus Divisi X melarikannya ke Rongga-Ronga di Rimba Raya, Aceh Tengah (setelah Aceh Tengah dimekarkan, daerah Rimba Raya masuk Kabupaten Bener Meriah). Pada 20 Desember 1948, malam harinya sudah mulai beroperasi kembali. Siaran pertama yang dipancarkan adalah instruksi Gubernur Militer, Teungku Muhammad Daud Beureu-eh, yang memberlakukan mobilisasi umum terhadap seluruh penduduk yang sudah dewasa.

Pemindahan pemancar radio dari Kutaraja ke tempat-tempat yang direncanakan selalu diintai dan dibayangkan oleh Belanda. Iring-iringan kendaraan yang membawa pemancar radio selalu diburu oleh pesawat terbang Belanda. Tentara Belanda dengan pesawat terbangnya melakukan penerbangan rendah mengejar truk-truk yang membawa pemancar radio.

Akibat pengejaran dari pihak musuh menyebabkan truk yang mengangkut pemancar radio harus menyingkir dan menyusup ke dalam hutan, berlindung dalam semak-semak belukar. Rimbunnya hutan Aceh Tengah sangat membantu persembunyian mereka dari intaian musuh, sehingga musuh selalu kehilangan jejak. Atas pertimbangan situasi yang tidak menguntungkan serta pengawasan dari musuh yang sangat ketat, maka rencana pemasangan di Burni Bius terpaksa di batalkan. Adapun yang menjadi sopir mobil yang membawa pemancar radio itu bernama Abbas atau lebih populer dengan

nama Kapiten Abbas.

Setelah mendapat nasihat dari Kolonel Husin Yusuf dan W. Schulz yang disampaikan kepada Gubernur Militer, Teungku Muhammad Daud Beureu-eh, maka pemasangan pemancar radio di Burni Bius itu dibatalkan. Keputusan itu dilakukan atas analisis strategis dan perhitungan secara teknis, karena situasi yang tidak menguntungkan serta upaya mengelak dari intaian Belanda. Atas dasar pertimbangan itulah pemancar tersebut dipasang di Rimba Raya, seperti sudah disebutkan sebelumnya.

Daerah Rimba Raya terletak dekat Ronga-Ronga, Kabupaten Bener Meriah. Lokasinya tidak jauh dari jalan Bireuen-Takengon. Dari Bireuen ke Rimba Raya tempat pemasangan pemancar radio itu berjarak sekitar 62 km. Pada waktu itu kawasan Rimba Raya merupakan daerah yang rimbun dengan pohon yang lebat dan kaya dengan marga satwa. Hutan belantara itu kemudian berubah menjadi sebuah ladang yang luas dan tempat permukiman.

Untuk pemasangan Radio Rimba Raya, masih tetap dilakukan oleh W. Schulz dan dibantu oleh Ramli Melayu, Syamsuddin, Letnan Syarifuddin, dan Letnan R. Abdullah. Pada saat pemasangan pemancar mengalami kendala yang sangat besar karena belum ada mesin listrik dan tidak cukup kabel, sehingga proses penyiaran tidak dapat dilakukan. Mengingat pentingnya mesin listrik untuk menghidupkan siaran radio maka berbagai cara diupayakan pencarian listrik dan kabel. Upaya pencarian itu dilakukan oleh Umi Salamah (istri Kolonel Husin Yusuf) dengan menghabiskan waktu

yang panjang dan melelahkan. Akhirnya, mesin listrik ia dapatkan di Kuala Simpang dan langsung dibawa ke Rimba Raya, Aceh Tengah (sekarang masuk wilayah Kabupaten Bener Meriah).

Pemancar yang baru dipasang itu belum dikenal luas oleh masyarakat karena memang pemasangannya sangat rahasia agar tidak diketahui oleh musuh. Penyiaran Radio Rimba Raya menggunakan sinal calling Sumatera, Radio Republik Indonesia yang mengudara pada gelombang pancaran 19 meter, dan Suara Indonesia Merdeka yang mengudara pada gelombang pancaran 25 meter. Untuk signal calling RRI Aceh dipakai gelombang 61 meter, sehingga di luar negeri dapat diterima siarannya.

Sesuai dengan misinya sebagai pengemban amanah perjuangan bangsa, pengelolaan Radio Rimba Raya diserahkan kepada militer, di bawah Bidang Penerangan Militer Divisi X. Penyerahan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan kepada militer sangat erat kaitannya dengan situasi dan kondisi yang masih dalam suasana belum aman. Dari segi kepentingan, Radio Rimba Raya sangat diperlukan untuk keperluan perjuangan melawan Belanda. Untuk mengadakan kontak dan hubungan dengan para tentara divisi yang tersebar dalam hutan dengan tempat yang saling berjauhan.

Kolonel Husin Yusuf dipercayakan untuk memimpin langsung administrasi pengelolaan pemancar Radio Rimba Raya, sedangkan masalah penyiaran ditangani oleh Kepala Penerangan Tentara Divisi X, Kapten A. Gani Mutyara. Untuk

melengkapi kerabat kerja Radio Rimba Raya, menarik beberapa tenaga kerja yang dianggap perlu dan memiliki kemampuan tentang kegiatan penyiaran dari instansi-instansi lainnya.

Pada 19 Desember 1948 diangkat beberapa tenaga untuk melengkapi kerabat kerja Radio Rimba Raya. Pengangkatan itu secara resmi dilakukan dengan surat penetapan No. DX/309/AP/1948. Komandan Angkatan Perang Divisi X TNI menetapkan Teuku Ali Basyah Talsya dan Abdullah Arif dengan pangkat Letnan II TNI untuk bertugas pada penerangan divisi. Kepala penerangan divisi selanjutnya melimpahkan kekuasaan penyelenggaraan penyiaran kepada Letnan Abdullah Arif.

Orang yang bekerja pada jajaran Radio Rimba Raya, baik sebagai teknisi maupun sebagai penyiar dan keamanan tidak terbatas hanya kepada orang Aceh. Akan tetapi juga berasal dari berbagai daerah dan terdiri atas berbagai suku bangsa, bahkan dari bangsa asing. Di lihat dari sudut pandang orang yang bekerja di jajaran Radio Rimba Raya maka dapat dikatakan bahwa Radio Rimba Raya adalah radio yang berskala nasional bahkan internasional.

Personil yang bekerja pada Radio Rimba Raya terdiri atas tenaga pemimpin, penyiar, teknisi, tenaga administrasi, dan sopir. Pembagian tugas kepada personil yang bekerja pada Radio Rimba Raya tidak begitu ketat. Di antara mereka ada yang merangkap tugas seperti Letnan W. Sumampaw yang tugas pokoknya sebagai Kepala Keamanan tetapi juga merangkap sebagai penyiar dalam bahasa Ambon dan

Menado. Personil yang berasal dari bangsa asing yaitu Letnan Abdullah (mantan militer Inggris, tugasnya sebagai penyiar dalam bahasa Inggris), Letnan Candra (kebangsaan India yang bertugas sebagai penyiar dalam bahasa Urdu), Letnan Nargis (berkebangsaan India, mantan militer Inggris), W. Schulz (keturunan Indo Jerman, sebagai kepala teknisi), dan Wung Fei (keturunan Cina yang bertugas sebagai penyiar bahasa Cina). Barisan pemimpin Radio Rimba Raya semuanya berkebangsaan Indonesia, mereka adalah Kolonel Husin Yusuf sebagai pembina sekaligus merangkap editor, Teungku H. Affan juga sebagai pembina, Abdullah Arif sebagai pembina merangkap editor bahasa Aceh, dan Letnan Syarifuddin sebagai wakil ketua sekretaris merangkap sebagai penyiar dalam bahasa Indonesia, bahasa Belanda, dan stenografi.

Adapun yang duduk sebagai penyiar adalah Sersan Mayor Aziz Adli dan Rulamsyah sebagai penyiar dalam bahasa Indonesia dan lagu-lagu, Syamsuddin Rauf sebagai penyiar dalam bahasa Indonesia, dakwah Islam, telegrafis, dan PTT. Ramli Melayu bertugas sebagai penyiar dalam bahasa Indonesia, menyusun lagu-lagu, warta berita, telegrafis PTT dan komentator. M. Idris bertugas sebagai penyiar bahasa Arab, Inggris transliter bahasa Indonesia, Arab, Urdu, warta berita dan komentator bahasa asing. M. Agus Gani sebagai penyiar bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan transliter Indonesia-Inggris dan Belanda.

Bagian teknisi yang mengurus masalah teknis mengudaranya Radio Rimba Raya, sebagai ketua dijabat oleh W. Schulz, dibantu oleh Letnan Raden Abdullah sebagai wakil

kuasai, sangat merugikan bangsa Indonesia. Melalui siaran radio Belanda yang berada di Medan, Batavia, dan Hilversum di Belanda terus saja membeberkan kelemahan dan kejelekan bangsa Indonesia dalam medan pertempuran. Selain itu, mereka juga mengacaukan strategi perjuangan bangsa Indonesia dan menyampaikan berita-berita yang bersifat penghinaan.

Ketika Yogyakarta dikuasai oleh Belanda pada 20 Desember 1948, Indonesia kehilangan ibu kota negara. Yogyakarta merupakan suatu daerah yang memiliki arti penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, sehingga oleh Presiden Sukarno menjulukinya dengan "setangkai payung" untuk Yogyakarta dan Aceh. Setelah Yogyakarta dikuasai oleh Belanda, seluruh fasilitas dalam kota, termasuk RRI Yogyakarta dikuasai oleh Belanda. Dalam situasi seperti itu tampil Radio Rimba Raya sebagai modal perjuangan yang dapat membantah semua propaganda yang dilancarkan oleh Belanda. Hal itu dimungkinkan karena setelah Yogyakarta dikuasai oleh Belanda, tinggallah Aceh sebagai satu-satunya daerah yang menjadi basis pertahanan untuk menyusun kekuatan dan strategi perjuangan melalui informasi.

Dalam situasi genting tersebut, Radio Rimba Raya telah memainkan peranan penting dalam upaya mengobarkan dan membangkitkan semangat perjuangan terutama bagi mereka yang berada di garis depan medan pertempuran. Penyiaran yang menyangkut dengan strategi perang disampaikan dalam bahasa simbol yang diambil dari bahasa Aceh. Penggunaan bahasa simbol supaya tidak dapat

diketahui dan dimengerti oleh musuh. Di antara simbol perjuangan yang dilansirkan dalam bahasa Aceh adalah *udeep saree matee sajan*. Penggunaan semboyan dalam bahasa Aceh kemudian dilarang oleh Husin Yusuf karena dikhawatirkan Belanda akan memonitor posisi Radio Rimba Raya.

Perjuangan Radio Rimba Raya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia telah menempatkan diri sebagai alat perjuangan yang berfungsi mengkanter propaganda Belanda. Hal itu dilakukan dengan cara melawan siaran-siaran radio Belanda dan mengungkapkannya kebrutalannya di berbagai pelosok negeri. Selain itu, juga mengungkapkan kekalahan mereka di berbagai sektor pertempuran sebagai masukan semangat bagi para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Pemerintah Darurat Republik Indonesia melalui siaran radionya yang ditempatkan di Suliki, Sumatera Barat, selalu menyampaikan berita-berita tentang keberadaan Indonesia kepada dunia luar. Radio Rimba Raya mengadakan hubungan langsung dengan Radio Pemerintah Darurat Republik Indonesia tersebut. Radio PDRI di Sumatera Barat diasuh oleh Letnan Udara Dick Tamimy. Hubungan Radio Rimba Raya dengan Suliki, Sumatera Barat, yaitu dalam hal merelai pidato-pidato pemimpin pemerintahan, penerangan-penerangan, usulan-usulan atau komentar yang mencetuskan dan membangkitkan semangat nasional. Selain itu, juga menyiarkan warta berita nasional dan berita luar negeri.

Radio Rimba Raya digunakan pula untuk membuat

kontak komunikasi dengan tokoh-tokoh pejuang militer dan diplomasi. Hubungan dengan Panglima Besar Jenderal Sudirman dan wakilnya T.B. Simatupang di Jawa. Perlawanan militer yang dipimpin oleh keduanya beserta pengikutnya sangat membutuhkan informasi dari Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Hubungan yang dilakukan oleh Radio Rimba Raya sangat erat kaitannya dengan apa yang sedang diperjuangkan oleh para pejuang di Jawa. Radio Rimba Raya pada waktu itu berperan sebagai corong resmi Pemerintah Darurat Republik Indonesia dalam rangka menyampaikan interupsi-interupsi Pemerintah Darurat Republik Indonesia kepada para pejuang serta kepada Komisariat Pemerintah Pusat di Jawa.

Pada awal April 1949, Ketua PDRI, Mr. Amir Syarifuddin Prawiranegara bersama Menteri Agama, K.H. Mansyur berada di daerah Aceh dan menyampaikan pidato di Radio Perjuangan Rimba Raya. Isi pidato Menteri Agama itu tetap mengobarkan semangat perang sabil. Pidato K.H. Mansyur itu sempat direkam oleh Radio Birma di Rangoon.

Komunikasi dan saling tukar informasi antara Radio Pemerintah Darurat Republik Indonesia dengan daerah, sangat penting artinya untuk memperlancar perjuangan dan menjadi kerangka dasar dalam menyusun strategi dan taktik perjuangan selanjutnya. Kontak antara daerah dengan pusat dan sebaliknya, sangat membantu dalam memperkuat koordinasi dan memperkokoh keberadaan bangsa Indonesia. Pemberitaan yang objektif oleh pemuda Indonesia akan menambah kepercayaan dan semangat rakyat serta para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan. Rakyat

semakin mengakui keadaan sesungguhnya tentang Indonesia, ketimbang mendengar dari siaran-siaran musuh yang penuh dengan propaganda dan kebohongan-kebohongan demi menjaga kepentingannya.

Radio Rimba Raya juga sangat berperan dalam menyampaikan intruksi-intruksi dari pemimpin Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Hal itu dapat diperhatikan dari proses perpindahan Mr. Syarifuddin Prawiranegara yang berkedudukan di Sumatera Barat ke Kutaraja. Peristiwa itu disampaikan oleh siaran Radio Rimba Raya kepada perwakilan-perwakilan Indonesia di luar negeri. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia di luar negeri yang mendengar pemberitahuan itu antara lain Sudarsono di India, L.N. Palar di PBB, dan sebagainya.

Peranan yang dimainkan oleh Radio Rimba Raya sangat penting artinya bagi mereka yang berada di luar negeri dalam rangka meyakinkan negara-negara luar terhadap perjuangan dan kemerdekaan Indonesia. Berita perjuangan dan perkembangan dalam negeri menjadi landasan dalam berbagai kebijaksanaan yang diambil para diplomat di luar negeri, baik kemajuan perjuangan secara fisik maupun perjuangan diplomasi. Dari hasil pemberitaan Radio Rimba Raya tentang situasi dan kondisi Republik Indonesia, L.N. Palar di PBB secara tegas mengatakan kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia masih utuh. Melalui siaran radio itu pula ia dengan berani membantah propaganda Belanda yang mengatakan bahwa Belanda telah berhasil menguasai Indonesia kembali.

Ketika berlangsung Konferensi Asia yang membahas tentang Indonesia pada 20--23 Januari 1949 di New Delhi, Radio Rimba Raya melakukan kerja extra dengan menambah jam siaran. Hal itu bertujuan untuk menyampaikan berita-berita yang berkenaan dengan situasi dan kondisi politik dan ekonomi Indonesia kepada wakil-wakil Indonesia yang menghadiri konferensi tersebut. Gambaran tentang peta politik dan ekonomi sangat dibutuhkan sebagai bahan masukan bagi para wakil Indonesia di konferensi itu. Selain itu, Radio Rimba Raya terus memantau perkembangan perjalanan sidang konferensi tersebut sebagai bahan masukan bagi pejuang dan rakyat Indonesia dalam negeri.

Politik yang dimainkan oleh Radio Rimba Raya, baik untuk dalam negeri maupun ke luar negeri terlihat sejak berlangsungnya Agresi Militer Belanda II sampai pada terjadinya Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Keberhasilan perjuangan tidak hanya didukung oleh politik semata, tetapi keberhasilan sebuah perjuangan sangat ditentukan oleh berbagai faktor. Di samping faktor politik yang sangat dominan, faktor ekonomi juga sangat menentukan arah jalannya perjuangan. Dukungan ekonomi sangat penting artinya, terutama untuk perbekalan perang sebagai kebutuhan hidup sehari-hari bagi para pejuang. Dalam perjuangan, kebutuhan primer itu biasanya diperoleh melalui sumbangan masyarakat. Kebutuhan lain yang juga sangat penting adalah berupa perbelakan senjata dan peluru. Persenjataan perang dan transportasi untuk perjuangan juga diperoleh dari sumbangan masyarakat dalam bentuk barang-barang yang dapat dijual untuk membeli senjata.

Terkumpulnya dana dari masyarakat bukanlah suatu pekerjaan yang mudah apalagi dalam situasi peperangan. Untuk itu sangat tergantung dari pendekatan, penerangan, dan penjelasan yang disampaikan kepada masyarakat. Hubungan yang bersifat tatap muka sangat sulit dilakukan pada waktu itu, apalagi dalam suasana kekacauan akibat peperangan. Kesulitan itu hanya dapat diatasi melalui media cetak dan elektronik.

Radio Rimba Raya juga telah ikut ambil bagian dalam upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Peran yang dilakukan Radio Rimba Raya tidak terlepas dari fungsinya sebagai media perjuangan. Radio Rimba Raya mengimbau kepada masyarakat melalui sirannya untuk membantu perjuangan, baik yang sedang berlangsung di Aceh maupun yang sedang terjadi di daerah lain di Indonesia. Radio Rimba Raya menyiarkan berita-berita tentang kegiatan perekonomian perang, baik berupa pemasukan dana dari masyarakat maupun sumbangan dana dari luar negeri. Informasi yang disiarkan itu sangat penting sebagai bahan untuk mempertanggungjawabkan kepada penyumbang dana dan untuk memotivasi para dermawan. Keterbukaan informasi tentang keuangan mengandung nilai psikologis bagi orang yang memberi sumbangan.

Informasi tentang neraca keuangan sangat membantu para pejuang dan pemimpin perang dalam mengatur penggunaan keuangan, supaya sesuai dengan kebutuhan dan persediaan dana. Dari segi politis akan memberikan semangat kepada para prajurit bahwa mereka tidak akan lapar walaupun di hutan bergerilya. Makna politis lainnya, pihak

musuh akan merasa takut dan tidak berani dengan sembarangan menyerang Republik Indonesia, karena para pejuang Indonesia didukung dan dibiayai oleh seluruh lapisan masyarakat yang terkenal dengan perang rakyat semesta.

Radio Rimba Raya juga berperan sebagai pengatur teknis pengambilan pesawat terbang sumbangan rakyat Aceh kepada Pemerintah Republik Indonesia sebagai modal perjuangan bangsa Indonesia. Pada waktu itu pesawat terbang berada di Rangoon (Birma) untuk diterbangkan ke Aceh. Dalam rangka upaya penerbangan itu, sebelumnya harus diberitahukan kepada petugas di Aceh. Radio Birma mengadakan kontak langsung dengan Radio Rimba Raya. Kemudian AURI menugasi Sarsono dari pegawai Pos dan Telegram/Telkom untuk penerimaan dan penyampaian berita.

Berdasarkan berita dari Radio Birma kepada Radio Rimba Raya, Residen Aceh, Teuku Chik Muhammad Daudsyah, memberitahukan kepada Ali Hasjmy selaku pemimpin Divisi Rencong Ksatria Pesindo untuk mempersiapkan lapangan udara Blang Bintang sebagai tempat pendaratan pesawat tersebut. Penerbangan pesawat itu dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak ketahuan oleh musuh. Untuk menjaga keamanan dan keselamatan dari pesawat musuh, pesawat itu dibawa pulang pada malam hari. Ketika pesawat sudah berada di Blang Bintang, para prajurit dan lasykar-lasykar rakyat menyambut gembira dan penuh rasa haru.

Radio Rimba Raya sangat besar peranannya dalam upaya mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Melalui Radio Rimba Raya berita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia disebarluaskan ke seluruh pelosok tanah air, bahkan sampai ke lur negeri. Berkat jasa dan peranan Radio Rimba Raya, para pemimpin bangsa, baik yang berada di tanah air maupun di luar negeri dapat menjalankan misinya dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Mereka dengan mudah dapat menyampaikan pesan, instruksi, dan sebagainya melalui Radio Rimba Raya.

D. Presiden Sukarno Berkunjung ke Bireuen

Harian Semangat Merdeka memuatkan pemberitaan tentang kunjungan Presiden Sukarno ke Aceh. Pada tanggal 15 Juni 1945, Daerah Aceh mendapat suatu kehormatan, dikunjungi oleh Presiden Sukarno. Kunjungan itu dimaksudkan untuk meningatnkan dan mengobarkan semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, khususnya di daerah Aceh.

Rombongan presiden ke Aceh berjumlah 18 orang, yang terdiri atas pemimpin-pemimpin negara pada waktu itu, baik dari kalangan sipil maupun militer.¹ Penyambutan

¹Rombongan tersebut adalah : Sukarno sebagai presiden, Soekiman sebagai Mentri Dalam Negeri, Surjo sebagai ketua Dewan Pertimbangan Agung, Mr. Nazir Datu Pamoncak (utusan RI di Mesir), HS. Mutahar (pegawai tinggi Sekretariat Negara), Tukimin (pegawai Menengah Sekretariat Negara), Said (paman Bung Karno), Hasanuddin (mertua Bung Karno), Mamusung (persfotografer), Asyikin (dokter presiden), Sugandi

dilakukan di lapangan terbang Lhok Nga, Aceh Besar. Penyambutan rombongan kepala negara disambut oleh Gubernur Sumatera Utara Mr. S. M. Amin, Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo Jenderal Mayor Tituler Teungku Muhammad Daud Beureu-eh, Residen Aceh Teuku Muhammad Daudsyah, Amir Husin Almujaheed, pembesar sipil dan militer lainnya serta panitia penyambutan yang diketua oleh Wakil Residen, T. M. Amin.

Selama berada di Aceh, Presiden Sukarno mengadakan serangkaian kegiatan dalam hubungan meningkatkan semangat perjuangan rakyat di daerah Aceh, di antaranya memberi ceramah dan petunjuk-petunjuk dalam bidang politik di gedung Atjeh Bioskop Kutaraja pada malam hari tanggal 15 Juni 1948. Pada keesokan harinya (tanggal 16 Juni 1948), Presiden selaku Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia, melakukan pemeriksaan barisan besar dari Angkatan Perang Republik Indonesia di lapangan Esplanade (kini lapangan Blang Padang di Banda Aceh). Dalam melakukan pemeriksaan barisan itu presiden didampingi antara lain oleh Panglima TNI Komando Sumatera Jenderal Mayor Soehardjo, Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo, Teungku Muhammad Daud

(ajudan presiden), H. Suyono (opsir udara I), Bob Freeberg (pilot RI. 002), Sunaryo (opsir udara), Budiardjo (opsir udara muda), J. Salatu (opsir udara muda), Nyonya Husein Sastranegara (Kori) pramugari. Rombongan yang turut serta dari Bukittinggi : Mr. Muhammad Hasan (Komisaris Negara untuk Sumatera), Jenderal Mayor (nomenklatur pangkat TNI pada masa Perang hingga 1950-an) Suhardjo Harjowardojo (Panglima untuk Sumatera), Dr. F.L. Tobing (Residen Tapanuli, Endamora (staf Komisaris Negara).

Beureu-eh, Panglima Divisi X Kolonel Husin Yusuf dan Komandan Barisan Besar (Komandan Upacara) Kolonel H. Sitompul. Setelah selesai pemeriksaan, presiden dan rombongan berdiri di panggung kehormatan untuk menyaksikan defile barisan angkatan perang. Di tempat yang sama dilangsungkan pula rapat raksasa yang dihadiri oleh banyak orang.²

Puncak acara rapat raksasa di lapangan Blang Padang itu adalah pidato Presiden Sukarno. Dalam pidato itulah Presiden Sukarno menjuluki Aceh sebagai "Daerah Modal Perjuangan Bangsa Indonesia" Hal itu didasarkan pada kenyataan bahwa daerah Aceh pada masa perang mempertahankan kemerdekaan tidak berhasil dikuasai kembali oleh Belanda (kecuali Sabang dan baru dikembalikan oleh Belanda pada tahun 1950). Selain menjuluki Aceh sebagai daerah modal perjuangan bangsa Indonesia, Presiden dalam pidatonya juga mengatakan antara lain : *...dari ribuan kilo meter kami datang di sini spesial untuk bertemu dengan rakjat Atjeh yang terkenal sebagai satu rakjat jang selalu mendjadi kampiun dan pelopor perdjjuangan kemerdekaan rakjat Indonesia, segenap rakjat Indonesia di tanah Djawa, Sumatera, lain-lan kepulauan Sunda Ketjil, Kalimantan, Sulawesi, memandang arah matanya kepada saudara-saudara".*

Kegiatan lain yang dilakukan oleh Presiden Sukarno pada tanggal 16 Juni 1948 itu adalah memupuk semangat para

²*Harian Semangat Merdeka* dengan nomor khusus memberitakan tentang kedatangan Presiden Sukarno ke Aceh. Demikian juga dengan *Harian Kedaulatan Rakjat Yogyakarta* memuat berita "Presiden di Tengah Rakjat Atjeh", Kamis, 17 Juni 1948.

wanita, yaitu dengan memberi penjelasan-penjelasan tentang perjuangan bangsa Indonesia dan ajakan agar para wanita Aceh tidak hanya tinggal diam tetapi harus berperan aktif dalam perjuangan. Kegiatan itu dilakukan presiden di gedung Atjeh Bioskop (kini bekas bioskop Garuda) di Kutaraja (Banda Aceh). Dalam pertemuan tersebut telah disampaikan antara lain ; ...*Saya datang di sini spesial untuk memberikan keinsyafan dan keyakinan kepada saudara-saudara, agar supaya juga wanita Aceh ikut serta mutlak di dalam gerakan kemerdekaan kita....*

Pada pukul 12.00 hari yang sama, presiden mengadakan pertemuan dengan saudagar Aceh yang tergabung dalam Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh (GASIDA). Pertemuan itu berlangsung di Atjeh Hotel yang disponsori oleh para saudagar dalam rangka menjamu rombongan Kepala Negara. Sebelum jamuan makan dimulai, presiden dalam kata-kata sambutannya telah mengetuk hati para saudagar Aceh untuk ikut serta membantu rencana pemerintah dalam usaha perbaikan perekonomian negara pada masa perjuangan. Selain itu, presiden juga menguraikan situasi negara Republik Indonesia pada waktu itu yang sedang dikepung oleh pihak Belanda, sehingga sulitnya perhubungan antarpulau dan antardaerah di Indonesia. Oleh karena itu, untuk menerobos kepingan Belanda dan untuk melancarkan hubungan antarpulau di Indonesia, bangsa Indonesia harus memiliki sejumlah pesawat udara. Untuk itu, menurut presiden di daerah-daerah lain yang telah dikunjungi telah diinstruksikan untuk membentuk panitia pembelian pesawat udara.

Pada kesempatan tersebut, presiden meminta kepada

para saudagar Aceh untuk menyumbang sebuah pesawat udara jenis Dakota. Harga pesawat pada waktu itu (pesawat bekas) M\$ 120.000 (seratus dua puluh ribu dollar Malaysia) atau sama dengan 25 kilogram emas. Himbuan presiden itu mendapat sambutan meriah dari para saudagar Aceh yang tergabung dalam organisasi GASIDA. Pada waktu istirahat, Teuku Muhammad Ali Panglima Polem (Wakil Residen Aceh), mewakili para saudagar Aceh menyanggupi untuk membeli pesawat udara jenis Dakota, sebagaimana himbuan presiden.

Acara lain dari kegiatan presiden pada tanggal tersebut melakukan pembinaan kepada para pemuda. Acara itu diselenggarakan di Atjeh Bioskop pada pukul 20.30 dalam rangka membangkitkan semangat perjuangan para pemuda.

Pada tanggal 17 Juni 1948, presiden dan rombongan menuju Pidie dan disambut dengan meriah oleh masyarakat Pidie, dan melakukan pertemuan di lapangan Kuta Asan Sigli, sebagaimana yang diberitakan oleh Harian Semangat Merdeka. Pada pertemuan di Lapangan Kuta Asan, Sigli, presiden, antara lain mengatakan : "marilah, marilah saudara sekalian menyusun persatuan yang demikian kita dapat meneruskan perjuangan kita. Dengan demikian, tidak ada kesempatan sedikit juga bagi musuh untuk kembali menjajah".

Masih pada tanggal 17 Juni 1948, presiden dan rombongan melanjutkan kunjungan ke Bireuen. Sebagaimana halnya di Kutaraja dan Sigli, di Bireuen presiden juga memberi petuah-petuah kepada masyarakat pada rapat

Perjuangan Rakyat Bireuen Pada Masa Revolusi Kemerdekaan

raksasa yang diadakan khusus untuk membangkitkan semangat rakyat dalam rangka meningkatkan kewaspadaan untuk mempertahankan kemerdekaan akibat adanya Agresi Militer Belanda.

Pada tanggal 19 Juni 1948, presiden beserta rombongan kembali ke Kutaraja dan keesokan harinya yaitu pada tanggal 20 Juni 1948 rombongan presiden kembali ke pulau Jawa.

BAB VI PENUTUP

Bireuen termasuk satu di antara kabupaten di Aceh, sebelum menjadi kabupaten, Bireuen merupakan bagian Kabupaten Aceh Utara. Bireuen berkembang menjadi kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 tahun 1999. Sebagian daerah yang sebelumnya masuk wilayah Aceh Utara beralih menjadi wilayah kabupaten Bireuen. Daerah yang dimaksud di antaranya Samalanga, Pandrah, Jeunib, Peudada, Jeumpa, Juli, Peusangan, Jangka, Gandapura, dan Makmur.

Letak kabupaten Bireuen sangat strategis, sehingga sangat menentukan dalam sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada masa perang kemerdekaan, Bireuen merupakan basis dan titik sentral kegiatan politik, militer, serta pertahanan rakyat semesta. Kegiatan perjuangan itu di antaranya Bireuen pernah menjadi tempat Markas Divisi X/TNI. Hotel Murni sebagai tempat diadakannya rapat-rapat penting berkaitan dengan strategi perjuangan. Bireuen pernah dijadikan tempat penyiaran Radio Rimba Raya masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Sejak lama Bireuen dikenal sebagai pusat pergerakan kebangsaan dan pendidikan. Perguruan Taman Siswa adalah satu di antara contoh yang mengembangkan pembauran dalam pendidikan nasional. Dalam bidang pendidikan agama, sekolah agama tingkat tsanawiyah berkembang pesat sejak tahun 1930-an. Demikian juga dengan organisasi keagamaan, pada tahun 1939 di daerah Bireuen berdiri Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) yang diketuai oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh dan Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap. Tidak lama setelah itu, PUSA mendirikan sebuah perguruan Islam yang diberi nama Normal Islam Bireuen. Pada tahun 1929 berdiri pula Pendidikan Al Muslim. Pada masa revolusi kemerdekaan, di Bireuen juga terdapat satu-satunya sekolah kader perwira untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin militer pada awal kemerdekaan, ketika Indonesia masih dalam keadaan bahaya

Penutup

akibat Agresi Militer Belanda I dan II.

Kabupaten Bireuen merupakan satu di antara tempat lahirnya pergerakan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pendidikan dan agama Islam telah memberikan sumbangan yang besar bagi perjuangan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia, terutama pada masa awal kemerdekaan, sehingga Bireuen dikenal sebagai "Kota Juang".

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Abidin, Zainal. 1990. "Kisah Perjuangan Mempertahankan Daerah Modal." *Dalam Para pelaku Perjuangan, Kisah Perjuangan Mempertahankan daerah Modal Republik Indonesia dari Serangan Belanda*. Jakarta: Beuna.
- Abdullah, Taufik. 1990. *Sejarah Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Press.
- Alfian, Ibrahim dkk. 1982. *Revolusi Kemerdekaan Indonesia di Aceh 1945-1949*. Banda Aceh: Museum Negeri Aceh.
- Alaidinsyah, Meurah. 1992. "Peranan Husin Yusuf dalam Revolusi Kemerdekaan di Aceh (1945-1949)." Skripsi. Banda Aceh: FKIP UNSYIAH.
- Ali, Abdullah et al. 1985. *Sejarah Perjuangan Rakyat Aceh dalam Perang Kemerdekaan 1945-1949*. Banda Aceh: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
- Alibasyah, Teuku, "Peranan Radio Rimba Raya dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia." *Sinar Darussalam*, Banda Aceh, 1986.
- Amin, S.M. 1978. *Kenang-Kenangan Dari Masa Lampau*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Anonimus, 1990. Peranan Radio Rimba Raya dalam Mempertahankan Kemerdekaan. Banda Aceh: KanwilDepdikbudAceh.
- Bardant, Teuku. 1990. "Perjuangan memperlakukan daerah modal Republik Indonesia." *Dalam Para Pelaku Perjuangan, Kisah Perjuangan Mempertahankan Daerah Modal Republik Indonesia dari Serangan Belanda*. Jakarta: Beuna.
- Dailami, H, B.A. 1986. "Peranan Radio Rimba Raya dalam Perjuangan Kemerdekaan RI". *Sinar Darussalam*, Banda Aceh.
- Dua Windu Kodam I/Iskandar Muda. Sejarah Militer Kodam I/Iskandar Muda*. 1972.

- Djadiningrat, Raden Hoesein. 1979. *Kesultanan Aceh*. Terjemahan Teuku Hamid. Banda Aceh: Proyek Rehabilitasi dan Perluasan Museum Daerah Istimewa Aceh.
- Gottschalk, Louis. 1969. *Mengerti Sejarah*. Terjemahan Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI Press.
- Gaharu, Sjamaun. 1998. *Cuplikan Perjuangan di Daerah Modal*. Jakarta, Pusataka Sinar Harapan.
- Hardi. 1993. *Daerah Istimewa Aceh: Latar Belakang Politik dan Masa Depan*. Jakarta: Cita Panca Serangkai.
- Hasan Basry, M. Tanpa tahun terbit. *Untuk Apa Kita Merdeka Amanat dan Kursus Politik Bung Karno di Sumatera dalam Masa Perang Kemerdekaan 1945-1949*, (Jakarta : Kopkar PIP).
- Ismail, Muhammad Gade. 1994. *Tantangan dan Rong-Rongan terhadap Keutuhan dan Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Depdikbud.
- Jakobi, AK. 1992. *Aceh Daerah Modal*. Jakarta: Yayasan Selawah.
- Komite Musyawarah Angkatan 45 Daerah Istimewa Atjeh, Modal Revolusi 45. Seksi Penerangan/Dokumentasi Komite Musjawarah Angkatan 45 Daerah Istimewa Atjeh, (Kutaraja, 1960).
- _____. 1998. *Aceh dalam Perang Mempertahankan Kemerdekaan 1945-1949*. Jakarta: Gramedia.
- Nuridin, Mahdi. 1992. "Peranan Radio Rimba Raya dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia." *Buletin Cacra Himas*, FKIF Unsyiah.
- Reid, Anthony. 1987. *Perjuangan Rakyat Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatra*. Jakarta: Oxford University Press.
- Ramadhan KH. dan Jabbar, Hamid. 1998. *Sjamaun Gaharu Cuplikan Perjuangan di Daerah Modal*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sjamsuddin, Nazaruiddin. 1999. *Revolusi di Serambi Mekah: Perjuangan*

Kemerdekaan dan Pertarungan Politik di Aceh 1945-1949. Jakarta: UI-Press.

Sufi, Rusdi dan Akob, Bachtiar. 2001. *Catatan Peristiwa dan Pelaku Sejarah di Aceh.* Jakarta: CV IPA Abong.

Sulaiman, Isa. 1997. *Sejarah Aceh: Sebuah Gugatan terhadap Tradisi.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Wiwoho, B. 1985. *Pasukan Meriam Nukam Sanany.* Jakarta: Bulan Bintang.

Yusuf, Husin. Tanpa tahun penerbit. *Sedjarah Perdjoengan Pemuda di Daerah Atjeh Sedjak Tahun 1945 Sampai Sekarang Ini.*

Yusda, Nyak. 1990. "Setetets Air dalam Samudra Perjuangan Mempertahankan Daerah Modal Republik Indonesia." Dalam *Para pelaku Perjuangan, Kisah Perjuangan Mempertahankan Daerah Modal Republik Indonesia dari Serangan Belanda.* Jakarta: Beuna.

Zamzami, Amran. 1990. *Jihad Akbar di Medan Area.* Jakarta: Bulan Bintang.

Sumber Internet

<http://www.acehforum.or.id>

<http://acehjeumpa.multiply.com> dan aneukagamaceh.blogspot.com

<http://peusangan.wordpress.com>